



Mesin Uang Makau

Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia

FORUM PAJAK BERKEADILAN



Sitasi

Forum Pajak Berkeadilan et al., Mesin Uang Makau: Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia, November 2020, Jakarta, Indonesia.

Dalam bahasa Inggris:

Forum Pajak Berkeadilan et al. 2020. The Macao Money Machine: Profit shifting and tax leakage in Indonesia's pulp exports. November. Jakarta, Indonesia.

Pengakuan

Organisasi yang menerbitkan laporan ini mengucapkan terima kasih kepada para pengulas laporan ini, yakni para ahli di Finance Uncovered dan sejumlah individu lain yang tidak ingin namanya disebutkan. Tanggung jawab atas materi yang dimuat dalam laporan ini sepenuhnya pada organisasi-organisasi penerbitnya.

Disclaimer

Laporan ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum serta berbagai sumber informasi lainnya sebagaimana disebutkan. Tidak dilakukan verifikasi independen terhadap sumber yang dikutip; dan terhadap pendapat yang diutarakan penyusun, sepenuhnya merupakan pendapat penyusun, yang tidak dimaksudkan sama sekali sebagai nasihat atau masukan khusus kepada orang atau pihak tertentu.

Ringkasan temuan sekaligus permintaan tanggapan telah disampaikan ke APRIL Grup dan PT Toba Pulp Lestari Tbk sebelum laporan ini diterbitkan.

Foto Depan: AndyHe829 / Wikimedia Commons

Mesin Uang Makau

Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia

November 2020

Jakarta, Indonesia



SINGKATAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAGIAN I. PENDAHULUAN	1
1. Maksud dan ruang lingkup	1
2. Rendahnya kinerja pemungutan di Indonesia	2
3. Praktik pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak	4
4. Dugaan pengalihan keuntungan dalam ekspor pulp larut Indonesia	5
BAGIAN II. KETIMPANGAN DATA PERDAGANGAN PULP LARUT INDONESIA DAN TIONGKOK	8
5. Ketimpangan data perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok	8
6. Satu-satunya produsen pulp larut Indonesia sampai 2016	8
7. Ekspor pulp dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara	12
8. Korelasi statistik ekspor “Toba Cell Eucalyptus Pulp” dengan impor pulp larut Tiongkok dari Indonesia	16
9. Peran DP Macao memasarkan produk PT Toba Pulp Lestari ke pembeli internasional	18
10. Bauran produk PT Toba Pulp Lestari berdasarkan data penjualan DP Macao	22
BAGIAN III. DUGAAN PENGALIHAN KEUNTUNGAN (PROFIT SHIFTING) OLEH PT TOBA PULP LESTARI	26
11. Pada ekspor, apa untungnya melaporkan pulp larut sebagai pulp kelas-kertas?	26
12. Menghitung dugaan pendapatan DP Macao memasarkan produk PT Toba Pulp Lestari	29
13. Memperkirakan pernyataan penghasilan yang diduga terlalu rendah oleh PT Toba Pulp Lestari	31
14. Laba dan pembayaran pajak korporat yang dilaporkan PT Toba Pulp Lestari	33
15. Pelaporan yang lebih akurat sejak tahun 2017	35
BAGIAN IV. INDIKASI PRAKTIK PENGALIHAN KEUNTUNGAN YANG SERUPA OLEH APRIL GRUP	37
16. Produksi pulp larut APRIL selama tahun 2016–2018	37
17. Kesenjangan data perdagangan Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2017 dan 2018	39
18. Ekspor pulp larut APRIL ke Tiongkok	41
19. Dugaan <i>under-statement</i> pendapatan APRIL	42
BAGIAN V: PERBAIKAN TATAPEMERINTAHAN DEMI MEMBERANTAS KEBOCORAN PAJAK DARI PENGALIHAN KEUNTUNGAN	46
20. Cakupan masalah bagi Indonesia dan dunia	46
21. Upaya perbaikan regulasi demi mengendalikan praktik pengalihan keuntungan	47
22. Memperbaiki kinerja ekspor sambil meningkatkan kewaspadaan Instansi Kepabeanan	50
BAGIAN VI: KESIMPULAN	52
23. Rangkuman temuan	52
BAGIAN VII: REKOMENDASI	54
24. Rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN A: TANGGAPAN PT TOBA PULP LESTARI TBK TERHADAP ARTIKEL MAJALAH TEMPO 3–9 FEBRUARI 2020	64
LAMPIRAN B: TANGGAPAN PT TOBA PULP LESTARI TBK TERHADAP TEMUAN UTAMA DALAM LAPORAN	65
LAMPIRAN C: TANGGAPAN APRIL GRUP TERHADAP TEMUAN UTAMA DALAM LAPORAN	66
LAMPIRAN D: DOKUMENTASI PERAN SUKANTO TANOTO SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI UTAMA PT TOBA PULP LESTARI TBK, DP MACAO, DAN SATERI	67

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar RE-1. Perdagangan pulp larut Indonesia – Tiongkok, 2007–2018	v
Gambar 1. Kepemilikan manfaat yang tumpang tindih di PT Toba Pulp Lestari Tbk, APRIL Group, Sateri, dan Royal Golden Eagle (RGE) Group International	6
Peta 1: Lokasi pabrik pulp, pelabuhan, pabrik VSF, dan negara yang terkait lewat hubungan pemilikan atau perdagangan dengan PT Toba Pulp Lestari dan/atau pabrik APRIL Grup di Pangkalan Kerinci	7
Gambar 3. Kapasitas produksi tahunan pulp larut dan pulp kelas-kertas (BHKP) di PT Toba Pulp Lestari	9
Gambar 2. Pengiriman pulp larut dari Indonesia ke Tiongkok, 2007–2016	9
Gambar 4. Total volume produksi pulp (2007–2016) dan penjualan (2011–2016) PT Toba Pulp Lestari	12
Gambar 5. Perbandingan antara pulp yang diekspor dari Pelabuhan Belawan dan volume penjualan pulp PT Toba Pulp Lestari dari tahun 2007–2016	13
Gambar 6. Contoh catatan ekspor pengiriman Toba Pulp ke DP Macao yang diklasifikasikan sebagai Kode HS 470329 dengan deskripsi “Toba Cell Eucalyptus Pulp”	14
Gambar 7. Perbandingan antara pulp kelas-kertas (BHKP) dan pulp larut	14
Tabel 1. Definisi Kode HS 470200 dan 470329	16
Gambar 8. Ekspor “Toba Cell Eucalyptus Pulp” (HS 470329) dari PT Toba Pulp Lestari, dan impor pulp larut (HS 470200) Tiongkok dari Indonesia, April 2010 – Desember 2016	17
Gambar 9. Total nilai penjualan dari PT Toba Pulp Lestari dan nilai penjualan kepada DP Macao, 2008–2016	19
Gambar 10. Sukanto Tanoto sebagai pemegang saham kendali di PT Toba Pulp Lestari, DP Macao, dan Sateri	19
Gambar 11. Hubungan dagang antara PT Toba Pulp Lestari Tbk, DP Macao, SC International Macao (setelah bulan September 2010), dan pembeli pulp larut	20
Tabel 2. Penjualan pulp larut oleh DP Macao selama tahun 2008, 2009, dan Januari–Juni 2010	22
Tabel 3. Volume pulp larut dalam ton yang dilaporkan oleh Indonesia, Tiongkok, dan Sateri	23
Gambar 12: Kutipan beranotasi dari prospektus pencatatan Sateri Holdings Limited 2010 untuk Bursa Efek Hong Kong	24
Gambar 13. Harga impor rata-rata (CIF) per ton pulp kelas-kertas (BHKP) dan pulp larut di Tiongkok, 2007–2018	26
Tabel 4. Penjualan pulp kelas-kertas (BHKP) dan pulp larut oleh DP Macao selama tahun 2008, 2009, dan Januari–Juni 2010	27
Gambar 14. Harga satuan rata-rata untuk ekspor pulp PT Toba Pulp Lestari dan impor pulp larut Tiongkok dari Indonesia, 2008–2016	27
Gambar 15. Harga satuan rata-rata ekspor pulp larut Amerika Serikat ke Tiongkok, dan impor pulp larut Tiongkok dari Amerika Serikat, 2007–2017	28
Tabel 5. Sampel pengapalan ekspor PT Toba Pulp Lestari dari Indonesia ke DP Macao, dan impor pulp larut Tiongkok dari Indonesia	29
Gambar 16. Estimasi distribusi harga impor per ton ke Tiongkok untuk pulp larut hasil produksi PT Toba Pulp Lestari yang diekspor dan nampaknya di-salah-klasifikasi, Desember 2007–2016	30
Gambar 17. Estimasi distribusi total nilai pulp larut PT Toba Pulp Lestari yang diekspor dan nampaknya di-salah-klasifikasi dari Indonesia ke Tiongkok, Desember 2007–2016	32
Tabel 6. Produksi dan penjualan pulp, laba bersih, dan pajak penghasilan korporat yang dilaporkan PT Toba Pulp Lestari Tbk, 2007–2016	33
Gambar 18. Produksi pulp larut di pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci di Provinsi Riau, 2016–2018	38
Gambar 19. Pengiriman pulp larut dari Indonesia ke Tiongkok, 2016–2018	40
Gambar 20. Estimasi distribusi harga impor per ton di Tiongkok untuk pulp larut hasil produksi APRIL Grup yang diproduksi dan nampaknya di-salah-klasifikasi dari Indonesia, 2016–2018	43
Gambar 21. Estimasi distribusi total nilai pulp larut APRIL Grup yang diekspor dan nampaknya di-salah-klasifikasi dari Indonesia ke Tiongkok, 2016–2018	45
Gambar 22. Persyaratan dokumentasi untuk transaksi afiliasi berdasarkan PMK-213	48
Gambar 23. Kutipan dari prospektus pencatatan Sateri Holdings Limited di Bursa Efek Hong Kong pada tahun 2010	68
Gambar 24. Kesamaan pemilik PT Toba Pulp Lestari, Pinnacle Company Limited, dan DP Macao, per tanggal 22 November 2017 (dikutip dari pengumuman publik TPL)	70
Gambar 25. Kutipan dari pemberitahuan privatisasi Bracell Limited pada 30 Agustus 2016	71
Gambar 26. Kutipan dari laporan tahunan 2018 PT Toba Pulp Lestari Tbk	73
Gambar 27. Kutipan dari surat edaran dari Sateri Holdings Limited pada 4 November 2014	74

SINGKATAN

AEO	<i>Authorized Economic Operator</i> , atau Operator Ekonomi Bersertifikat
AE pulp	Pulp Acasia Eucaliptus
APRIL	Asia Pacific Resources International Limited Group
BEPS	<i>Base Erosion and Profit Shifting</i> , atau Erosi Dasar Perpajakan dan Pengalihan Keuntungan
BHKP	<i>Bleached hardwood kraft pulp</i> , atau kraft pulp yang dikelantang
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPS	Badan Pusat Statistik
BVI	British Virgin Islands
CbC	<i>Country-by-country</i> , atau negara-per-negara
CEISA	<i>Customs-Excise Information System and Automation</i>
CIF	<i>Cost, insurance, and freight</i> , atau biaya, asuransi, dan pengangkutan, mengacu pada harga barang termasuk biaya kirim dan asuransi sampai batas negara pengimpor
DP Macao	DP Marketing International Limited – Macao Commercial Offshore
FOB	<i>Free on board</i> , atau pengiriman di atas kapal, mengacu pada harga barang sampai dimuat ke kapal sebelum diekspor
HS	<i>Harmonized System</i> , atau Sistem Harmonisasi
HTI	Hutan Tanaman Industri
INRU	Simbol perdagangan untuk PT Toba Pulp Lestari Tbk di Bursa Efek Indonesia
INSW	<i>Indonesia National Single Window</i>
Kg	Kilogram
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LSM	Lembaga swadaya masyarakat
LLC	<i>Limited Liability Corporation</i> , atau Perseroan Terbatas
Ltd	<i>Limited</i> , atau Terbatas, mengacu pada perseroan terbatas di yurisdiksi tertentu
MCAA	<i>Multilateral Competent Authority Agreement</i>
MCO	<i>Macao Commercial Offshore</i>
MNE	<i>Multinational enterprise</i> , atau perusahaan multinasional
OECD	Organisation of Economic Co-operation and Development
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PDB	Produksi Domestik Bruto
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PT	Perseroan Terbatas
Pte Ltd	Private Limited, atau Terbatas Pribadi, mengacu perusahaan yang dimiliki secara pribadi di Singapura
RAPP	PT Riau Andalan Pulp & Paper
RGE	Royal Golden Eagle International Group
RGM	Raja Garuda Mas Group
Rp	Rupiah
Tbk	Terbuka, mengacu pada perusahaan public di Indonesia
TPL	PT Toba Pulp Lestari Tbk
Ton	<i>Air-dried ton</i> , atau ton kering udara
UN Comtrade	United Nations Commodity Trade Statistics Database, atau Database Statistik Perdagangan Komoditi PBB
US\$	Dolar AS
VSF	<i>Viscose staple fiber</i> , atau serat staple viscose

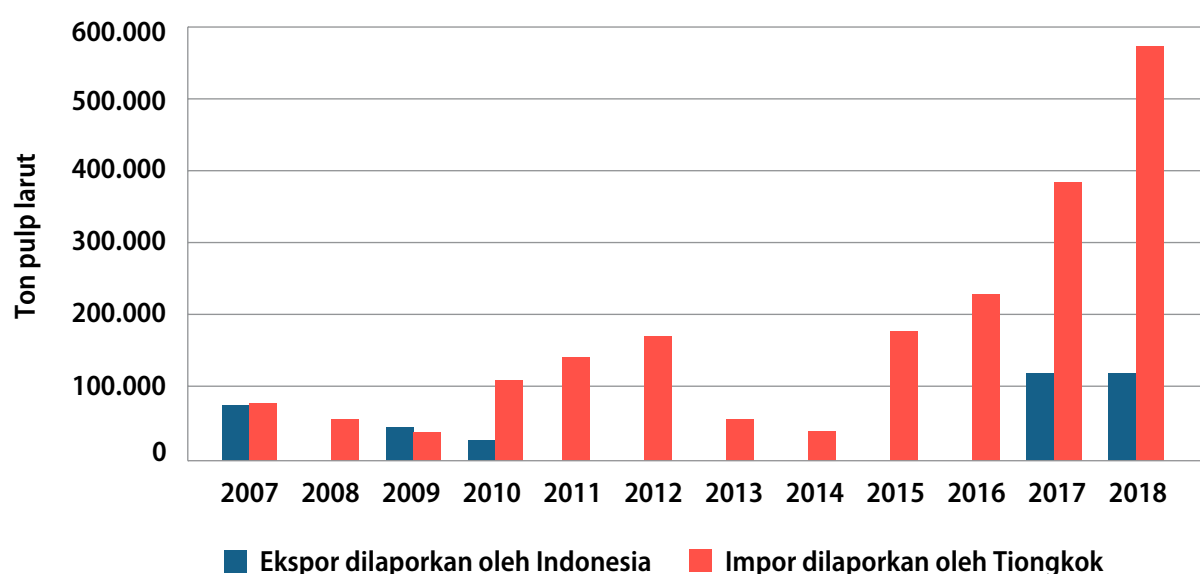
RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini diharapkan menyampaikan analisis mendalam kepada Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya mengenai praktik pengalihan keuntungan (*profit shifting*) pada industri pulp Indonesia. Praktik tersebut tampak mengakibatkan terjadinya pemindahan sejumlah besar laba terkena pajak (*taxable profits*) hasil produksi di Indonesia ke salah satu yurisdiksi surga pajak (*tax haven*). Hal ini turut mengakibatkan rendahnya tingkat pemungutan pajak Indonesia, sehingga mengurangi potensi pendanaan infrastruktur, program kesejahteraan sosial, respons pandemik, dan prioritas fiskal lainnya.

Ketimpangan data perdagangan pulp larut (*dissolving pulp*) Indonesia dengan Tiongkok

Perbandingan statistik perdagangan Indonesia dan Tiongkok menunjukkan ketidaksesuaian besar perihal perdagangan pulp larut, yaitu sejenis pulp khusus yang digunakan dalam proses pembuatan produk tekstil. Menurut data bea cukai Tiongkok, sebagaimana dalam United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), pada 2007–2018 Tiongkok mengimpor lebih dari 2 juta ton pulp larut dari Indonesia. Namun, sebagaimana data Badan Pusat Statistik-Republik Indonesia, Indonesia tercatat mengekspor hanya sekitar 400.000 ton pada periode yang sama.

Gambar RE-1. Perdagangan pulp larut Indonesia – Tiongkok, 2007–2018



Sumber: Data Indonesia untuk HS Code 470200 dari Badan Pusat Statistik; Data Tiongkok untuk HS Code 470200 dari UN Comtrade.

Dugaan pengalihan keuntungan (*profit shifting*) oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk

Menganalisa kesenjangan data perdagangan yang dilaporkan oleh Indonesia dan Tiongkok untuk arus perdagangan yang sama, laporan ini mendokumentasikan dugaan pengalihan keuntungan penjualan PT Toba Pulp Lestari Tbk (selanjutnya disebut TPL), satu perusahaan terdaftar yang mengoperasikan sebuah pabrik pulp di Sumatera Utara yang mampu memproduksi pulp larut dan pulp kertas. Selama 2007–2016, TPL tampaknya salah-lapor (*misreported*) jenis pulp yang diekspor, dengan mengklasifikasi ekspor pulp larut sebagai pulp kelas-kertas (*paper-grade pulp*) yang bernilai lebih rendah saat menjualnya ke perusahaan pemasaran afiliasinya di Makau. Selanjutnya, perusahaan di Makau menerbitkan faktur penjualan pulp larut saat menjualnya ke para pembelinya di Tiongkok, tentu dengan harga jauh lebih

tinggi. Perilaku pengalihan keuntungan yang diduga dilakukan TPL ini pertama kali dilaporkan oleh konsorsium media IndonesiaLeaks melalui serangkaian artikel pada Februari 2020. TPL telah mengklaim bahwa ekspornya selama periode ini diklasifikasikan “sesuai dengan klasifikasi produk dan yurisdiksi hukum.” Tanggapan TPL untuk artikel-artikel ini terlampir dalam Lampiran A.

Menganalisis ketimpangan data perdagangan, laporan keuangan teraudit (*audited financial statements*), dan berbagai informasi lainnya yang diterbitkan oleh TPL dan afiliasinya, laporan ini menghitung terjadinya dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan TPL yang secara buku berakibat lebih rendahnya (*under-stating*) pendapatan TPL sekitar US\$ 426 juta (setara Rp 4,23 triliun) sepanjang 2007–2016. Apabila terhadap penghasilan sebesar itu dikenai pajak penghasilan badan (PPH) sesuai tarif yang berlaku, yang berkisar antara 25% hingga 30% pada periode tersebut, Pemerintah semestinya bisa mendapatkan tambahan penerimaan sekitar US\$ 108 juta (setara Rp 1,07 triliun). Meski demikian, laporan ini tidak sedang menyatakan angka-angka tersebut sebagai pernyataan situasi atau tarif pajak efektif TPL.

Menanggapi temuan dalam laporan ini, Toba Pulp menyatakan: “Mengenai tuduhan pengalihan keuntungan, Perseroan telah memproduksi dan menjual produk sesuai dengan harga kewajaran dan setiap tahun dilakukan penilaian kewajaran atas harga produk oleh konsultan independen. [. . .] Sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990, Perseroan selalu menjunjung tinggi Good Corporate Governance serta tetap berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.”

Praktik pengalihan keuntungan TPL ini tampaknya berakhir pada awal 2017, ketika TPL menerbitkan pengumuman publik berkala yang mengungkap jenis pulp yang diproduksi.

Indikasi pengaturan pengalihan keuntungan serupa oleh APRIL Grup

Laporan ini juga menganalisa penjualan pulp larut APRIL Grup, produsen pulp terbesar kedua di Indonesia, yang dikendalikan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sama dengan TPL. APRIL menyatakan mengekspor lebih dari 800.000 ton pulp larut sepanjang 2016–2018, yang terindikasi kuat sebagian besar diekspor ke pabrik *viscose staple fiber* (VSF) di Tiongkok yang dioperasikan Sateri Grup (terafiliasi dengan APRIL Grup). Akan tetapi, data perdagangan Pemerintah Indonesia tidak menampakkan adanya ekspor pulp larut oleh APRIL, perusahaan operasional utamanya, ataupun anak perusahaannya yang dikenal selama ini. Hal ini, beserta temuan lainnya, menunjukkan bahwa APRIL pada 2016–2018 patut diduga juga mempraktikkan pengalihan keuntungan dengan kemiripan struktur dan akibat sebagaimana patut diduga dilakukan TPL pada 2007–2016.

Perilaku pengalihan keuntungan yang patut diduga dipraktikkan APRIL ini berakibat pada lebih rendahnya pencatatan pembukuan penerimaan perusahaan di Indonesia sebesar US\$ 242 juta (setara Rp 3,35 triliun) pada periode 2016–2018. Secara hipotetis, dengan tingkat pajak penghasilan badan sebesar 25%, terhadap pendapatan sebesar itu berpotensi menambah penerimaan pemerintah sebesar US\$ 60 juta (setara Rp 838 miliar). Meski demikian, patut ditambahkan bahwa laporan ini tidak sedang menyatakan angka-angka tersebut sebagai pernyataan situasi atau tarif pajak efektif APRIL Grup, perusahaan operasional utamanya, maupun anak perusahaannya yang dikenal selama ini.

Menanggapi temuan dalam laporan ini, APRIL menyatakan: “Pada tahun 2016, RAPP telah melakukan kerjasama 2 tahun untuk percobaan (*trial*) pemanfaatan serta peningkatan mutu AE Pulp dengan Sateri di China dengan harapan agar AE Pulp bisa dipakai sebagai bahan baku industri viscose staple fiber. [. . .] Berhubung produk AE Pulp masih dalam tahap uji coba pengembangan, maka RAPP masih

menggunakan HSCode Kraft atau HSCode 4703.290000 hingga spesifikasi produk AE Pulp ini memenuhi standar ekspektasi pembeli.”

Sejak Januari 2019, tampaknya APRIL telah melaporkan ekspor pulp larut dengan klasifikasi produk yang sesuai.

Memberantas pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak untuk meningkatkan penerimaan negara Indonesia

Pemindahan laba yang dapat dikenai pajak ke yurisdiksi surga pajak selama ini merupakan salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan pajak di Indonesia, yang hanya sebesar 11% terhadap GDP, atau lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan memberi sumbangan terhadap target pemerintah, sebagaimana pada 2017 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan target peningkatan rasio penerimaan pajak hingga 15% pada 2020. Laporan ini juga membantu mengidentifikasi praktik pengalihan keuntungan yang merupakan salah satu bagian dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang selama ini sedemikian sulit dikendalikan. Dengan demikian, temuan-temuan laporan ini sinambung dengan upaya peningkatan penerimaan negara oleh Pemerintah Indonesia guna meningkatkan sumber pendanaan pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan sosial, sekaligus mengatasi kesenjangan anggaran yang selama ini cenderung semakin besar.

Bila, setelah melalui pemeriksaan mendalam, Direktorat Jenderal Pajak menemukan TPL dan/atau APRIL Grup melaporkan penghasilan kena pajaknya selama ini terlalu rendah di Indonesia, pungutan terhadap praktik seperti ini akan secara signifikan meningkatkan kinerja pemungutan pajak. Pun akan mengirimkan pesan kuat terhadap korporasi bahwa pemerintah tidak akan mentolerir skema pengalihan keuntungan yang membuka ruang pemindahan laba yang dihasilkan di Indonesia ke yurisdiksi surga pajak.

Laporan ini tidak sedang mengatakan bahwa perusahaan ataupun individu yang disebut dalam laporan ini telah melakukan pelanggaran hukum di Indonesia maupun di negara lain. Praktik pengalihan keuntungan dan transaksi keuangan lintas-negara yang melibatkan yurisdiksi surga pajak tidak selalu ilegal dan mungkin saja sah, sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, lembaga-lembaga yang menerbitkan laporan ini berpendapat bahwa temuan-temuan dalam publikasi ini patut dicermati Pemerintah Indonesia.

Rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang menerbitkan laporan ini menyampaikan rekomendasi berikut kepada Pemerintah Indonesia:

1. Direktorat Jenderal Pajak mengaudit laporan keuangan PT Toba Pulp Lestari Tbk untuk memastikan apakah perusahaan tersebut melaporkan penghasilan kena pajaknya secara jujur dan akurat, dan mematuhi peraturan perundang-undangan, terutama perihal penentuan harga transfer dan penerbitan faktur perdagangan.
2. Direktorat Jenderal Pajak mengaudit laporan keuangan perusahaan-perusahaan APRIL Grup, baik perusahaan induk, operasional, hingga pemasaran, yang terlibat dalam produksi hingga ekspor pulp larut untuk memastikan apakah penghasilan kena pajaknya telah dilaporkan secara jujur dan akurat, mematuhi peraturan perundang-undangan, terutama perihal penentuan harga transfer dan penerbitan faktur perdagangan.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memeriksa kembali laporan keuangan teraudit dan laporan lainnya yang disampaikan PT Toba Pulp Lestari Tbk untuk memastikan apakah perusahaan tersebut telah menyampaikan secara memadai seluruh informasi dan fakta yang diharuskan disampaikan kepada investor dan pemegang sahamnya.
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelidiki apakah PT Toba Pulp Lestari Tbk dan APRIL Grup, termasuk perusahaan induk, operasional, hingga pemasarannya, mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur klasifikasi ekspor pulp dengan kode HS yang benar serta pelaporan harga yang mencerminkan nilai sebenarnya produk yang dipapalkan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji apakah pengawasan ekspor pulp larut telah memadai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, juga apakah dugaan praktik pengalihan keuntungan (*profit shifting*) yang diulas laporan ini berakibat adanya kerugian fiskal bagi Pemerintah Indonesia.
6. Kementerian Keuangan dan KPK melakukan kajian bersama multi-sektoral untuk mengidentifikasi apakah perusahaan-perusahaan di berbagai sektor sumber daya alam di Indonesia mempraktikkan rekayasa faktur dagang (*trade misinvoicing*) dan/atau penyalahgunaan skema harga transfer demi penghindaran pajak.

jenis pulp yang berharga lebih rendah yang umumnya dipakai memproduksi kertas. Majalah Tempo meringkas temuannya sebagai berikut:

Pada akhir 2018, tim IndonesiaLeaks menemukan sejumlah dokumen yang memperlihatkan adanya transaksi mencurigakan antara PT Toba Pulp dan dua perusahaan terafiliasinya itu. Transaksi itu ditengarai dibuat untuk menyembunyikan keuntungan perusahaan hingga ratusan miliar rupiah pada 2007–2016. Praktik lancung tersebut diduga dilakukan Toba Pulp dengan memanipulasi dokumen pencatatan ekspor di bea-cukai yang ada di pelabuhan Indonesia.⁹

Ringkasnya, Majalah Tempo menyimpulkan: *“PT Toba Pulp Lestari Tbk diduga memanipulasi dokumen ekspor bubur kayu ke Cina untuk memindahkan keuntungan mereka ke luar negeri.”*¹⁰ Menurut Majalah Tempo, dugaan manipulasi dokumen tersebut, berupa misklasifikasi Kode HS (*Harmonized System*) – yaitu, kode resmi yang digunakan untuk menetapkan produk yang dikirim – pada catatan ekspor PT Toba Pulp.

Menanggapi Majalah Tempo pada tanggal 3 Februari 2020 (lihat Lampiran A), Dewan Direksi PT Toba Pulp Lestari Tbk menyatakan:

PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) mengklarifikasi tuduhan dugaan manipulasi pencatatan kode produk (*HS Code*) sebagaimana dilaporkan oleh majalah tersebut. Kegiatan ekspor produk yang dilakukan oleh Perseroan berikut pencatatan HS Code tersebut telah sesuai dengan klasifikasi produk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu kami jelaskan bahwa sesuai dengan permintaan pelanggan, sejak pertengahan 2010 hingga pertengahan 2017, Perseroan memproduksi kraft pulp. Dan sebelum periode tersebut, Perseroan memproduksi dua jenis pulp. Keseluruhan produk tersebut menggunakan HS Code yang telah sesuai pada saat produk tersebut diekspor.¹¹

Laporan ini secara teknis memaparkan lebih jauh dugaan pengalihan keuntungan yang disebut media-media di atas. Perlu ditekankan bahwa laporan ini tidak sedang mengatakan bahwa perusahaan ataupun individu yang disebut dalam publikasi ini telah melakukan pelanggaran hukum di Indonesia maupun di negara lain. Praktik pengalihan keuntungan dan transaksi keuangan lintas-negara yang melibatkan yurisdiksi surga pajak tidak selalu ilegal dan mungkin saja sah, sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, lembaga-lembaga yang menerbitkan laporan ini berpendapat bahwa temuan-temuan dalam publikasi ini patut dicermati Pemerintah Indonesia. Di bagian akhir laporan ini disampaikan rekomendasi tindakan tertentu yang dapat dilakukan otoritas terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dimuat publikasi ini.

2. Rendahnya kinerja pemungutan di Indonesia

Pada umumnya, rasio produk domestik bruto (PDB) di suatu negara digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintahannya untuk memobilisasi penerimaan pajak, yang dibutuhkan untuk mendanai investasi pemerintah dan menyelenggarakan pelayanan publik.¹² Dengan rasio penerimaan

9 Tempo, “Jurus Sulap Ekspor Kayu”, *Majalah Tempo*, 1 Februari 2020, <https://majalah.tempo.co/read/hukum/159598/transaksi-fiktif-toba-pulp-lestari>, diakses 29 April 2020.

10 Tempo, “Jurus Sulap Ekspor Kayu”, *Majalah Tempo*, 1 Februari 2020, <https://majalah.tempo.co/read/hukum/159598/transaksifiktif-toba-pulp-lestari>, diakses 29 April 2020.

11 PT Toba Pulp Lestari Tbk, “Tanggapan – PT Toba Pulp Lestari Tbk,” 3 Februari 2020.

12 Akitoby, Bernardin, Anja Baum, Clay Hackney, Olamide Harrison, Keyra Primus and Veronique Salins, “Tax Revenue Mobilization Episodes in Developing Countries.” *Policy Design and Practice* 3 (1): 1–29, 2019, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25741292.2019.1685729>.

pajak terhadap PDB yang hanya 11%, kinerja pemungutan pajak Indonesia lebih rendah dibanding Malaysia, Thailand, Filipina, dan banyak negara berkembang lainnya, seperti Brasil.¹³ Hal ini turut membatasi kemampuan pembangunan Indonesia, sehingga pemerintah berupaya meningkatkannya demi menopang program fiskal saat ini.¹⁴ Pemerintahan Presiden Joko Widodo (atau biasa dikenal Jokowi) kemudian menetapkan target peningkatan pemungutan pajak hingga 15% PDB, yang selanjutnya diterjemahkan melalui serangkaian agenda reformasi fiskal yang cukup ambisius.¹⁵

Yang paling menonjol adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan program *tax amnesty* yang dimaksudkan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, baik perorangan maupun perusahaan.¹⁶ Dengan mendorong pengembalian aset yang kini disimpan di luar negeri (repatriasi), *tax amnesty* diharapkan untuk memperbesar basis pajak negara dan menggenjot penerimaan pajak. Hingga Maret 2017, hampir satu juta orang dan badan usaha terlibat dalam *tax amnesty*, dan lebih dari Rp 4.778 triliun (US\$ 358,6 miliar) dilaporkan ke Kantor Pajak dan Rp. 128 triliun (US \$ 9,6 miliar) telah dihasilkan dari pendapatan.¹⁷

Dasar pemikiran *tax amnesty* adalah banyaknya aset warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar negeri, sehingga di luar jangkauan otoritas pajak. Kebijakan tersebut berhasil memulangkan sejumlah besar uang yang ditahan di luar Indonesia, namun tidak menahan aliran uang yang terus berpindah ke luar negeri. Demi menjaga dampak *tax amnesty* terhadap peningkatan penerimaan pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berupaya mengurangi praktik pengalihan keuntungan melalui praktik harga transfer (*transfer pricing*) yang memfasilitasi pergerakan kekayaan ke yurisdiksi di luar Indonesia.^{18,19} OECD (the Organisation for Economic Cooperation and Development) menyebut pengalihan keuntungan (*profit shifting*) merujuk pada “strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan kesenjangan dan ketidakselarasan aturan pajak yang sedemikian rupa memindah laba ke wilayah bertarif pajak rendah atau tanpa-pajak sama sekali.” Praktik ini pada dasarnya berupa perembesan laba yang dapat dikenai pajak yang dihasilkan di Indonesia ke yurisdiksi lain, sehingga merupakan tantangan tersendiri dalam pengaturan dan penegakan hukumnya.

13 Adrian Wail Akhlaq, “World Bank calls for stronger tax collection to bring 115 million Indonesians into middle class”, *The Jakarta Post*, 31 Januari 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/01/31/world-bank-calls-for-stronger-tax-collection-to-bring-115-million-indonesians-into-middle-class.html>, diakses 29 April 2020; World Bank, “Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class”, 30 Januari 2020, <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class>, diakses 29 April 2020; ICTD/UNU-WIDER, *Government Revenue Dataset*, 2019, <https://www.wider.unu.edu/project/government-revenue-dataset>, diakses 24 Februari 2020.

14 Dengan rasio pajak yang hanya 11%, Indonesia di bawah aturan-praktis (*rule of thumb*) rasio pajak minimum, yakni 15-20%, demi efektivitas pengelolaan suatu negara (negara berpenghasilan tinggi biasanya bertarif pajak 35-45%). Dalam kerangka pembangunan, pemungutan pajak sangat penting, tidak hanya meningkatkan penerimaan, tapi juga sebagai alat redistribusi, representasi, dan penyesuaian harga (*re-pricing*). (lihat Alex Cobham, *Taxation Policy and Development*, The Oxford Council on Good Governance, 2005, http://taxjustice.net/cms/upload/pdf/OCGG_-_Alex_Cobham_-_Taxation_Policy_and_Development.pdf).

15 Suroyo, Gayatri and Hidayat Setiajati. 2017. “Indonesia tax amnesty nets \$330 billion – now for reform.” *Reuters*, March 21, 2017. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-economy-tax/indonesia-tax-amnesty-nets-330-billion-now-for-reformidUSKBN1650AS>.

16 Kementerian Keuangan. 2016. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf>. Hidayat Setiajati, “Late rush to join Indonesia tax amnesty after \$360 billion declared”, *Reuters*, 31 Maret 2017, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-economy-tax-idUSKBN1720VJ>, diakses 29 April 2020.

17 Setiajati. 2017. *Op. cit.*

18 Suroyo. 2017. *Op. cit.*

19 Edi Suwiknyo, “Penghindaran Pajak: Ruang Transfer Pricing Dipersempit”, *Bisnis Indonesia*, 3 Mei 2017, <https://finansial.bisnis.com/read/20170503/9/650250/penghindaran-pajak-ruang-transfer-pricing-dipersempit>, diakses 29 April 2020.

3. Praktik pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak

Dua cara pengalihan keuntungan dan pengurangan kewajiban pajak yang sering dipakai korporasi adalah praktik harga transfer (*transfer pricing*) dan rekayasa faktur dagang (*trade misinvoicing*). *Transfer pricing* berkenaan dengan pengaturan harga pada transaksi satu wajib pajak, perorangan atau badan hukum, dengan pihak terkait.²⁰ Bagi korporasi, hal ini termasuk penjualan barang dan jasa antar-anak perusahaan, perusahaan terafiliasi, maupun entitas komersial di bawah kepemilikan atau pengendalian yang sama di dalam perusahaan induk yang sama. Menurut hukum Indonesia, transaksi demikian adalah legal bila sesuai dengan kaidah *arm's length* yang diterima secara internasional, yakni harga antar-pihak berelasi (*related parties*) yang dilaporkan sama dengan harga transaksi normal dengan pihak tak berelasi (*unrelated parties*).²¹ Namun, bila suatu harga transfer direkayasa untuk menguntungkan satu pihak berelasi demi mengurangi kewajiban pajak grup secara keseluruhan, hal tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan harga transfer (*abusive transfer pricing*) yang bisa jadi ilegal.

Rekayasa faktur dagang (*trade misinvoicing*) adalah cara kedua, yang, sebagaimana *transfer pricing*, biasa dilakukan dengan mengalihkan laba dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Global Financial Integrity (GFI), sebuah lembaga *think-tank* berkedudukan di Washington, DC, Amerika Serikat, mendefinisikan rekayasa faktur dagang sebagai "suatu metode memindahkan uang secara ilegal lintas batas dengan sengaja memalsukan nilai, volume dan/atau jenis komoditas pada satu transaksi komersial internasional barang atau jasa oleh setidaknya salah satu pihak dalam transaksi tersebut."²² Tidak seperti *transfer pricing* yang penentuan harga pasar dan analisis perbandingannya seringkali sulit dibuktikan,²³ rekayasa faktur dagang cenderung lebih mudah dibuktikan, dan merupakan pelanggaran hukum di kebanyakan yurisdiksi. Global Financial Integrity menengarai rekayasa faktur dagang sebagai bagian terbesar arus keluar keuangan ilegal (*illicit financial outflows*) negara berkembang secara global.²⁴

Di Indonesia dan banyak negara lainnya, korporasi banyak yang memakai praktik pengalihan keuntungan demi penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Cara ini seringkali menyangkut transaksi antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan terafiliasi di negara lain yang tarif pajak badannya lebih rendah, atau biasa dikenal dengan surga pajak (*tax haven*). Kementerian Keuangan pada 2015 memperkirakan pemerintah kehilangan penerimaan sekitar Rp 200 triliun (US\$ 15,6 miliar) dari praktik penghindaran pajak korporasi melalui *transfer pricing*, terutama dalam sektor komoditas.²⁵ Global Financial Integrity memperkirakan sejumlah Rp 95,4 triliun (US\$ 6,5 miliar) mengalir keluar dari Indonesia

20 Menurut International Financial Reporting Standards, yang diidentifikasi sebagai pihak terkait (*related party*) adalah "salah seorang anggota atau kerabat dekat keluarga disebut terkait dalam satu pelaporan entitas bila orang tersebut memegang kendali, pengendalian bersama, atau berpengaruh kuat terhadap entitas tersebut atau merupakan bagian dari personalia kunci manajemen"; atau, "satu entitas disebut terkait dalam satu pelaporan entitas bila, di antara berbagai situasi lainnya, merupakan perusahaan induk, anak perusahaan, sesama anak perusahaan, rekanan (*associate*), atau usaha patungan (*joint venture*) entitas penerbit laporan tersebut, atau dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan atau dikelola oleh seseorang yang merupakan pihak terkait," dalam International Accounting Standard Board, *IAS 24 Related Party Disclosure*, 2019, <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-24-related-party-disclosures/>.

21 Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-04/PER%20-%2032.PJ_.2011%20tg%20Perubahan%20PER-43.PJ_.2010%20tg%20Penerapan%20Prinsip%20Kewajaran%20dan%20Kelaziman%20Usaha%20.pdf.

22 Global Financial Integrity (GFI), "Trade Misinvoicing", <https://gointegrity.org/issue/trade-misinvoicing/>, diakses 30 April 2020.

23 Financial Transparency Coalition, "\$20,000 for a Refrigerator? Abusive Transfer Pricing Explained", 2 Agustus 2010, <https://financialtransparency.org/20000-for-a-refrigerator-abusive-transfer-pricing-explained/>, diakses 30 April 2020.

24 GFI 2020, *Ibid*.

25 Gayatri Suroyo dan Eveline Danubrata, "Indonesia to crack down on corporate tax avoidance", *Reuters*, 23 Februari 2015, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-taxavoidance-idUSKBN0LS05320150224>, diakses 30 April 2020.

pada tahun 2016 melalui pencatatan lebih rendah faktur ekspor (*under-invoicing of exports*) dan pencatatan lebih tinggi faktur impor (*over-invoicing of imports*).²⁶ Kedua sumber tersebut tidak menyediakan informasi spesifik mengenai pengalihan penghasilan di industri pulp Indonesia.

4. Dugaan pengalihan keuntungan dalam ekspor pulp larut Indonesia

Laporan ini mendokumentasikan dugaan pengaturan pengalihan keuntungan demi memindahkan ke luar negeri sejumlah besar laba yang diperoleh PT Toba Pulp Lestari Tbk dari pabrik pulpnya di Sumatera Utara, dan membukukannya di salah satu yurisdiksi surga pajak, yakni Makau. TPL adalah perusahaan terdaftar di Indonesia yang mengoperasikan pabrik tersebut di atas guna memproduksi dua jenis bubur kayu (*wood pulp*) dan menjualnya ke pembeli internasional, termasuk ke pabrik di Tiongkok yang dioperasikan perusahaan afiliasinya Sateri Grup. Dengan membandingkan statistik perdagangan Indonesia dan Tiongkok terlihat indikasi titik kunci pengalihan keuntungan TPL tampak adanya salah-klasifikasi jenis pulp yang diekspor. Salah-klasifikasi tersebut mengakibatkan pencatatan produk harga yang lebih rendah (*under-priced*) saat diekspor ke luar Indonesia.

Dengan menganalisis ketimpangan data perdagangan dan laporan TPL berikut afiliasinya, laporan ini mengestimasi dugaan pengaturan pengalihan keuntungan TPL yang berakibat lebih rendahnya pencatatan penerimaan perusahaan di Indonesia sebesar US\$ 426 juta (setara Rp 4,23 triliun) sepanjang 2007–2016. Data dan metodologi yang digunakan untuk estimasi tersebut disajikan secara rinci pada Bagian II dan Bagian III di bawah.

Menanggapi temuan dalam laporan ini, Toba Pulp menyatakan: “Mengenai tuduhan pengalihan keuntungan, Perseroan telah memproduksi dan menjual produk sesuai dengan harga kewajaran dan setiap tahun dilakukan penilaian kewajaran atas harga produk oleh konsultan independen. [. . .] Sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990, Perseroan selalu menjunjung tinggi Good Corporate Governance serta tetap berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.” Tanggapan Toba Pulp secara lengkap, yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2020, disajikan secara lengkap pada Lampiran B.

Organisasi-organisasi penerbit laporan ini menyadari bisa jadi terdapat alasan bisnis yang sah bagi perusahaan menggunakan praktik pengalihan keuntungan dan membukukan laba di yurisdiksi yang pajak badannya rendah. Betapapun, sebagaimana dijelaskan laporan ini, adalah penting bagi otoritas pajak mencermati praktik tersebut secara seksama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

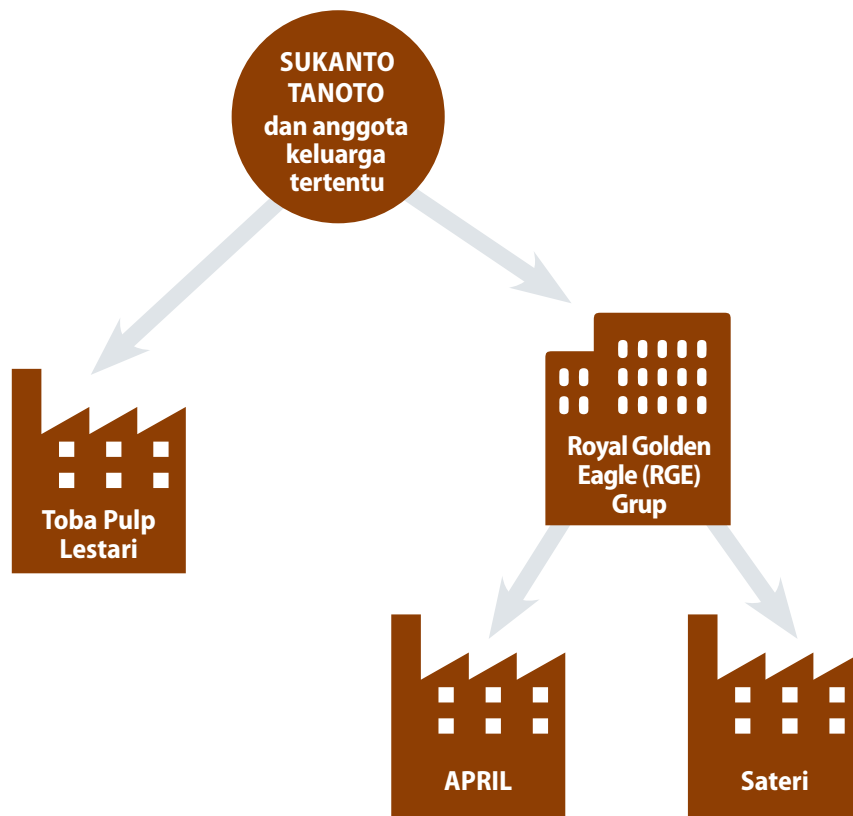
Laporan ini lebih jauh menganalisis penjualan pulp larut yang dilaporkan APRIL Grup, produsen pulp terbesar kedua di Indonesia, yang dikendalikan pemilik manfaat²⁷ yang sama dengan TPL dan Sateri, yakni Sukanto Tanoto dan anggota tertentu dari keluarganya (lihat Gambar 1).²⁸ APRIL Grup menyatakan

26 Global Financial Integrity, “Indonesia: Potential Revenue Losses Associated with Trade Misinvoicing”, 23 Juni 2019, <https://gfin integrity.org/report/indonesia-potential-revenue-losses-associated-with-trade-misinvoicing/>, diakses 30 April 2020.

27 Pemilik manfaat (*beneficial owner*) merupakan terminologi yang merujuk kepada orang atau sekelompok orang yang memegang kendali atas suatu perusahaan dan/atau menerima manfaat darinya. Pemilik manfaat bisa jadi, tapi tidak selalu, adalah sama dengan pemilik secara hukum atau secara formal perusahaan tersebut.

28 Koalisi yang menerbitkan laporan ini tidak melihat bukti yang menunjukkan bahwa Sukanto Tanoto atau anggota keluarganya secara pribadi mengarahkan skema atau praktik yang melanggar hukum.

Gambar 1. Kepemilikan manfaat yang tumpang tindih di PT Toba Pulp Lestari Tbk, APRIL Group, Sateri, dan Royal Golden Eagle (RGE) Group International



Sumber: "Profil Perusahaan PT Toba Pulp Lestari Tbk" dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 Februari 2020; PT Toba Pulp Lestari Tbk pernyataan publik tentang transaksi material dan transaksi afiliasi tertanggal 22 November 2017; Bracell Limited pengajuan privatisasi dan penarikan pendaftaran tertanggal 30 Agustus 2016; surat edaran Sateri Holdings Limited tertanggal 19 November 2014; situs web Royal Golden Eagle (RGE) Group. <https://www.rgei.com>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2020.

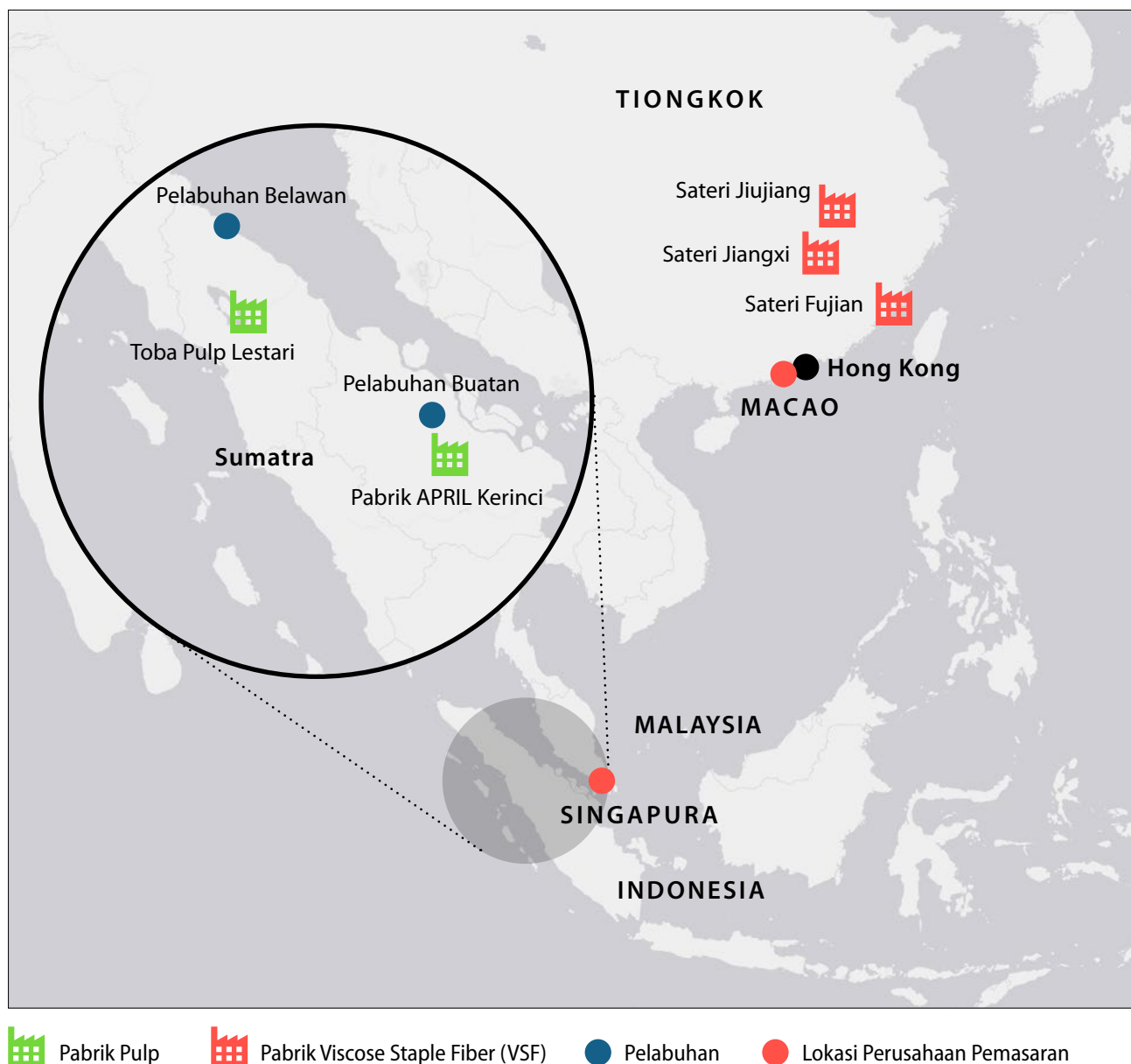
mengeksport pulp larut lebih dari 800.000 ton pada 2016–2018, dan terdapat indikasi kuat bahwa sebagian besar diekspor ke pabrik afiliasi di Tiongkok. Akan tetapi, data Pemerintah Indonesia pada periode tersebut tidak memuat adanya ekspor pulp larut oleh APRIL, perusahaan operasional utamanya, maupun perusahaan-perusahaan yang selama ini dikenal sebagai anak perusahaannya. Berdasarkan data pengapalan perdagangan yang dianalisis laporan ini, ekspor pulp kelas-kertas (*paper-grade pulp*) APRIL sepanjang tiga tahun tersebut ditujukan ke perusahaan pemasaran dan penjualan afliasinya di Makau, Singapura dan Malaysia, yang kemudian dijual lagi ke perusahaan lain di Tiongkok dan negara lain.

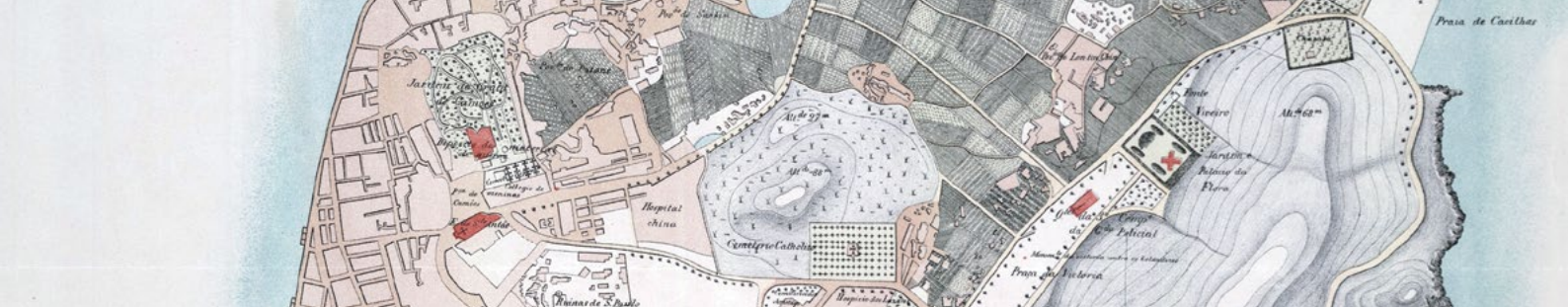
Hal itu, beserta temuan-temuan lainnya, menunjukkan bahwa pada 2016–2018 APRIL patut diduga melakukan praktik pengalihan keuntungan serupa TPL pada 2007–2016, baik secara struktur maupun hasil. Dugaan pengalihan keuntungan oleh APRIL pada 2016–2018 tersebut diperkirakan berakibat lebih rendahnya pencatatan penerimaan perusahaan itu di Indonesia, mencapai Rp 3,35 triliun (US\$ 242 juta). Data dan metodologi yang digunakan untuk estimasi ini disajikan secara rinci pada Bagian IV di bawah.

Menanggapi temuan dalam laporan ini, APRIL menyatakan: "Pada bulan Februari 2016, RAPP [anak perusahaan APRIL, PT Riau Andalan Pulp and Paper] telah mendapatkan izin untuk memproduksi Dissolving Pulp dari BKPM. Setelah mendapatkan izin tersebut, RAPP melakukan serangkaian uji coba

produksi jenis pulp baru yang kami namakan Acacia Eucalyptus (AE) Pulp yang merupakan modified kraft pulp. [...] Berhubung produk AE Pulp masih dalam tahap uji coba pengembangan, maka RAPP masih menggunakan HSCode Kraft atau HSCode 4703.290000 hingga spesifikasi produk AE Pulp ini memenuhi standar ekspektasi pembeli. Dan setelah 2 tahun masa uji coba, Sateri memberikan konfirmasi bahwa AE Pulp RAPP bisa mencapai kualitas yang sama atau subsitusi Dissolving Pulp bagi proses produksi mereka. Sebagai realisasi kerjasama, RAPP sudah mengekspor sesuai dengan kebutuhan Sateri dengan HS HSCode Dissolving Pulp atau HSCode 4702.000000."Tanggapan APRIL secara lengkap, yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2020, disajikan secara lengkap pada Lampiran C.

Peta 1: Lokasi pabrik pulp, pelabuhan, pabrik VSF, dan negara yang terkait lewat hubungan kepemilikan atau perdagangan dengan PT Toba Pulp Lestari dan/atau pabrik APRIL Grup di Pangkalan Kerinci





BAGIAN II. KETIMPANGAN DATA PERDAGANGAN PULP LARUT INDONESIA DAN TIONGKOK

5. Ketimpangan data perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok

Selama periode sepuluh tahun sejak 2007, Tiongkok melaporkan jauh lebih banyak impor pulp larut dari Indonesia ketimbang yang dilaporkan Indonesia sebagai ekspor ke Tiongkok. Tiongkok mengimpor lebih dari 1,1 juta ton pulp larut dari Indonesia sepanjang 2007–2016, demikian pencatatan laporan pemerintah Tiongkok ke United Nations Commodity Trade Statistics Database (selanjutnya disebut UN Comtrade).²⁹ Akan tetapi, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengekspor hanya 150.000 ton pulp larut ke Tiongkok pada rentang waktu tersebut.³⁰ Artinya, selama sepuluh tahun tersebut, Tiongkok mencatat impor pulp larut dari Indonesia jauh lebih banyak daripada pencatatan ekspor Indonesia ke Tiongkok, sebanyak 950.000 ton atau sekitar 30.000 kontainer. Tujuh tahun terakhir rentang sepuluh tahun tersebut, Tiongkok mencatat impor sejumlah besar dari Indonesia sementara Indonesia sendiri tidak mencatat adanya ekspor sama sekali, atau hanya sejumlah kecil.

Seperti yang ditunjukkan dalam Grafik 2, data impor Tiongkok menunjukkan adanya impor pulp larut dari Indonesia setiap tahun pada 2007–2016. Meski impor tersebut melebihi 100.000 ton masing-masing pada 2010, 2011, 2012, dan 2015, dan bahkan melebihi 200.000 ton pada 2016, namun Indonesia, sebagaimana data BPS, tidak mencatat adanya ekspornya ke Tiongkok kecuali sejumlah sangat kecil pada 2010.³¹

6. Satu-satunya produsen pulp larut Indonesia sampai 2016

Perbedaan mencolok data ekspor pulp larut Indonesia dengan impornya oleh Tiongkok berimplikasi besar terhadap TPL, karena sampai 2016 perusahaan itulah tercatat sebagai satu-satunya produsen pulp larut di Indonesia.³² Setiap produksi pulp larut di Indonesia dan ekspornya ke negara lain sebelum 2016 hampir bisa dipastikan diproduksi oleh TPL. Meski, sebagaimana disebut di bawah, TPL tidak mengumumkan ke publik seberapa banyak pulp larut yang diproduksinya sepanjang 2007–2016.

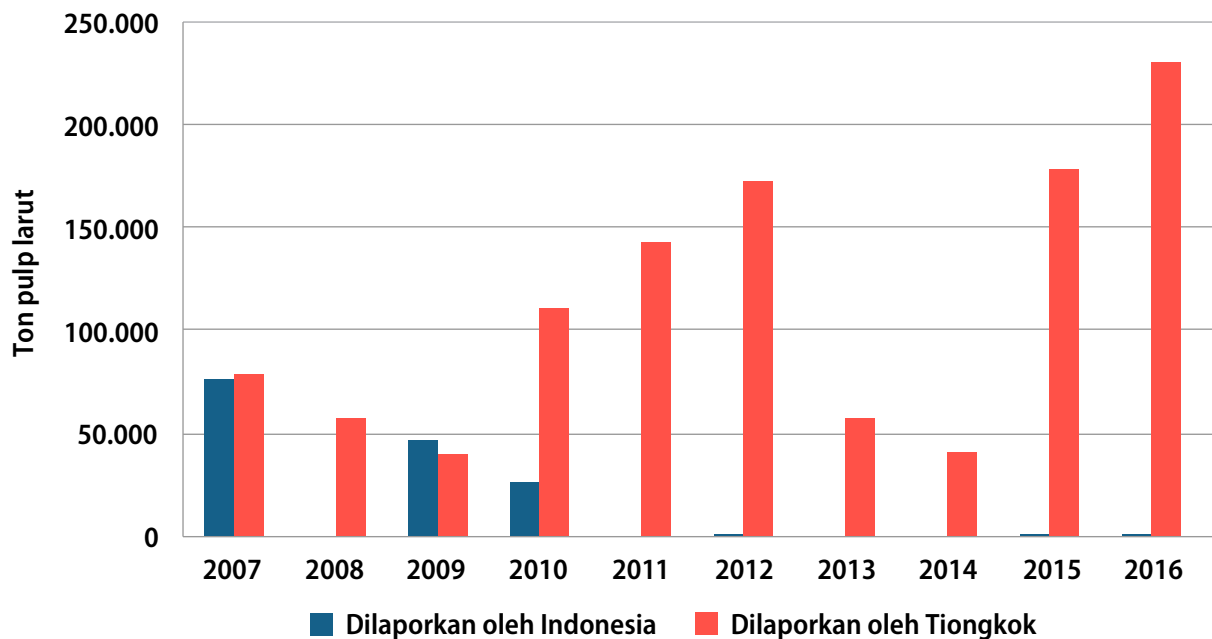
29 The United Nations Statistic Division, UN Comtrade Database, <https://comtrade.un.org>. Sebagaimana dijelaskan di situs web UN Comtrade, “database statistik PBB perihal perdagangan komoditas (UN Comtrade) memuat rincian statistik ekspor dan impor yang dilaporkan otoritas statistik hampir 200 negara atau yurisdiksi”, <https://comtrade.un.org/db/help/ureadMeFirst.aspx>.

30 Badan Pusat Statistik, *Data Ekspor 2007–2018 untuk HS Code 470200 (chemical wood pulp, dissolving grade)*, 2019. Data diperoleh setelah mengajukan permintaan.

31 Aturan pelaporan UN Comtrade untuk importir akhir mensyaratkan bahwa itu tidak mengidentifikasi eksportir langsung tetapi negara asal sebagai yurisdiksi ekspor yang sesuai (lihat Panduan Metodologi untuk Pengguna Comtrade PBB). Akibatnya, data dari pola “perdagangan segitiga” dapat menciptakan anomali volume seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Anomali ini sendiri tidak menunjukkan masalah lebih lanjut. Namun, seperti yang diperlihatkan oleh informasi tambahan yang disajikan di bawah ini, anomali tertentu yang ditunjukkan pada Gambar 2 menunjukkan kasus nyata pengalihan keuntungan.

32 Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas Kementerian Perindustrian Saiful Bahri, sebagaimana dikutip *Majalah Tempo*, menyebut bahwa sebelum tahun 2017 hanya TPL (PT Toba Pulp Lestari) produsen pulp larut di Indonesia, lihat Tempo, “Jurus Sulap Ekspor Kayu”, *Majalah Tempo*, 1 Februari, 2020, <https://majalah.tempo.co/read/hukum/159598/jurus-sulap-ekspor-kayu>, diakses 30 April 2020.

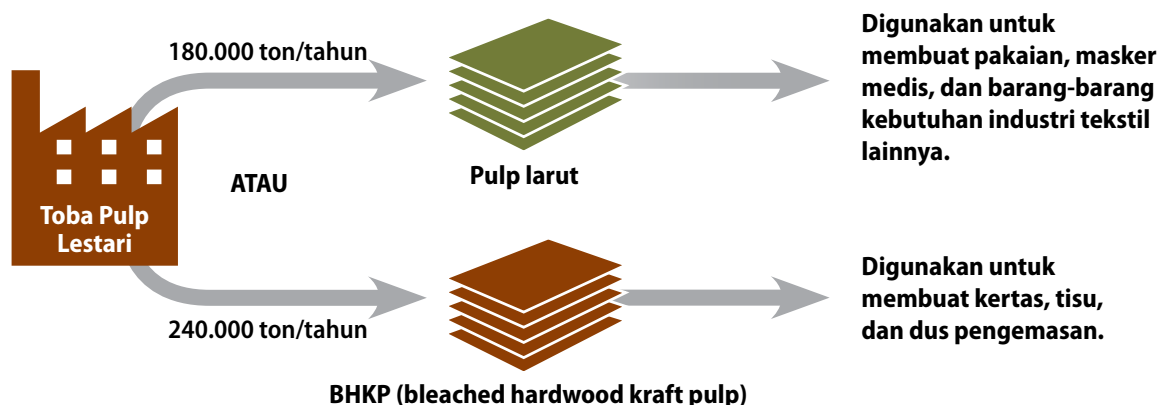
Gambar 2. Pengiriman pulp larut dari Indonesia ke Tiongkok, 2007–2016



Sumber: Data Indonesia dari BPS; data Tiongkok dari UN Comtrade.

TPL mengoperasikan pabriknya di Porsea, Sumatera Utara, pada 1988, saat itu dengan nama PT Inti Indorayon Utama Tbk (lihat Kotak 1). Pabrik di Porsea ini dirancang sebagai *swing mill* yang mampu memproduksi dua jenis pulp: kraft pulp yang dikelantang (*bleached hardwood kraft pulp* – BHKP, selanjutnya disebut pulp kelas-kertas), yang digunakan memproduksi kertas, tisu dan bahan kemasan; dan pulp larut (*dissolving pulp*), digunakan memproduksi rayon dan *viscose staple fiber* (VSF) untuk produk tekstil (lihat Gambar 3). Tidak ditemukan laporan maupun catatan TPL memproduksi produk lain atau terlibat rantai produksi di luar produksi kraft pulp dan pulp larut. Pada 1998, TPL melaporkan kapasitas produksi terpasangnya untuk pulp kelas-kertas sebesar 240.000 ton kering (*air-dried tons*, selanjutnya cukup disebut ton) per tahun; dan untuk pulp larut sebesar 180.000 ton per tahun (lihat Gambar 3).

Gambar 3. Kapasitas produksi tahunan pulp larut dan pulp kelas-kertas (BHKP) di PT Toba Pulp Lestari



Sumber: APRIL Grup. 1998. "APRIL memindahkan sebagian produksi ke pulp larut dan menaikkan harga pulp kertas." Rilis Pers. 26 Maret. PR Newswire.

Kotak 1: Sekilas tentang PT Toba Pulp Lestari Tbk

PT Toba Pulp Lestari Tbk didirikan pada 1983, saat itu dengan nama PT Inti Indorayon Utama Tbk.³³ Didirikan Raja Garuda Mas (RGM Grup), yang saat ini berganti nama menjadi Royal Golden Eagle International (RGE Grup), induk konglomerasi APRIL Grup.³⁴ TPL terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode perusahaan INRU.

Menurut data Bursa Efek Indonesia, per 31 Desember 2019, mayoritas (92,4%) saham TPL dimiliki oleh Pinnacle Company Ltd Pte, satu perseroan terbatas yang terdaftar di Singapura.³⁵ Sukanto Tanoto, pendiri RGE International, tercatat sebagai pengendali saham utama (*ultimate controlling shareholder*) PT Toba Pulp Lestari Tbk (lihat Lampiran D).

Pabrik TPL dilaporkan mampu memproduksi 180.000 ton pulp larut atau 240.000 ton pulp kelas-kertas setiap tahun.³⁶ Sebagai *swing mill*, pabrik ini dapat mengalihkan produksinya antara pulp kelas-kertas dan pulp larut.³⁷

TPL juga mengelola konsesi hutan tanaman industri (HTI) seluas 184.486 hektare di Sumatera Utara.³⁸ Dalam konsesi ini TPL menanam eukaliptus untuk dipakai sebagai fiber dalam proses produksi pulp. Pada beberapa tahun terakhir, bahan baku TPL dari hutan tanamannya sendiri dilaporkan menurun, dari 80% dari keseluruhan serat kayunya pada 2017 menjadi kurang dari 40% pada 2019.³⁹ Laporan Tahunan 2018 TPL menyebutkan hal ini disebabkan hutan tanamannya "belum maksimal yang disebabkan oleh penyakit *little leaf*, *helopeltis*, dan *ghalwash*".⁴⁰

TPL memiliki daftar panjang kerusakan lingkungan dan konflik sosial, baik terkait pabrik maupun pengelolaan hutan tanamannya.⁴¹ Pada dekade 1990-an, masyarakat lokal menyalahkan pabrik, yang saat itu dioperasikan PT Inti Indorayon Utama, atas pencemaran yang terjadi terhadap kebun dan area penangkapan ikan di sekitarnya.⁴² Pada tahun 1993, sebuah ketel meledak dan

33 Toba Pulp Lestari, *Laporan Tahunan* 2018, 2019a, <https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2019/05/LAPORAN-TAHUNAN-INRU-2018.pdf>, hlm. 124.

34 Detik Finance, "Pinnacle Company Incar Saham Toba Pulp Lestari", *Detik*, 19 Oktober 2007, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-842647/pinnacle-company-incar-saham-toba-pulp-lestari>, diakses 1 Mei 2020.

35 PT Toba Pulp Lestari Tbk, *Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek*, 8 Januari 2020, https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202001/445253b404_fe51cb1b20.pdf, diakses 1 Mei 2020.

36 APRIL Group, *APRIL Switches Part of Production to Dissolving Pulp and Increases Paper Pulp Price*, Siaran pers 26 Maret 1998.

37 Tyagita Silka, "Indonesia's Toba Pulp to invest \$150 mln in capacity", *Reuters*, 10 November 2009, <https://www.reuters.com/article/tobapulp-indonesia/indonesias-toba-pulp-to-invest-150-mln-in-capacity-idUSJAK35424420091110>, diakses 1 Mei 2020.

38 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019*, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019, hlm.47.

39 Sebagaimana tercantum dalam laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) PT Toba Pulp Lestari Tbk tahun 2017, 2018, dan 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

40 Toba Pulp Lestari, 2019a, *Op. cit.*, hlm. 18.

41 Alice Cuddy, "'Give us back our land': paper giants struggle to resolve conflicts with communities in Sumatra", *Mongabay*, 9 Juni 2017, <https://news.mongabay.com/2017/06/give-us-back-our-land-paper-giants-struggle-to-resolve-conflicts-with-communities-in-sumatra/>, diakses 1 Mei 2020; Mike Gaworecki, "Dissolving pulp: the threat to Indonesia's forests you've probably never heard of", *Mongabay*, 23 September 2014, <https://news.mongabay.com/2014/09/dissolving-pulp-the-threat-to-indonesias-forests-youve-probably-never-heard-of/>, diakses 1 Mei 2020.

42 Sander Thoenes, "A Nation Is Let Loose to Protest, but to What End? In Indonesia, a mill accused of ecocide is closed but reopened after protesters waver", *Christian Science Monitor*, 2 November 1998, hlm. 15.

tangki klorin meletus, menyebabkan kerusakan.⁴³ Setelah protes panjang warga dan juga aktivis lingkungan, Pemerintah kemudian membekukan operasional pabrik ini pada akhir 1998.⁴⁴ Pada tahun 2003 pabrik ini diperbolehkan Pemerintah untuk kembali beroperasi dengan syarat tidak memproduksi rayon, dan namanya pun berganti menjadi PT Toba Pulp Lestari.^{45, 46}

Pengelolaan hutan tanamannya juga kerap menjadi sumber kontroversi. Sejumlah kelompok masyarakat di Sumatera Utara telah bertahun-tahun memprotes berbagai area konsesi yang dianggap merampas area kelola mereka.⁴⁷

Di berbagai kesempatan TPL mengindikasikan bahwa keputusan jenis pulp mana yang diproduksi diambil berdasarkan "kondisi pasar dan ketersediaan bahan baku, pun faktor lainnya".⁴⁸ Namun demikian, laporan tahunan TPL sebelum 2018 tidak menyebut berapa porsi pulp kelas-kertas ataupun pulp larut dari keseluruhan produksi atau penjualan tersebut, sehingga publik tidak mendapat gambaran jelas jenis pulp yang diproduksi dan diekspor TPL. Sepanjang 2007–2016, misalnya, laporan tahunan TPL menunjukkan total produksi pulp sebesar 1,8 juta ton, tapi tanpa menyebutkan jenisnya, dengan produksi terbesar terjadi pada 2009 yakni 210.607 ton (lihat Gambar 4). Namun, data tersebut tidak merinci baik volume ataupun nilai masing-masing pulp kelas-kertas dan pulp larut yang diproduksi dan/atau diekspor.

Melalui pengumumannya pada 8 Juni 2010, Toba Pulp menyatakan bahwa produksinya "dialihkan dari pulp kayu ekaliptus *grade* stapel rayon ke pulp kayu *grade* kertas." Sepengetahuan penyusun, tidak ada pengumuman lagi dari Toba Pulp mengenai *grade* pulp yang diproduksi hingga tanggal 3 Maret 2017. Situs web korporat TPL, setidaknya hingga 15 Oktober 2020, tidak memuat pengumuman apapun mengenai adanya peralihan produk antara 8 Juni 2010 sampai dengan 3 Maret 2017. Hal ini mengesankan bahwa sepanjang periode tersebut TPL hanya memproduksi satu produk saja – yakni pulp *grade* kertas.

Dalam tanggapan kepada majalah Tempo pada 3 Februari 2020, TPL menyatakan: "Perlu kami jelaskan bahwa sesuai dengan permintaan pelanggan, sejak pertengahan 2010 hingga pertengahan 2017, Perseroan memproduksi kraft pulp. Dan sebelum periode tersebut, Perseroan memproduksi dua jenis Pulp. Keseluruhan produk tersebut menggunakan HS Code yang telah sesuai pada saat produk tersebut diekspor." Selayang pandang, pernyataan ini sepertinya mengisyaratkan bahwa Toba Pulp hanya memproduksi satu jenis produk pulp saja dari pertengahan tahun 2010 sampai pertengahan tahun 2017, dan berdasarkan pengumuman perusahaan tersebut pada tanggal 8 Juni 2010, sepertinya produk itu merupakan pulp *grade* kertas. Namun, perlu dicatat bahwa pulp larut juga menggunakan bentuk proses kraft termodifikasi. Oleh karena itu, pernyataan perusahaan mengenai produksi kraft pulp masih memungkinkan untuk bisa berlaku pada BHKP dan juga pada pulp larut.

43 Reuters, "Factory gas leak sparks mob frenzy," *Herald Sun*, 9 November 1993.

44 Jay Solomon and Puspa Madani, "Jakarta Shuts Down Rayon Plant Because of Environmental Worries," *The Wall Street Journal*, 11 Mei 2000.

45 Pulp & Paper International, "Toba Pulp Lestari prepares to roll again," Vol. 45, Issue 3, April 2003.

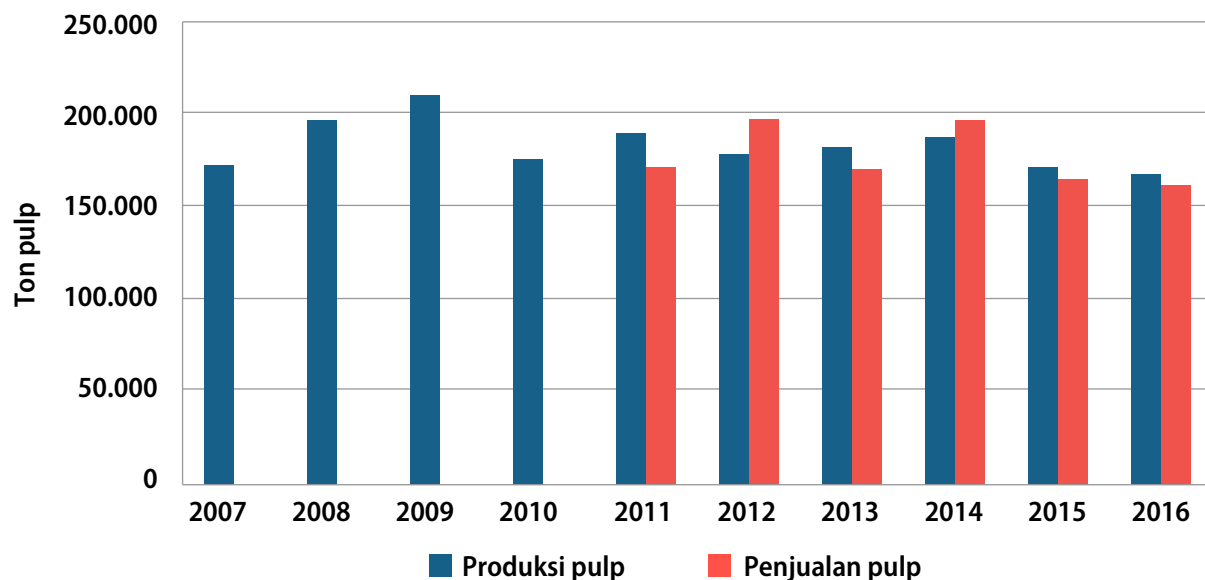
46 Richard Borsuk, "Toba Pulp to dismantle Indonesian rayon plant," *The Wall Street Journal*, 5 Juli 2003.

47 Lihat, misalnya, Sofyan Akbar, "Walhi Sumut: Konflik Agraria Jadikan Masyarakat Sebagai Korban," *Tribun Medan*, 28 November 2019, <https://medan.tribunnews.com/2019/11/28/walhi-sumut-konflik-agraria-jadikan-masyarakat-sebagai-korban>; Ayat S. Karokaro, "Berkonflik Lahan Dengan Toba Pulp Lestari, Ketua Adat Tungko Ni Solu Terjerat Hukum," *Mongabay*, 10 Mei 2017, <https://www.mongabay.co.id/2017/05/10/berkonflik-lahan-dengan-toba-pulp-lestari-ketua-adat-tungko-ni-solu-terjerat-hukum/>; Apriadi Gunawan, "Paper mill deploys force in land conflict," *Jakarta Post*, 22 September 2012, <https://www.thejakartapost.com/news/2012/09/22/paper-mill-deploys-force-land-conflict.html>.

48 Toba Pulp Lestari, "Pemberitahuan PT Toba Pulp Lestari Tbk Beralih ke Produksi Pulp-Dissolving Grade", 24 April 2019, <https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2019/04/Pengumuman-24-April-2019.pdf>, diakses 1 Mei 2020.

Sejak Maret 2017, TPL secara berkala mengumumkan jenis pulp yang diproduksi. Antara Maret 2017 hingga Juni 2019 TPL menyampaikan enam pengumuman yang masing-masing mengindikasikan tanggal spesifik ketika pabrik mengalihkan produksi dari pulp kelas-kertas menjadi pulp larut, atau sebaliknya.⁴⁹ Pada laporan tahunan 2018, TPL juga menyebut volume masing-masing pulp yang diproduksi sepanjang tahun tersebut: “Sepanjang tahun 2018, Perseroan memproduksi sebanyak 139.335 ton dissolving pulp dan 30.571 ton BHKP.” Tampaknya inilah pertama kali TPL menyebut secara terbuka berapa persisnya baik pulp kelas-kertas maupun pulp larut yang diproduksi dalam satu tahun, setidaknya sejak 2007, atau bisa jadi termasuk tahun-tahun sebelumnya juga (lebih rinci lihat Bagian III di bawah).

Gambar 4. Total volume produksi pulp (2007–2016) dan penjualan (2011–2016) PT Toba Pulp Lestari



Sumber: Laporan tahunan PT Toba Pulp Lestari Tbk, 2007–2016.

Catatan: Laporan tahunan PT Toba Pulp Lestari Tbk untuk tahun 2007–2010 tidak melaporkan volume penjualan.

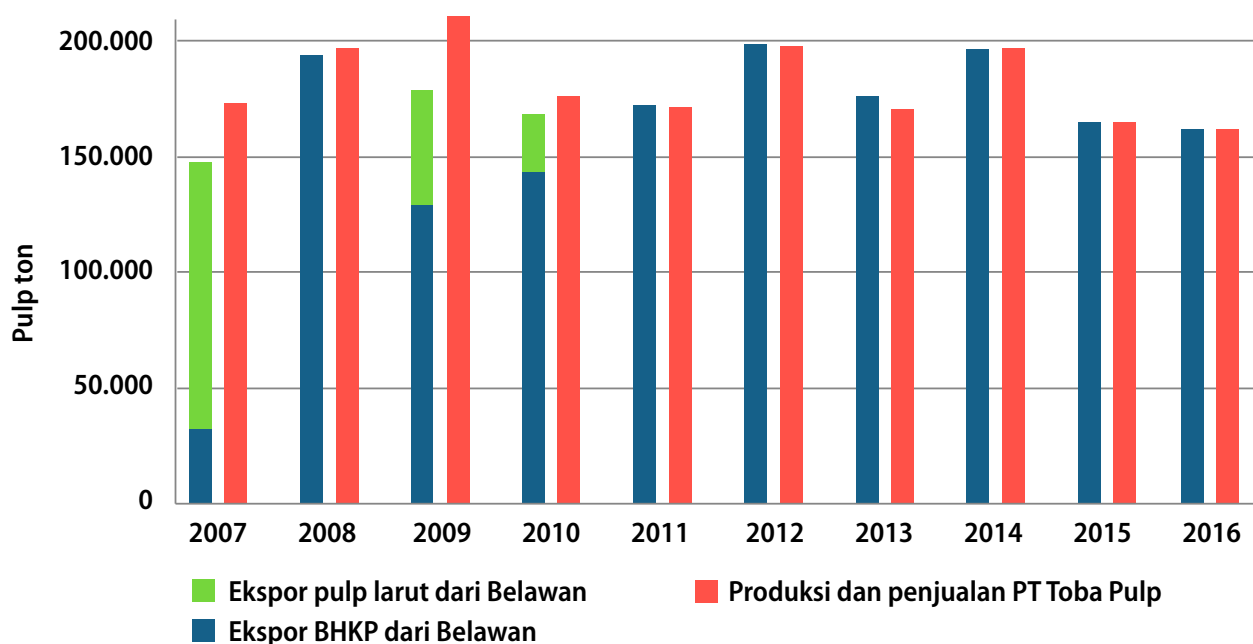
7. Ekspor pulp dari Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara

Menurut data BPS, ekspor pulp larut dari Indonesia ke Tiongkok pada 2007, 2009, dan 2010 hanya melalui Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Pelabuhan Belawan adalah pelabuhan laut terdekat pabrik TPL yang berada di provinsi yang sama, sehingga menjadi sarana paling tepat bagi perusahaan mengapalkan ekspornya ke pembeli di luar negeri. Sebagaimana telah disebut di atas, TPL adalah satu-satunya produsen pulp larut di Indonesia sebelum 2016.

Menariknya, data ekspor pulp dari Belawan, sebagaimana data perdagangan resmi Indonesia, mengindikasikan kesamaan dengan data volume yang dilaporkan TPL, baik yang diproduksi ataupun dijual. Pada 2008 dan sepanjang 2011–2016, tahun ketika data BPS tidak mencatat atau hanya sejumlah relatif kecil ekspor pulp larut Indonesia, volume pulp kelas-kertas yang dikapalkan dari Belawan mirip dengan volume keseluruhan pulp yang diproduksi atau dijual TPL, sebagaimana laporannya kepada para

⁴⁹ Hingga 15 Juni 2015, PT Toba Pulp Lestari menerbitkan pengumuman seperti ini setidaknya pada 3 Maret 2017, 18 Juli 2017, 10 Mei 2018, 4 Juli 2018, 20 Februari 2019, dan 24 April 2019. Pada pengumuman pertama disebutkan bahwa pengumuman tersebut menyesuaikan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 16 Desember 2015.

Gambar 5. Perbandingan antara pulp yang diekspor dari Pelabuhan Belawan dan volume penjualan pulp PT Toba Pulp Lestari dari tahun 2007–2016



Sumber: BPS untuk ekspor BHKP dan pulp larut dari Pelabuhan Belawan; Laporan tahunan PT Toba Pulp Lestari Tbk untuk produksi dan penjualan TPL. Catatan: Data PT Toba Pulp Lestari disajikan sebagai volume produksi yang dilaporkan untuk tahun 2007–2010 dan sebagai volume penjualan yang dilaporkan untuk tahun 2011–2016. PT Toba Pulp Lestari tidak melaporkan volume penjualan dalam laporan tahunannya sebelum tahun 2011, sehingga volume produksi digunakan untuk mewakili penjualan selama tahun 2007–2010.

pemegang saham (lihat Gambar 5). Pun, pada 2007, 2009 dan 2010, tahun ketika BPS mencatat adanya ekspor pulp larut dari Indonesia, gabungan volume pulp kelas-kertas dan pulp larut yang dikapalkan dari Belawan agak mirip dengan volume pulp yang diproduksi atau dijual menurut laporan TPL. Patut dicatat bahwa, sebagaimana telah disebut di atas, laporan tahunan TPL sepanjang 2007–2016 tidak merinci volume pulp kelas-kertas dan pulp larut yang diproduksi atau dijualnya.

Kesamaan tersebut mengisyaratkan bahwa hampir semua ekspor pulp TPL pada 2007–2016 dikapalkan dari Belawan, dan sebagian besarnya diklasifikasi sebagai pulp kelas-kertas. Kesimpulan ini diperkuat oleh data pengapalan pada 2010–2016 yang diperoleh dari penyedia data perdagangan komersial. Data pengapalan tersebut, yang tampaknya diolah berdasar data yang dikompilasi otoritas kepabeanan Indonesia, mengindikasikan bahwa TPL adalah satu-satunya eksportir pulp *grade* apapun dari Pelabuhan Belawan sepanjang 2010–2016.

Lebih jauh, pada sebagian besar pengapalan ini, produk yang diekspor tersebut diutarakan sebagai “Toba Pulp BHKP” atau “Toba Cell Eucalyptus Pulp”, yang keduanya dikelompokkan pada kode *Harmonized System* (HS) 470329 (lihat Gambar 6). Pada sistem standar internasional *Harmonized System* (HS), kode HS 470329 dijelaskan sebagai *Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades – non-coniferous* (pulp kimiawi, soda atau sulfat, selain kelas-larut – bukan-kayu-daun-jarum), dan kode HS inilah yang dipakai sebagai klasifikasi BHKP, satu jenis utama pulp kelas-kertas, pada perdagangan internasional.⁵⁰ Sebagai

50 Menurut the UN Trade Statistic Database, “*Harmonized System* (HS) merupakan satu sistem nomenklatur internasional untuk mengklasifikasi suatu produk. Sistem ini memungkinkan negara terkait mengklasifikasi barang-barang perdagangan sesuai dengan keperluan kepabeanannya. Di tingkat internasional, HS berkode enam digit dipakai sebagai klasifikasi barang.” (<https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Description-and-Coding-Systems-HS>).

perbandingan, kode HS 470200 dijelaskan sebagai *Chemical wood pulp, dissolving grades* (pulp kimiawi, kelas-larut), yang dipakai sebagai klasifikasi pulp larut (*Dissolving pulp – DP*) (lihat Gambar 7). Penjelasan Harmonized System dan kode HS tersebut disajikan pada Kotak 2.

Gambar 6. Contoh catatan ekspor pengiriman Toba Pulp ke DP Macao yang diklasifikasikan sebagai Kode HS 470329 dengan deskripsi “Toba Cell Eucalyptus Pulp”

EKSPORTIR

NPWP

:

012197950054000

PROPINSI

:

Sumatera Utara

NAMA EKSPORTIR

:

PT TOBA PULP LESTARI TBK

KABUPATEN/KOTA

:

Kota Medan

ALAMAT EKSPORTIR

:

UNIPAZA, EAST TOWER 6TH FLOOR, JL. LETJEND HARYONO MT NO. A-1 MEDAN 20231

NO. ETPK

:

02.ET-01.13.0001

IMPORTIR

NAMA IMPORTIR

:

DP MARKETING INTERNATIONAL MACAO COMMERCIAL OFFSHORE LIMITED

PELABUHAN MUAT

:

Belawan

ALAMAT IMPORTIR

:

MACAU 10TH FLOOR UNIT K1, FINANCE AND IT CENTRE OF MACAU BUILDING, NAN VAN LAKE, QUARTEIRAO 5, LOTE A, MACAU

PELABUHAN BONGKAR

:

Jinjiang

NEGARA IMPORTIR

:

CHINA

NEGARA TUJUAN

:

CHINA

DATA V-LEGAL

NO. INVOICE

:

E152356

KETERANGAN

:

SKEMA KERJASAMA

:

FLEGT

PEJABAT TTD

:

ANJAR GUNTORO S.HUT

NO. V-LEGAL

:

15.00001-00508.010-ID-CN

TEMPAT TTD

:

BOGOR

TGL. AKHIR

:

2016-04-28

TGL. TTD

:

2015-12-30

TRANSPORTASI

:

BY SEA

DIGITAL SIGN

:

Yes

TGL. INVOICE

:

2015-12-23

LOKASI STUFFING

:

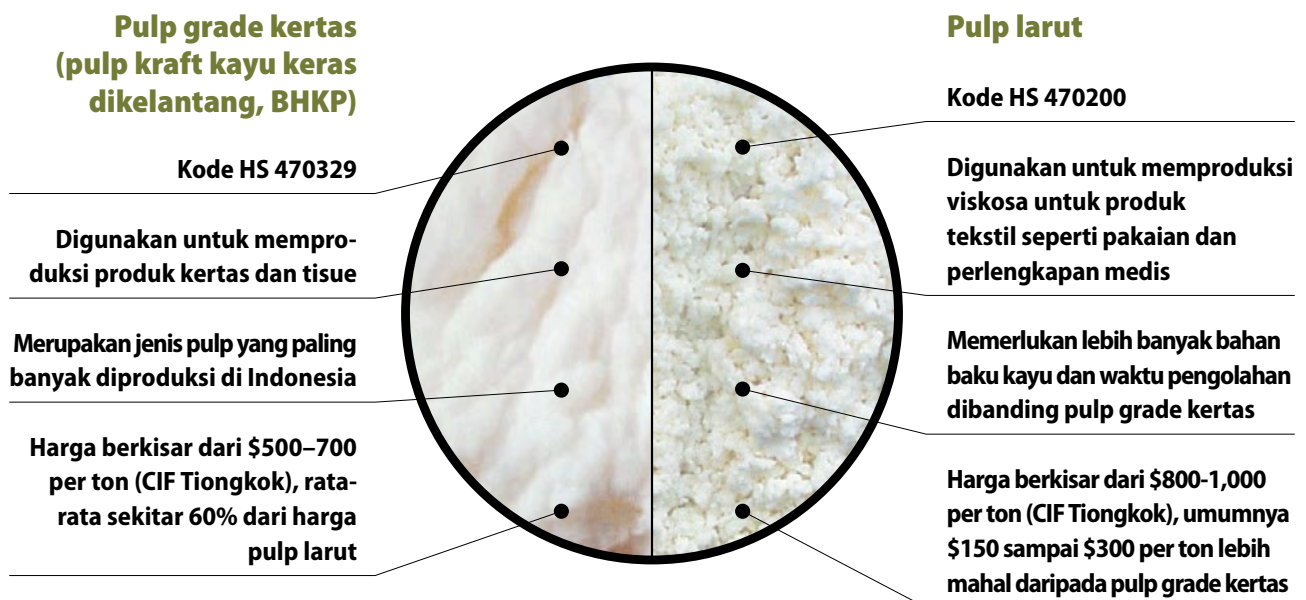
BELAWAN

DETAIL

NO.	HS NUMBER	HS PRINTED	DESKRIPSI	VOLUME (M3)	BERAT BERSIH (KG)	NUMBER OF UNIT	VALUE	CURRENCY	SCIENTIFIC NAMES	HARVEST COUNTRY ID
1.	4703290000	4703290000	TOBA CELL EUCALYPTUS PULP	551,52	513.208	300	259.170,04	USD	Ekalipthus (Eucalyptus sp.)	

Sumber: Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah Indonesia. <http://silk.dephut.go.id/>.

Gambar 7. Perbandingan antara pulp kelas-kertas (BHKP) dan pulp larut



Kotak 2: Perihal Harmonized System (HS) dan Kode HS

Harmonized System (HS) adalah bentuk penyingkatan terhadap *Harmonized Commodity Description and Coding System*. Sistem ini merupakan “satu bahasa ekonomi dan kode barang secara universal” yang dikembangkan dan dikelola the World Customs Organization, demikian keterangan pada situs web organisasi tersebut. Harmonized System mencakup sekitar 5.000 kelompok komoditas, yang masing-masing diidentifikasi oleh enam-angka kode HS.

Lebih dari 200 negara, termasuk Indonesia dan Tiongkok, menggunakan Harmonized System “sebagai dasar penentuan tarif kepabeanan dan pengelompokan statistik perdagangan internasionalnya.” Pemerintah, lembaga internasional, dan perusahaan memakai Harmonized System sekaligus untuk tujuan lainnya, termasuk “perpajakan, kebijakan dagang, pemantauan barang yang diatur, ketentuan asal barang, tarif pengangkutan, statistik transportasi, pemantauan harga, pengendalian kuota, kompilasi akuntansi nasional, serta analisis dan penelitian ekonomi.” Negara-negara tertentu dimungkinkan memperluas Kode HS enam-angka yang seragam secara internasional menjadi delapan- atau sepuluh-angka Kode HS, dengan tambahan angka tersebut menjelaskan komoditas lebih rinci demi keperluan dalam negerinya. Terhadap negara yang menggunakan Kode HS delapan- atau sepuluh-angka, enam-angka pertama mengikuti aturan kode the World Customs Organization tersebut.

Bab 47 Sistem Harmonisasi berjudul “Pulp dari kayu atau dari bahan selulosa berserat lainnya; kertas atau kertas karton daur ulang”, dan terdapat 21 kode HS enam-angka di bawahnya. Judul 4703 diberi label “Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.” Di bawah judul tersebut, kode HS 4703.29 diberi label “Semi kelantang atau dikelantang, bukan konifer.” Kode HS 4703.29 menjadi klasifikasi untuk sebagian besar pulp yang diekspor dari Indonesia yang disebut Kraft Pulp Kayu Dikelantang (BHKP), Kraft Pulp Akasia Dikelantang, dan/atau Kraft Pulp Ekaliptus Dikelantang. Judul 4702, dan satu-satunya kode HS di bawahnya, yaitu 4702.00, diberi label “Pulp kayu kimia, dissolving grade.”⁵¹

Baik Indonesia maupun Tiongkok merupakan anggota World Customs Organization,⁵² dan kedua negara ini tampak menggunakan definisi kode HS 470329 dan 470200 yang serupa, untuk tidak mengatakan identik, dengan World Customs Organization (lihat Tabel 1).

51 Catatan tunggal untuk Bab 47 menjelaskan judul dan kode HS ini sebagai berikut: “Untuk tujuan judul 47.02, maka istilah ‘pulp kayu kimia, dissolving grade’ berarti pulp kayu kimia yang dari total beratnya mempunyai fraksi tak larut sebesar 92% atau lebih untuk soda maupun pulp sulfat kayu, atau 88% atau lebih untuk pulp sulfit kayu setelah satu jam dalam larutan soda api yang mengandung 18% natrium hidroksida (NaOH) pada suhu 20°C, dan untuk pulp sulfit kayu mempunyai kandungan abu yang tidak melebihi 0,15% dari total beratnya.”

52 World Customs Organization. 2019. “List of Members with Membership Date.” August 19, 2019. <http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf>.

Tabel 1. Definisi Kode HS 470329 dan 470200

	Kode HS 470329	Kode HS 470200
World Customs Organization	4703.29: Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades. Semi-bleached or bleached, Non-coniferous	4702.00: Chemical wood pulp, dissolving grades
Indonesia	4703.29.00.00: Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade. Semi kelantang atau dikelantang, Pohon selain jenis konifera.	4702.00.00.00: Pulp kayu kimia, dissolving grade.
China	4703 2900 00: Chemical wood pulp, soda or sulphate, semi-bleached and bleached, non-coniferous, other than dissolving grades	4702 0000 01: Chemical wood pulp, dissolving grades, for the production of viscose fibre (excluding acetate fiber)...*
		4702 0000 90: Other chemical wood pulp, dissolving grades

Sumber: World Customs Organization. 2020. "HS Nomenclature."; Kementerian Perdagangan, "Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Kententuan Ekspor Produk Industri Kehutanan," 22 December 2016, <http://silk.depht.go.id/app/Upload/hukum/20170228/54663a489f92d767098cbe2eb0df4eb7.pdf>, diakses 10 Oktober 2020; ETCN. 2020. "China HS Code Search." <https://hs.e-to-china.com/ks-470200.html>.

* Definisi kode HS tingkat Tarif ini mencakup rincian teknis berikut: "Pulp viscosity ≥ 3.7 dl/g, and < 6.4 dl/g, or ≥ 350 ml/g, and < 700 ml/g, a cellulose content (r18, sulfate) $\geq 88\%$, and $< 95.5\%$, or a cellulose content (r18, sulfate) $\geq 87\%$, and $< 94\%$."

8. Korelasi statistik ekspor "Toba Cell Eucalyptus Pulp" dengan impor pulp larut Tiongkok dari Indonesia

Ekspor TPL yang dijelaskan sebagai "Toba Cell Eucalyptus Pulp" dari Belawan, Sumatera Utara berkorelasi erat dengan impor pulp larut Tiongkok dari Indonesia untuk sebagian besar periode 2010–2016. Gambar 8 menyajikan jumlah ekspor bulanan TPL yang dicatat sebagai "Toba Cell Eucalyptus Pulp" dibandingkan dengan rerata dua-bulanan transaksi berjalan impor pulp larut Tiongkok dari Indonesia pada April 2010 hingga Desember 2016.

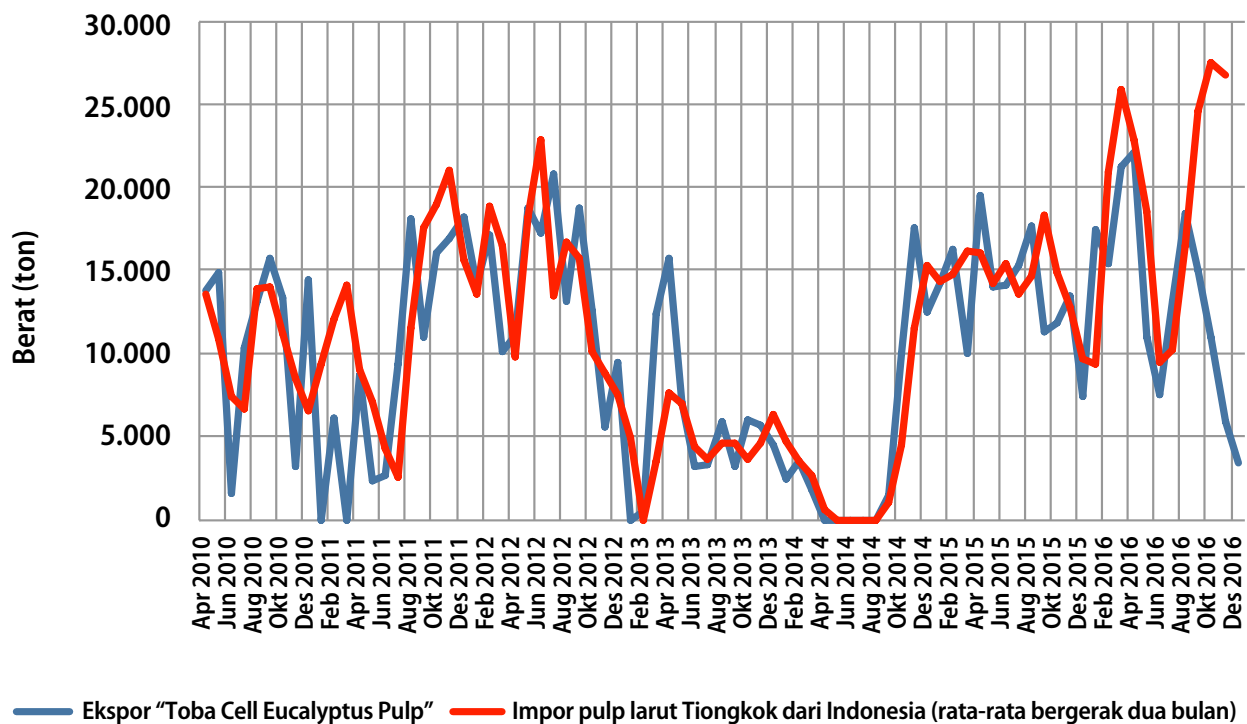
Kedua *dataset* yang disajikan pada Gambar 8 bersumber dari otoritas kepabeanan kedua negara bertransaksi, Indonesia dan Tiongkok, yang masing-masing diperoleh melalui penyedia data perdagangan. Masing-masing *dataset* ini disebutkan sebagai produk yang tidak sama, yakni ekspor pulp kelas-kertas TPL yang disebut dengan "Toba Cell Eucalyptus Pulp", dan impor pulp larut Tiongkok. Keduanya juga memakai Kode HS yang tidak sama, yakni Kode HS 470329 untuk ekspor TPL dan Kode HS 470200 untuk impor pulp larut Tiongkok.

Pada kondisi demikian, apabila data tersebut mencerminkan produk yang didagangkan (dan dilaporkan) secara akurat, dapat dianggap masing-masing *dataset* bersifat independen terhadap yang lain – maka akan memiliki rerata yang berbeda, memperlihatkan tingkat varians yang berbeda, dan menunjukkan tren yang berbeda pula.

Namun, ternyata analisis statistik mengindikasikan bahwa sifat kedua *dataset* tersebut jauh dari independen satu sama lain pada periode April 2010 hingga September 2016.⁵³ Dengan tingkat kepercayaan tinggi, data ini memperlihatkan bahwa ekspor TPL yang disebut dengan "Toba Cell Eucalyptus Pulp" (HS 470329) selama periode ini secara statistik mencerminkan kecenderungan impor pulp larut Tiongkok

53 Sebagaimana terlihat pada Gambar 8, korelasi kuat antara kedua dataset berakhir pada triwulan keempat tahun 2016. Pada waktu itu, APRIL Grup mulai menonjol sebagai produsen pulp larut yang kedua di Indonesia dan mulai mengekspor pulp larut dalam volume besar ke Tiongkok. Hal tersebut menjelaskan mengapa impor pulp larut Tiongkok dari Indonesia terlihat meningkat tajam selama bulan Oktober-Desember 2016, sedangkan ekspor "Toba Cell Eucalyptus Pulp" dari PT Toba Pulp menurun.

Gambar 8. Ekspor “Toba Cell Eucalyptus Pulp” (HS 470329) dari PT Toba Pulp Lestari, dan impor pulp larut (HS 470200) Tiongkok dari Indonesia, April 2010 – Desember 2016



Sumber: Penyedia data perdagangan ekspor tingkat pengiriman Indonesia untuk BHPK dan impor Tiongkok untuk pulp larut.

dari Indonesia (HS 470200) – dan hubungan ini berlangsung, dengan pengecualian yang sangat sedikit, selama enam setengah tahun yang dianalisa.⁵⁴

Lebih spesifik, data tersebut memperlihatkan bahwa ekspor TPL yang disebut dengan “Toba Cell Eucalyptus Pulp” (HS 470329) merupakan indikator utama perubahan kecenderungan impor pulp larut Tiongkok (HS 470200). Pada kebanyakan kejadian selama April 2010 sampai September 2016, ketika pada bulan sebelumnya ekspor TPL yang disebut dengan “Toba Cell Eucalyptus Pulp” berubah dari peningkatan atau penurunan (atau sebaliknya), impor pulp larut Tiongkok akan menunjukkan kemiripan perubahan dari peningkatan atau penurunan (atau sebaliknya) dengan besaran yang kurang lebih sama. Korelasi statistik antara kedua dataset ini menunjukkan tingkat probabilitas tinggi bahwa sebagian besar ekspor TPL ke Tiongkok dilaporkan sebagai pulp kelas-kertas pada pencatatan ekspor Indonesia dan dilaporkan sebagai pulp larut dalam pencatatan impor Tiongkok.

Korelasi statistik yang erat tersebut lebih jauh didukung oleh banyaknya kesamaan angka antara volume ekspor (Indonesia) dengan volume impor (Tiongkok). Sepanjang 2010–2016, setidaknya 78 pengapalan pulp dari Indonesia (ke Tiongkok) TPL berkode HS 470329 yang kilogram-banding-kilogram sama persis dengan pencatatan impor Tiongkok (dari Indonesia) berkode HS 470200. (Detil-detil contoh kiriman tersebut disajikan di Tabel 4, di bawah ini). Pun, puluhan kasus tambahan telah diidentifikasi yang mana penjumlahan volume beberapa pengapalan berkode HS 470329 secara keseluruhan persis sama dengan volume satu pengapalan besar impor Tiongkok dari Indonesia berkode HS 470200.

54 Data ini mengindikasikan satu pengecualian pada kecenderungan pada paruh pertama tahun 2013 waktu, ekspor dari Pelabuhan Belawan meningkat pada saat impor di Tiongkok menurun. Data ekspor menunjukkan dua kiriman pada bulan Maret dan April 2013, masing-masing sebesar 5 dan 8 juta ton, di mana pelaporannya barangkali tidak akurat sehingga menyesatkan perbandingan ekspor/impor. Sepertinya kiriman 5 dan 8 juta ton tersebut merupakan anomali karena angkanya bulat, berbeda dengan ratusan kiriman lainnya, dan karena jauh lebih besar daripada semua kiriman lainnya.

Pendalaman kasus demi kasus, impor berlabuh di Tiongkok pada kurun tiga bulan setelah ekspor dipaparkan dari Indonesia. Menimbang massa setiap pengiriman mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan kilogram, probabilitas adanya kesamaan pada lebih dari 150 pengapalan yang sama persis volumenya atau penggabungannya semestinyalah sangat kecil. Kesamaan pengapalan ekspor dan impor ini menguatkan dugaan bahwa, berdasar catatan perdagangan, ekspor dari Indonesia yang tercatat sebagai satu kode HS tampaknya diimpor dengan kode HS yang berbeda oleh Tiongkok.

Meski begitu, pada Februari 2020, menanggapi tuduhan IndonesiaLeaks mengenai manipulasi dokumentasi ekspor sejak 2007 sampai 2016, TPL menyatakan, “Kegiatan ekspor produk yang dilakukan oleh Perseroan berikut pencatatan HS Code tersebut telah sesuai dengan klasifikasi produk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Tanggapan disajikan secara lengkap pada Lampiran A.)

Jadi, apa sebenarnya jenis pulp yang oleh TPL disebut dengan “Toba Cell Eucalyptus Pulp” (HS 47032900) pada ekspornya dari Indonesia: pulp kelas-kertas atautkah pulp larut? Untuk memastikannya – dan mengapa hal itu penting – pengaturan pemasaran TPL perlu dikaji. Sebagaimana diuraikan di bawah, pengaturan ini melibatkan produk TPL yang diekspor ke perusahaan pemasaran berelasi yang berbasis di yurisdiksi surga pajak Makau, sebelum kemudian dijual ke produsen rayon, pabrik *viscose staple fiber* (VSF), dan pedagang pulp, yang umumnya berada di Tiongkok.

9. Peran DP Macao memasarkan produk PT Toba Pulp Lestari ke pembeli internasional

Melalui laporan keuangannya pada 2007–2016, terlihat bahwa sebagian besar penjualan TPL ke pembeli internasionalnya pada periode tersebut, yakni sejumlah US\$ 811,3 juta, dilakukan melalui perusahaan penjualan dan pemasaran afliasinya yang berbasis di Makau, yaitu DP Marketing International Limited (MCO) atau selanjutnya disebut DP Macao⁵⁵ (lihat Gambar 9). DP Macao tampak berperan sebagai agen penjualan dan pemasaran tunggal ekspor TPL.

Hubungan TPL dengan DP Macao (yang eksis hingga akhir 2010) terlihat dalam prospektus yang dirilis Sateri Holdings Limited (selanjutnya disebut Sateri), sebuah perseroan terbatas di Bermuda, pada November 2010, saat Sateri terdaftar di Bursa Efek Hong Kong. Prospektus tersebut menyebut bahwa sampai September 2010, DP Macao adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Sateri; dan bahwa Sateri dan PT Toba Pulp Lestari merupakan pihak berelasi, yang keduanya dikendalikan oleh pemilik manfaat yang sama, yaitu Sukanto Tanoto dan anggota tertentu dari keluarganya (lihat Gambar 9).⁵⁶ Lebih jauh, prospektus itu juga menyebut bahwa Sateri melepas kepemilikan terhadap DP Macao pada September 2010, persis sebelum penawaran publik perusahaan induknya, dengan menjualnya kepada Blue Dot Resources Ltd., sebuah perseroan terbatas di British Virgin Islands (BVI) yang juga dikendalikan oleh pemegang saham pengendali grup.⁵⁷

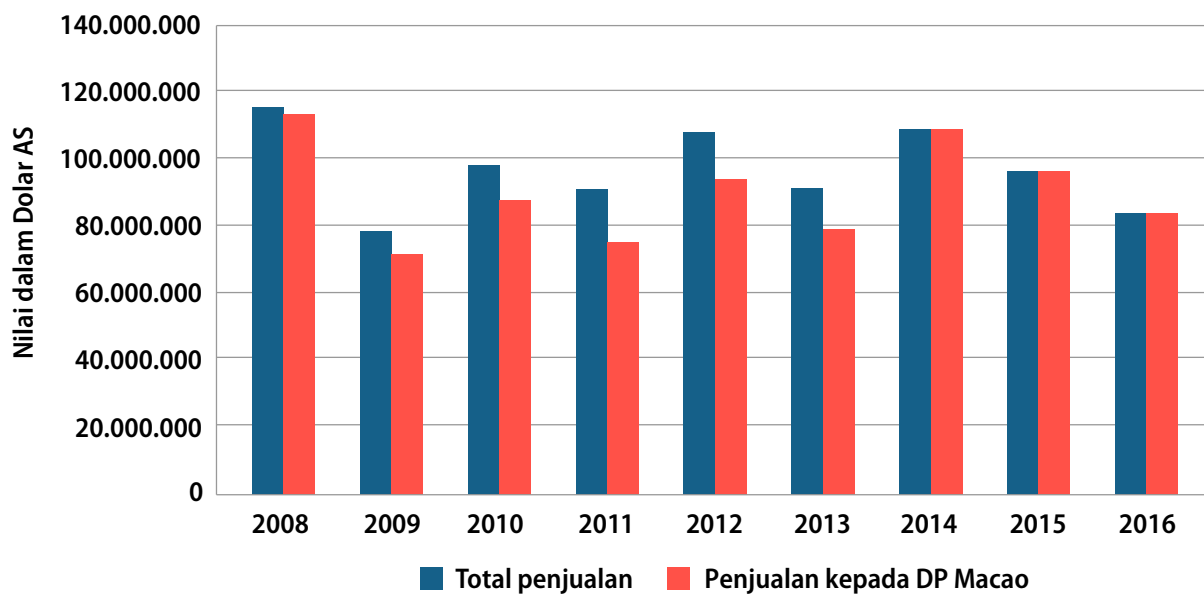
Sejak pendaftaran Sateri di bursa pada 2010, Sukanto Tanoto tetap tercatat sebagai pemilik saham pengendali TPL, DP Macao, dan pabrik Sateri di Tiongkok, meski struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan ini mengalami perubahan seiring berjalannya waktu (lihat Gambar 9). Seperti disebutkan

55 Prospektus pendaftaran Sateri dari tahun 2010 menyampaikan nama lengkap DP Macao sebagai DP Marketing International Limited – Macao Commercial Offshore, dan menyatakan bahwa badan usaha tersebut merupakan perseroan terbatas yang terdaftar di Makao pada bulan Februari 2007 (Sateri 2010).

56 Sateri Holdings Limited, “Global Offering” (“Penawaran Global”), Bursa Efek Hong Kong, 26 November 2010, <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2010/1126/lt20101126025.pdf>, diakses 30 April 2020.

57 Sateri Holdings Limited 2010, *Op. cit.*

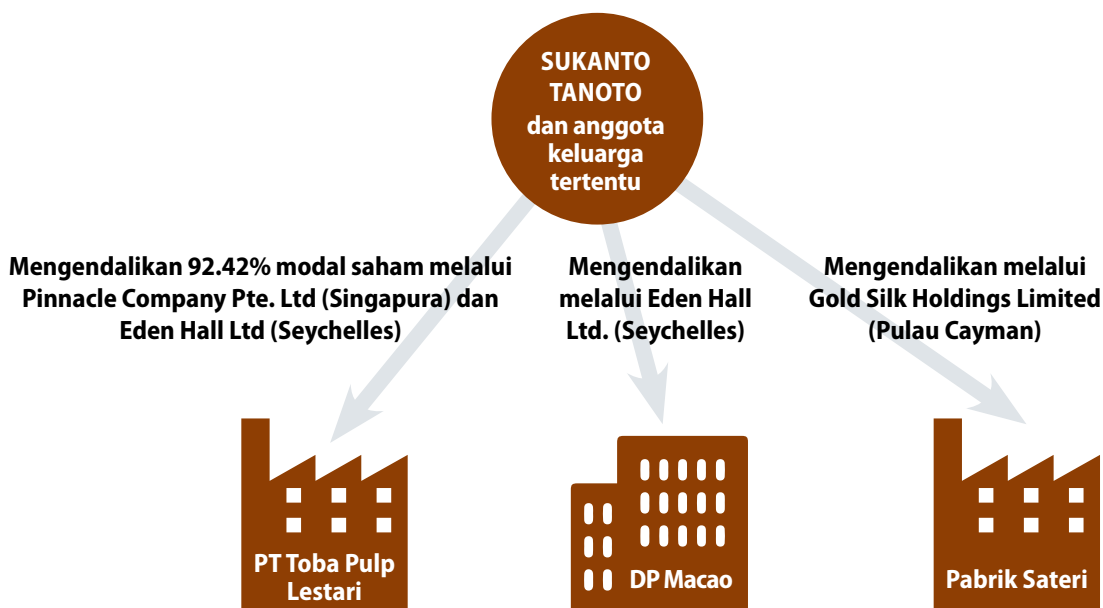
Gambar 9. Total nilai penjualan dari PT Toba Pulp Lestari dan nilai penjualan kepada DP Macao, 2008–2016



Sumber: Laporan tahunan PT Toba Pulp Lestari Tbk, 2008–2016.

Catatan: PT Toba Pulp Lestari mengumumkan penjualan kepada DP Macao sebagai “penjualan pihak terkait” dalam laporan tahunannya.

Gambar 10. Sukanto Tanoto sebagai pemegang saham kendali di PT Toba Pulp Lestari, DP Macao, dan Sateri



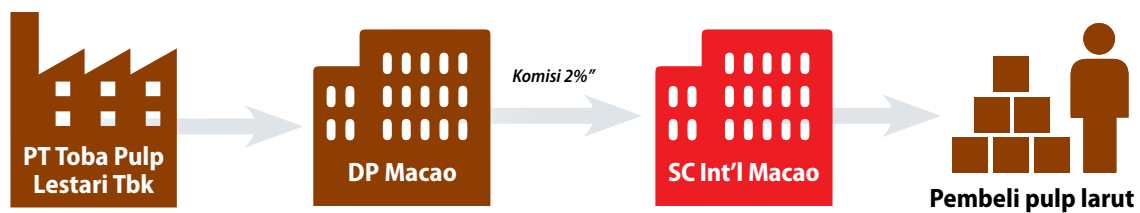
Sumber: “Profil Perusahaan PT Toba Pulp Lestari Tbk” dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 Februari 2020; PT Toba Pulp Lestari Tbk pernyataan publik tentang transaksi material dan transaksi afiliasi tertanggal 22 November 2017; Bracell Limited pengajuan privatisasi dan penarikan pendaftaran tertanggal 30 Agustus 2016; surat edaran Sateri Holdings Limited tertanggal 19 November 2014. (Informasi lebih lanjut mengenai kepemilikan Sukanto Tanoto atas perusahaan ini disajikan pada Lampiran D.)

Gambar 11. Hubungan dagang antara PT Toba Pulp Lestari Tbk, DP Macao, SC International Macao (setelah bulan September 2010), dan pembeli pulp larut

Desember 2007– September 2010



Oktober 2010–2014



Sumber: Prospektus Listing Sateri, 2010; Laporan Tahunan Sateri untuk tahun 2011 dan 2012.

sebelumnya, koalisi organisasi yang menerbitkan laporan ini tidak sedang menyatakan bahwa Sukanto Tanoto atau anggota keluarganya secara pribadi mengarahkan skema atau praktik yang melanggar hukum. (Informasi lebih rinci kepemilikan Sukanto Tanoto terhadap perusahaan-perusahaan ini disajikan pada Lampiran D.)

Sejak akhir 2007, DP Macao berperan sebagai agen pemasaran utama penjualan pulp TPL kepada pembeli internasional. Sebelum dilepas Sateri, DP Macao tercatat membeli pulp kelas-kertas (BHKP) dan pulp larut dari TPL, dan kemudian menjualnya kepada konsumen Sateri di pasar internasional, terutama di Tiongkok.⁵⁸ DP Macao tercatat menjual produk-produk ini ke pembeli pihak ketiga dan juga kepada anak perusahaan dan perusahaan afiliasi Sateri, termasuk Sateri Jiangxi, yang mengoperasikan pabrik VSF di Tiongkok (lihat Gambar 11). Prospektus Sateri pada 2010 tersebut meringkas relasi ini sebagai berikut:

Bermula pada Desember 2007, DP Macao pada prinsipnya terlibat dalam aktivitas perdagangan berkaitan dengan perdagangan internasional pulp kertas dan pulp larut terutama yang dipasok TPL [PT Toba Pulp Lestari], sedemikian sehingga setiap penjualan pulp larut TPL [PT Toba Pulp Lestari] kepada pembeli, termasuk Sateri Jiangxi, dilakukan melalui kontrak dan alokasi DP Macao.⁵⁹

Setelah dilepaskan Sateri pada September 2010, DP Macao tetap berperan sebagai agen tunggal pemasaran penjualan pulp TPL kepada pembeli internasional. Aktivitas ini, sebagai entitas di luar Sateri, diatur dengan kesepakatan berikut:

Pertama, berdasarkan Akte Non-Kompetisi (*Non-Competition Deed*) yang ditandatangani pemilik saham pengendali Sateri dengan pemilik saham pengendali Pinnacle (pengendali TPL) pada 19 November 2010, disepakati bahwa (a) sejauh diperbolehkan peraturan perundangan Indonesia, termasuk aturan pasar

58 Sateri Holdings Limited 2010, *Op. cit.*

59 Sateri Holdings Limited. 2010, *Op. cit.*

modal . . . TPL [PT Toba Pulp Lestari] akan tetap menjual seluruh pulp larutnya ke internasional melalui DP Macao . . .”; dan “(b) . . . DP Macao akan membeli seluruh pulp larut TPL [PT Toba Pulp Lestari] yang dijual ke luar Indonesia, dan akan menjualnya sesuai Kontrak Keagenan (the Agency Agreement)” (lihat di bawah).⁶⁰

Kedua, berdasarkan Kontrak Keagenan (*the Agency Agreement*) yang berlaku sejak 3 November 2010, DP Macao setuju menjual pulp larut yang dibelinya dari TPL melalui SC International Macao, satu anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Sateri, dengan komisi tetap sebesar 2% dari nilai penjualan. Persyaratan kontrak ini diringkas dalam prospektus Sateri pada 2010 sebagai berikut:

Sesuai Kontrak Keagenan, SC International Macao bertindak sebagai agen DP Macao di luar Indonesia dengan hak penawaran pertama penjualan pulp larut TPL yang diperoleh DP Macao. DP Macao membayar komisi per tiga bulan kepada SC International Macao sebesar 2% dari penerimaan aktual penjualan pulp larut oleh SC International Macao. Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan Kontrak Keagenan akan ditanggung sendiri oleh SC International Macao.⁶¹

Kontrak Keagenan ini berlaku efektif hingga 31 Desember 2012, sebagaimana pengaturan pemasaran ini terlihat dalam laporan tahunan 2012 dan 2013 Sateri.⁶² Arsip mengenai privatisasi pabrik VSF milik Sateri Holdings Limited di Tiongkok berikut pergantian namanya menjadi Bracell Limited mengindikasikan bahwa Kontrak Keagenan tersebut berakhir pada 2014.⁶³

Ketiga, berdasarkan Kesepakatan Kerangka Penjualan (*Sales Framework Agreement*) yang berlaku sejak 3 November 2010, DP Macao sepakat bahwa seluruh penjualan pulp larut produksi TPL ke Sateri Jiangxi dan Sateri Fujian akan diperlakukan sesuai kerangka bisnis biasa. Prospektus Sateri 2010 meringkas kesepakatan tersebut sebagai berikut:

Kesepakatan Kerangka Penjualan ini mengatur seluruh penjualan pulp larut DP Macao ke Sateri Jiangxi dan Sateri Fujian. Pengaturan ini menetapkan transaksi penjualan pulp larut antara DP Macao dengan Sateri Jiangxi dan Sateri Fujian mengikuti kerangka bisnis biasa dan pada tingkat harga yang tidak melebihi harga pasar spot saat transaksi, sebagaimana lazimnya kontrak antar-pihak yang tidak saling berelasi perihal kuantitas dan kualitas pulp larut sejenis.⁶⁴

Kesepakatan Kerangka Penjualan ini berlaku efektif hingga 31 Desember 2012, yang diperpanjang untuk tiga tahun berikutnya oleh parapihak hingga 31 Desember 2015.

Secara keseluruhan, Akte Non Kompetisi, Kontrak Keagenan dan Kesepakatan Kerangka Penjualan tersebut di atas menunjukkan bahwa sepanjang November 2010 hingga November 2014: (1) TPL terikat kontrak untuk menjual pulpnya ke DP Macao; (2) DP Macao terikat kontrak untuk menjual pulp yang dibelinya dari TPL melalui SC International Macao dengan komisi tetap sebesar 2%; dan (3) DP Macao menyepakati seluruh penjualan ke pabrik VSF milik Sateri di Tiongkok, yakni Sateri Jiangxi dan Sateri Fujian mengikuti persyaratan bisnis biasa. Sebagaimana terungkap dalam prospektus tahun 2010, semua

60 Sateri Holdings Limited, 2010, *Op. cit.*

61 Sateri Holdings Limited, 2010, *Op. cit.*

62 Sateri Holdings Limited, Laporan Tahunan 2012, Hong Kong, 2013, <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/0411/lt20130411190.pdf>, diakses 30 April 2020; Sateri Holdings Limited, Laporan Tahunan 2013, Hong Kong, 2014, <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/0410/lt20140410829.pdf>, diakses 30 April 2020.

63 Sateri Holdings Limited, “(1) Major Transaction and Related Transaction in Relation to the Disposal of the Viscose Staple Fiber Business in the PRC . . .” [(1) Transaksi Besar dan Transaksi Terkait Berkaitan Dengan Pelepasan Usaha Viscose Staple Fiber di Republik Rakyat Tiongkok . . .], Edaran, Hong Kong, 19 November 2014, <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/1029/lt20141029952.pdf>, diakses 20 April 2020.

64 Sateri Holdings Limited, 2010, *Op. cit.*

entitas tersebut – PT Toba Pulp, DP Macao, SC International Macao, dan pabrik Sateri – dikendalikan oleh pemilik saham pengendali yang sama, Sukanto Tanoto dan anggota tertentu dari keluarganya.⁶⁵

Menanggapi “Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa” dari Bursa Efek Indonesia yang menyusul diterbitkannya artikel berita di Majalah Tempo pada bulan Februari 2020, PT Toba Pulp menjelaskan mengapa tidak menjual pulp secara langsung kepada pabrik VSF di Tiongkok, melainkan melalui DP Macao: “Bahwa Perseroan[Toba Pulp] menjual kepada DP Marketing International Limited karena DP Marketing International Limited lebih menguasai pangsa pasar (*market shares*).”⁶⁶

10. Bauran produk PT Toba Pulp Lestari berdasarkan data penjualan DP Macao

Selama sepuluh tahun, 2007–2016, laporan tahunan TPL tidak menjelaskan jenis pulp yang diproduksi ataupun dijualnya, baik pulp kelas-kertas maupun pulp larut. Namun demikian, prospektus Sateri pada 2010 menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit yang merangkum penjualan pulp DP Macao yang dibeli dari TPL pada 2008 dan 2009, dan enam bulan pertama, hingga 30 Juni 2010. Data-data penjualan tersebut dipilah sesuai jenis pulp.

Sepanjang 30 bulan tersebut, menurut prospektus Sateri, DP Macao menjual 160.500 ton pulp larut kepada pembeli eksternal dan perusahaan afiliasinya sehingga mendatangkan penerimaan sebesar US\$ 181,2 juta atau setara (lihat Tabel 2). Pada rentang waktu yang sama, DP Macao juga menjual 306.069 ton pulp kelas-kertas dengan pendapatan sebesar US\$ 166,4 juta.

Tabel 2. Penjualan pulp larut oleh DP Macao selama tahun 2008, 2009, dan Januari–Juni 2010

Tahun	Penjualan Eksternal		Penjualan Antar Perusahaan		Total Penjualan	
	Volume (ton)	Nilai (US\$ x 1000)	Volume (ton)	Nilai (US\$ x 1000)	Volume (ton)	Nilai (US\$ x 1000)
2008	52.087	55.262	3.175	1.800	55.262	57.062
2009	43.899	42.528	6.040	4.300	49.939	46.828
Jan–Juni 2010	53.265	74.227	2.034	3.100	55.299	77.327
Total	149.251	172.017	11.249	9.200	160.500	181.217

Sumber: Sateri Holdings Limited. 2010. “Sateri Holdings Limited Global Offering.” Prospektus perusahaan. Hong Kong. 26 November 2010.

Data prospektus Sateri tersebut berbeda jauh dengan catatan perdagangan resmi Indonesia. Prospektus Sateri menyebut DP Macao membeli 160.500 ton pulp larut dari TPL selama 30 bulan tersebut (Januari 2008–Juni 2010), lebih dari dua kali lipat pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendokumentasikan ekspor pulp larut sebesar 76.146 ton sepanjang 2008–2010, bahkan dengan durasi 6 bulan lebih panjang.

Ketimpangan data volume pulp larut yang diungkap Sateri dengan pencatatan BPS tersebut paling menonjol pada 2008, yang mana Sateri menyebut DP Macao membeli 52.087 ton pulp larut dari TPL,

65 Harus dicatat bahwa wilayah yurisdiksi terkait struktur kepemilikan dan pengaturan dagang PT Toba Pulp – Makao, British Virgin Islands, Bermuda, Kepulauan Cayman, Seychelles, Singapura, dan Hong Kong – mempunyai peringkat kerahasiaan termasuk di antara yang tertinggi di dunia, menurut Indeks Kerahasiaan Finansial (*Financial Secrecy Index*) yang diterbitkan oleh Jaringan Keadilan Pajak (*Tax Justice Network*) (<https://fsi.taxjustice.net/en/introduction/fsi-results>). Hal ini berarti wilayah yurisdiksi tersebut mungkin menawarkan berbagai fasilitas kerahasiaan keuangan (msl. pendirian perusahaan secara anonim, kerahasiaan bank, akuntansi yang kurang transparan, kurangnya kerjasama antar negara, dsb.), dan, pada kasus tertentu, cukup menarik untuk melakukan pengalihan penghasilan korporat.

66 PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2020. “Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa.” 5 Februari. Diakses pada 10 Oktober 2020. https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202002/43d7216f94_a75786ea1f.pdf.

sementara BPS bahkan tidak mencatat adanya ekspor pulp larut dari Indonesia pada tahun tersebut (lihat Tabel 3 dan Gambar 12). Sementara pada 2009 volume yang disebut Sateri dan pencatatan BPS tidak jauh berbeda: Sateri menyebut DP Macao membeli 43.899 ton pulp larut dari TPL, sedangkan BPS mencatat adanya ekspor pulp larut dari Indonesia ke Tiongkok sebesar 46.856 ton. Pada 2010, ketimpangan tersebut kembali mencolok, Sateri menyebut DP Macao membeli 53.265 ton pulp larut dari TPL pada enam bulan pertama tahun tersebut, sedangkan BPS bahkan untuk sepanjang tahun tersebut mencatat ekspor pulp larut hanya 23.666 ton.

Penting dicatat bahwa Prospektus Sateri 2010 menyediakan dua bagan berdasarkan data UN Comtrade yang dilaporkan oleh Tiongkok. Salah satu bagan tersebut mencakup angka total pulp larut yang diimpor di Tiongkok dari Indonesia pada tahun 2007, 2008, dan 2009 dalam gambar pada halaman 97 berjudul *"Dissolving Wood Pulp Imports to China by Country"*.⁶⁷

Menariknya, berdasar dokumen Sateri, volume pulp larut yang dibeli DP Macao dari TPL sepanjang periode tersebut justru mendekati statistik impor Tiongkok, sebaliknya berbeda jauh dengan pencatatan ekspor Indonesia (lihat Tabel 2). Hal ini sekali lagi mengisyaratkan dugaan sejumlah besar pulp larut yang diproduksi TPL pada tahun 2008 dan 2010 dijual ke pembelinya di Tiongkok melalui DP Macao, namun tidak dilaporkan – atau dilaporkan sebagai produk lain – dalam pencatatan resmi ekspor Indonesia.

Tabel 3. Volume pulp larut dalam ton yang dilaporkan oleh Indonesia, Tiongkok, dan Sateri

Deskripsi data	Sumber data	2008	2009	2010
Ekspor Indonesia ke Tiongkok	Pemerintah Indonesia (melalui Badan Pusat Statistik)	—	46.856	23.666
Impor Tiongkok dari Indonesia	Pemerintah Tiongkok (melalui UN Comtrade)	57.589	40.108	111.035
Pembelian oleh DP Macao dari PT Toba Pulp	Sateri Holdings Limited	52.087	43.899	53.265 (Jan–Juni 2010)

Sumber: Sateri Holdings Limited. 2010. *"Sateri Holdings Limited Global Offering."* Prospektus perusahaan. Hong Kong. 26 November 2010.

Pada tahun-tahun setelah Sateri melepaskan DP Macao pada bulan September 2010, laporan tahunan Sateri menggambarkan pembelian pulp larut (yang juga disebut pulp grade rayon) secara terus-menerus dari DP Macao. Laporan tahunan Sateri untuk tahun 2011 menyatakan:

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, usaha VSF-nya Grup [Sateri] memperoleh 15.644 ton metrik pulp grade rayon dari DP Macao, dengan harga rata-rata sebesar US\$ 1.586 per ton.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, usaha VSF-nya Grup [Sateri] memperoleh 49.713 ton metrik pulp grade rayon dari DP Macao, yaitu pihak yang berkaitan sebagaimana diuraikan pada Catatan 43, dengan harga rata-rata sebesar US\$ 1.516 per ton.

Laporan tahunan Sateri 2012 menyatakan:

Nilai penjualan pulp kayu larut oleh DP Macao kepada Sateri Jiangxi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 mencapai sekitar US\$ 23.732.000.

67 Sateri Holdings Limited, 2010, *Op. cit.*

Gambar 12: Kutipan beranotasi dari prospektus pencatatan Sateri Holdings Limited 2010 untuk Bursa Efek Hong Kong

Halaman Depan:



Stock code : 1768

Joint Global Co-ordinators and Joint Sponsors
(in alphabetical order)



Morgan Stanley

Sateri Holdings Limited Global Offering

Joint Bookrunners and Joint Lead Managers



Morgan Stanley



Halaman 152:

Segments/Business	Year ended December 31,									Six months ended June 30,					
	2007			2008			2009			2009			2010		
	Sales volume	Revenue	Average selling price ⁽¹⁾	Sales volume	Revenue	Average selling price ⁽¹⁾	Sales volume	Revenue	Average selling price ⁽¹⁾	Sales volume	Revenue	Average selling price ⁽¹⁾	Sales volume	Revenue	Average selling price ⁽¹⁾
	(metric tons)	(US\$ in thousands)	(US\$ per metric ton)	(metric tons)	(US\$ in thousands)	(US\$ per metric ton)	(metric tons)	(US\$ in thousands)	(US\$ per metric ton)	(metric tons)	(US\$ in thousands)	(US\$ per metric ton)	(metric tons)	(US\$ in thousands)	(US\$ per metric ton)
Cellulose products ⁽²⁾															
Bahia Specialty Cellulose ⁽²⁾⁽³⁾	79,109	93,593	1,183	121,178	117,915	973	354,368	314,124	886	135,691	94,300	695	192,820	276,750	1,435
DP Macao ⁽⁴⁾⁽⁵⁾															
Dissolving wood pulp ⁽⁶⁾	9,038	13,271	1,468	52,087	55,262	1,061	43,899	42,528	969	—	—	—	53,265	74,227	1,394
Other pulp products ⁽⁷⁾	—	—	—	141,497	84,178	595	142,163	67,740	476	79,032	31,419	398	22,409	14,494	647
Subtotal DP Macao	9,038	13,271	1,468	193,584	139,440	720	186,062	110,268	593	79,032	31,419	398	75,674	88,721	1,172
Total cellulose products	88,147	106,864	1,212	314,762	257,355	818	540,430	424,392	785	214,723	125,719	585	268,494	365,471	1,361
Viscose staple fibers	72,782	165,303	2,271	60,766	124,904	2,055	67,273	127,606	1,897	34,577	55,263	1,598	30,801	75,391	2,448
Total		272,167			382,259			551,998			180,982			440,862	

Halaman 153:

- (6) Comprises principal trading sales of dissolving wood pulp by DP Macao to external customers that was primarily sourced from TPL.

Halaman 31:

“TPL”

PT Toba Pulp Lestari, Tbk, a limited liability company incorporated in Indonesia and listed on the Indonesia Stock Exchange. As of the Latest Practicable Date, our Ultimate Controlling Shareholder controlled approximately 90.6% of TPL's issued share capital

Sumber: Sateri Holdings Limited, 2010, Ibid.

Laporan tahunan Sateri 2013 menyatakan:

Nilai penjualan pulp kayu larut oleh DP Macao kepada Sateri Jiangxi dan Sateri Fujian selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 mencapai sekitar US\$ 37.323.000.

Penerbit laporan ini tidak melihat dalam laporan Sateri adanya indikasi bahwa DP Macao menjual pulp larut dari sumber selain TPL. Dengan demikian, pernyataan-pernyataan di atas secara kolektif menunjukkan bahwa DP Macao membeli pulp larut dalam volume yang cukup besar dari TPL selama tahun 2010–2013 dan menjualnya kepada Sateri untuk produksi VSF oleh perusahaan operasionalnya, yaitu Sateri Jiangxi dan Sateri Fujian. Temuan ini memunculkan tanda tanya akan reliabilitas pengumuman TPL mengenai pulp yang diproduksi pada Juni 2010 hingga Maret 2017. Sebagaimana dibahas pada Bagian 6, dalam pengumumannya TPL menyebut memproduksi pulp grade kertas saja pada 8 Juni 2010 hingga 3 Maret 2017. Padahal, pabrik Sateri Jiangxi dan Sateri Fujian memproduksi VSF yang membutuhkan pulp larut sebagai bahan baku.



BAGIAN III. DUGAAN PENGALIHAN KEUNTUNGAN (*PROFIT SHIFTING*) OLEH PT TOBA PULP LESTARI

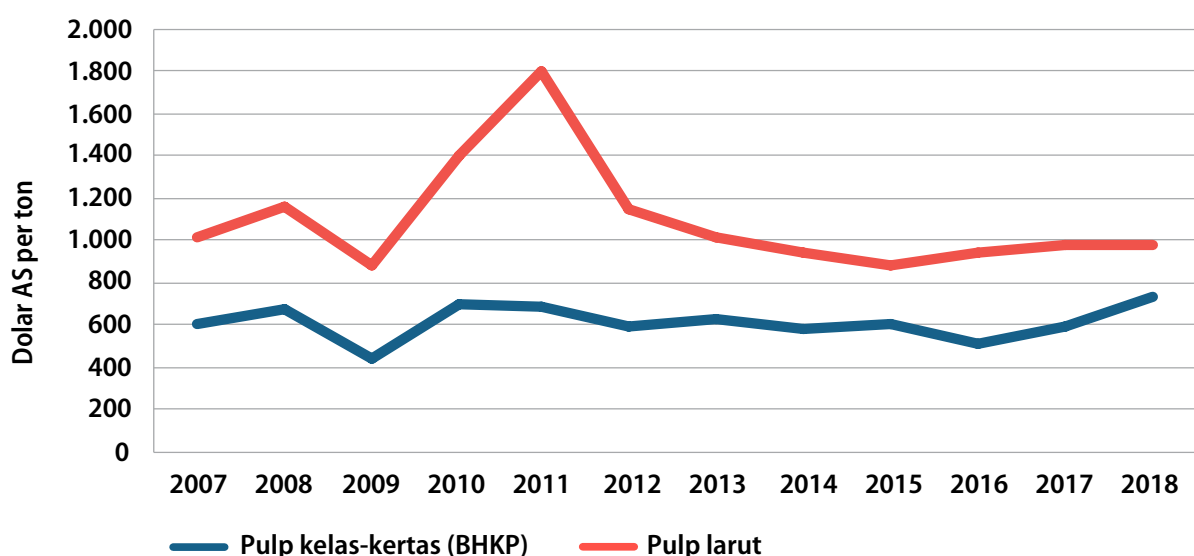
11. Pada ekspor, apa untungnya melaporkan pulp larut sebagai pulp kelas-kertas?

Secara kumulatif, data yang tersaji sejauh ini memperlihatkan sepanjang 2008–2016 TPL mengekspor sejumlah besar pulp larut ke DP Macao yang tampaknya diklasifikasi sebagai pulp kelas-kertas. Kesenjangan pencatatan ini tentu mengundang pertanyaan tentang alasan pengiriman ini dilaporkan sebagai kualitas pulp yang berbeda dari yang sebenarnya. Apa gerangan motivasi parapihak dalam kasus ini sehingga melakukan salah-klasifikasi jenis pulp yang dipasarkan?

Dari latar ekonomi, harga pulp kelas-kertas konsisten jauh lebih rendah dibanding harga pulp larut di pasar internasional. Tiongkok mengimpor kedua produk itu pada 2007–2018 dan berdasar harga rata-rata tahunan impor, harga per ton pulp larut lebih tinggi US\$ 243 sampai US\$ 1.117 dibanding harga pulp kelas-kertas (lihat Gambar 13). Dalam persentase, untuk impor Tiongkok pada 2007–2018 harga pulp kelas-kertas rerata 57% dari harga pulp larut. Data keuangan penjualan pulp DP Macao selama tahun 2008, 2009, dan paruh pertama 2010, sebagaimana disajikan prospektus Sateri pada 2010, juga mencerminkan kecenderungan perbandingan harga pulp kelas-kertas dengan pulp larut seperti itu (lihat Tabel 4). Pada rentang 30 bulan tersebut, harga rata-rata penjualan pulp kelas-kertas DP Macao sebesar US\$ 544 per ton, sedangkan pulp larut sebesar US\$ 1.129 per ton.

Sepanjang 2008–2016, harga rata-rata ekspor pulp TPL yang tidak menyebut jenisnya secara spesifik (sebagaimana terdapat pada laporan tahunannya) tidak mengikuti harga pasar pulp larut. Antara 2010 hingga 2013, kelangkaan katun memicu peningkatan permintaan global pulp larut, sehingga harganya

Gambar 13. Harga impor rata-rata (CIF) per ton pulp kelas-kertas (BHKP) dan pulp larut di Tiongkok, 2007–2018



Sumber: UN Comtrade.

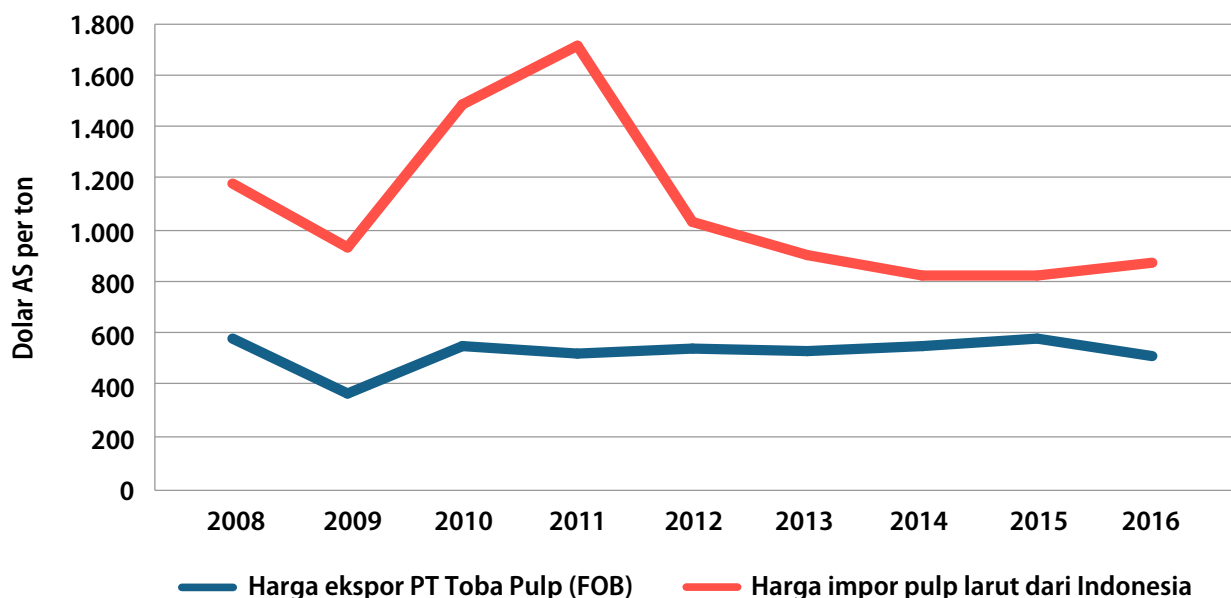
Tabel 4. Penjualan pulp kelas-kertas (BHKP) dan pulp larut oleh DP Macao selama tahun 2008, 2009, dan Januari–Juni 2010

Tahun	Penjualan pulp grade kertas (BHKP)			Penjualan pulp larut		
	Volume (ton)	Nilai (x 000 US\$)	Harga rata-rata (US\$/ton)	Volume (ton)	Nilai (x 000 US\$)	Harga rata-rata (US\$/ton)
2008	141.497	84.178	595	55.262	57.062	1.033
2009	142.163	67.740	476	49.939	46.828	938
Jan–Juni 2010	22.409	14.494	647	55.299	77.327	1.398
Total	306.069	166.412	544	160.500	181.217	1.129

Sumber: Sateri Holdings Limited. 2010. "Sateri Holdings Limited Global Offering." Prospektus perusahaan. Hong Kong. 26 November 2010.

melonjak. Pada waktu itu, harga impor rata-rata pulp larut di Tiongkok melonjak dari di bawah US\$ 1.000 per ton hingga lebih dari US\$ 1.600 per ton (CIF)⁶⁸, sebuah lonjakan luar biasa. Meski demikian, harga rerata ekspor pulp TPL justru tetap datar selama periode tersebut (lihat Gambar 14).

Gambar 14. Harga satuan rata-rata untuk ekspor pulp PT Toba Pulp Lestari dan impor pulp larut Tiongkok dari Indonesia, 2008–2016



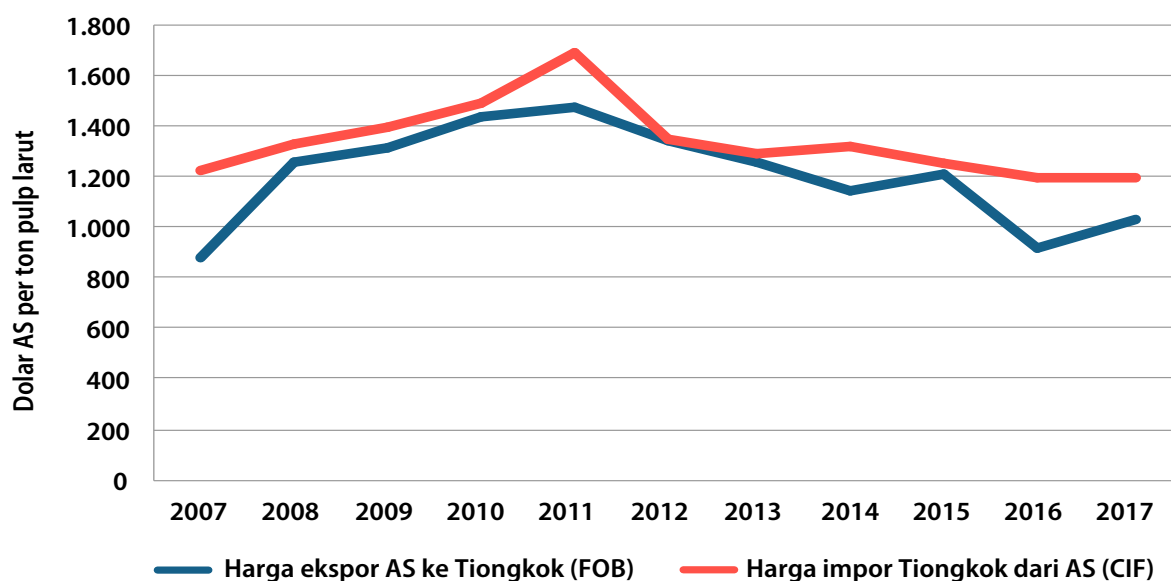
Sumber: Laporan Tahunan PT Toba Pulp. 2008–2016; UN Comtrade.

Sebagai pembandingan, harga ekspor pulp larut Amerika Serikat ke Tiongkok pada 2007–2017 senantiasa mengikuti harga impor di negara tujuan tersebut (lihat Gambar 15). Baik harga ekspor maupun harga impor naik terus pada 2007–2011, selanjutnya cenderung menurun hingga 2017. Pada periode itu, harga ekspor dan impor pulp larut AS – Tiongkok berkorelasi tinggi, berbeda dengan ekspor impor Indonesia – Tiongkok (lihat Gambar 14).

Tampaknya, sepanjang periode yang dianalisis, TPL menjual pulp larut di bawah harga pasar ke DP Macao, perusahaan afiliasinya (yaitu dengan mencantumkan harga pasar bagi pulp kelas-kertas yang memang nilainya lebih rendah). Biasanya, Bea Cukai mempunyai kisaran harga satuan yang wajar untuk setiap kode HS sehingga secara efisien dapat dipakai memastikan suatu komoditas dikenai harga yang lazim sebagaimana pasar terbuka. Namun, berhubung produk yang diekspor TPL tersebut diklasifikasi sebagai komoditas yang berharga lebih rendah (yaitu pulp kelas-kertas atau BHKP – HS 470329) dibanding pulp larut (HS 470200), bisa jadi pembebanan harga oleh TPL ke DP Macao yang di bawah

⁶⁸ CIF berarti "cost, insurance, and freight" (biaya, asuransi, dan pengangkutan). Lihat Kotak 3 di bawah tentang konversi FOB dan CIF.

Gambar 15. Harga satuan rata-rata ekspor pulp larut Amerika Serikat ke Tiongkok, dan impor pulp larut Tiongkok dari Amerika Serikat, 2007–2017



Sumber: UN Comtrade

harga pasar tersebut luput dari perhatian Bea Cukai Indonesia. Menanggapi tuduhan dari Indonesia leaks mengenai manipulasi dokumentasi ekspor dari tahun 2007 sampai 2016, pada bulan Februari 2020 PT Toba Pulp menyatakan bahwa “Kegiatan ekspor produk yang dilakukan oleh Perseroan [Toba Pulp] berikut pencatatan HS Code tersebut telah sesuai dengan klasifikasi produk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Tanggapan disajikan secara lengkap pada Lampiran A.)

Kotak 3. Konversi FOB ke CIF untuk perbandingan harga ekspor dan impor

Data yang digunakan untuk laporan ini menuliskan harga ekspor Indonesia dinyatakan dalam FOB (*free on board*). Harga FOB termasuk harga barang sampai dengan dimuat di kapal sebelum diekspor dari Indonesia. Harga FOB berarti bahwa angka tersebut tidak termasuk biaya pengangkutan atau asuransi barang hingga mencapai tempat tujuan. Sementara harga impor pada data untuk laporan ini dinyatakan dalam CIF (*cost, insurance, and freight*). Harga CIF sudah termasuk biaya transportasi dan asuransi hingga barang tiba di perbatasan negara pengimpor.⁶⁹ Dengan demikian, perbedaan harga FOB dan CIF adalah pada biaya pengangkutan dan asuransi tersebut. Memilah komponen biaya pada FOB dan CIF akan lebih rumit bila terjadi *trans-shipment* atau *trans-invoicing* saat terdapat perantara yang mengekspor ulang atau menerbitkan faktur baru terhadap satu pengapalan. Pada situasi begitu, harga CIF bisa jadi adakan termasuk komisi perantara atau biaya pemasarannya.

$$\text{FOB (harga ekspor)} + \text{Biaya Pengangkutan} + \text{Asuransi (+ Biaya Pemasaran)} = \text{CIF (harga impor)}$$

Kajian ekonomi makro yang mengkonversi harga FOB ke CIF, atau sebaliknya, kerap memakai angka penyesuaian sebesar 10%. Namun, studi-studi terkini menganggap angka penyesuaian 6% lebih akurat dalam konversi FOB ke CIF.⁷⁰

69 Marco Marini, Robert Dipplesman, dan Michael Stanger, *New Estimates for Direction of Trade Statistics*, Kertas Kerja IMF WP/18/16, International Monetary Fund, Washington, DC, Januari 2018, <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2018/wp1816.ashx>, akses 29 April 2020.

70 Guannan Miao dan Fabienne Fortanier, “Estimating Transport and Insurance Costs of International Trade,” OECD Statistics Working Papers 2017/04, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, 2017, <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/8267bb0f-en.pdf>, diakses 29 April 2020.

12. Menghitung dugaan pendapatan DP Macao memasarkan produk PT Toba Pulp Lestari

Sebagaimana analisis di atas, TPL tampak menjual pulp larut kepada DP Macao di bawah harga pasar, kemudian DP Macao tampak menjualnya kepada pembeli eksternal dan perusahaan-dalam-grup di Tiongkok, pada kisaran harga pasar. Dengan begini, terbuka ruang bagi DP Macao beroleh *spread*, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli, yang jauh lebih besar dari yang biasa diperoleh perusahaan pemasaran dari transaksi komersil normal pada penjualan dan atau pemasaran produk yang tidak diproduksinya.

Untuk pengapalan, yang terjadi tampaknya seperti berikut: *pada pengapalan September 2010, misalnya, TPL tercatat mengeksport 1.015.433 kilogram (kg) pulp yang diberi label "Toba Cell Eucalyptus Pulp" (HS 470329) kepada DP Macao dengan harga satuan, menurut angka dari penyedia data perdagangan komersil, sebesar US\$ 550 per ton (FOB). Kemudian, masih pada bulan yang sama, satu perusahaan di Tiongkok, Bora Jingwei Fibre Co. tercatat menerima kiriman pulp larut (HS 470200) seberat 1.015.433 kg dengan harga satuan sebesar US\$ 1.630 per ton (CIF). Mengasumsikan kedua catatan yang sama persis volumenya tersebut adalah barang yang sama, dan barang tersebut adalah pulp larut, tampak bahwa DP Macao menjualnya hampir tiga kali lipat dari nilai yang dibayarkan kepada TPL.*

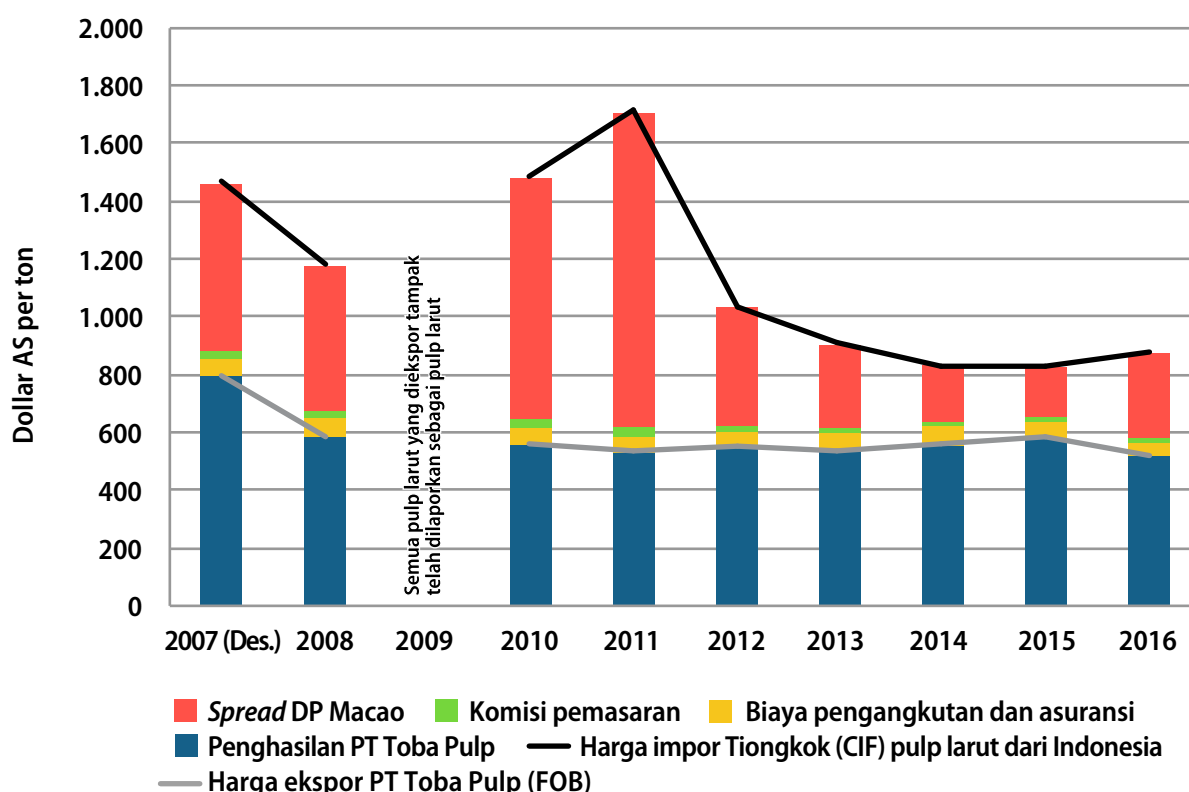
Tabel 5 memperlihatkan beberapa contoh pengapalan lainnya yang menggambarkan skala *spread* yang tampaknya diperoleh DP Macao dari penjualan pulp yang dibeli dari TPL. Data pengapalan yang ditampilkan di tabel ini hanyalah sebagian kecil dari pengapalan sepanjang 2010–2016, yang mana ekspor dari Indonesia yang tercatat sebagai pulp kelas-kertas voumenya sama persis, kilogram-terhadap-kilogram, dengan volume impor Tiongkok namun tercatat sebagai pulp larut, sebagaimana telah dipaparkan pada Bagian II di atas. Untuk menghitung *spread*, biaya pengangkutan dan asuransi harus diperhitungkan, pun komisi pemasaran sebesar 2% (yaitu jumlah yang biasa diterima perusahaan pemasaran, seperti DP Macao, dalam suatu transaksi komersial normal). Pada lima contoh pengapalan ini, tampak *spread* yang diperoleh DP Macao ternyata lebih dari 10 kali lipat komisi yang biasa diperoleh perusahaan pemasaran pada transaksi komersial normal.

Tabel 5. Sampel pengapalan ekspor PT Toba Pulp Lestari dari Indonesia ke DP Macao, dan impor pulp larut Tiongkok dari Indonesia

Ekspor Kode HS 470329 PT Toba Pulp kepada DP Macao			Impor Kode HS 470200 Tiongkok dari Indonesia				Penyesuaian dari FOB ke CIF			Spread DP Macao	
Tanggal	Volume (kg)	Harga (FOB)	Tanggal	Nama importir	Volume (kg)	Harga (CIF)	Pengangkutan dan asuransi per ton	Pengangkutan dan asuransi per kiriman	Komisi normal (2%)	Selisih harga jual dan harga beli	% total nilai penjualan
2010 Sep	1.015.433	\$558.488	2010 Sep	Bora Jingwei	1.015.433	\$1.655.156	\$71	72.096	\$33.103	\$991.469	60%
2010 Nov	503.482	\$251.741	2011 Nov	Sateri Jiangxi	503.482	\$579.004	\$71	36.754	\$11.580	\$279.936	48%
2012 Dec	1.007.651	\$468.558	2012 Dec	Anhui Somet	1.007.651	\$856.503	\$72	72.551	\$17.130	\$298.264	35%
2013 Aug	594.427	\$282.352	2013 Aug	Sateri Fujian	594.427	\$534.984	\$71	42.204	\$10.700	\$199.728	37%
2014 Mar	497.404	\$261.137	2014 Apr	Sateri Jiangxi	497.404	\$442.690	\$74	36.808	\$8.854	\$135.891	31%

Sumber: Penyedia data perdagangan komersial perihail volume, harga kiriman, dan importir. Biaya pengangkutan didasarkan pada data Fastmarkets RISI mengenai biaya angkut tahunan (US\$ per ton) untuk kiriman BHKP dari Indonesia ke Shanghai selama tahun 2010–2014. Biaya asuransi diperkirakan sebesar 0,6% dari harga jual bersih untuk produk yang dikirim.

Gambar 16. Estimasi distribusi harga impor per ton ke Tiongkok untuk pulp larut hasil produksi PT Toba Pulp Lestari yang diekspor dan nampaknya di-salah-klasifikasi, Desember 2007–2016



Sumber: Laporan tahunan PT Toba Pulp Lestari Tbk 2007–2016; UN Comtrade; Biaya pengangkutan didasarkan pada data Fastmarkets RISI mengenai biaya angkut tahunan (US\$ per ton) untuk kiriman BHKP dari Indonesia ke Shanghai selama tahun 2007–2016. Biaya asuransi diperkirakan sebesar 0,6% dari harga jual bersih untuk produk yang dikirim.

Catatan: Komisi pemasaran diasumsikan tetap, sebesar 2%. Harga jual eksportir TPL pada FOB, sedangkan harga beli importir pada CIF. Penyesuaian (adjustment) dilakukan terhadap biaya pengangkutan, asuransi dan komisi pemasaran. Sebelum 2011 TPL tidak menyajikan volume penjualan dalam laporannya, sehingga volume produksinya dipakai sebagai proksi terhadap volume penjualan guna menghitung pendapatan per ton pada 2007–2010. Untuk tahun 2007, harga ekspor diderivasi dari data penjualan dan volume tahunan yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan Toba Pulp 2007, dan harga impor berdasarkan angka-angka yang dilaporkan di Sateri Holdings Limited. 2010. Op. cit. untuk harga beli rata-rata pulp larut oleh DP Macao pada Desember 2007. Prospektus Sateri menunjukkan pendapatan sebesar US\$ 13,271 juta berasal dari pulp larut Toba Pulp pada bulan Desember 2007 dengan harga jual rata-rata US \$ 1.468 per metrik ton.

Spread besar yang tampak diterima DP Macao dari pemasaran pulp PT Toba Pulp sebenarnya dapat juga dihitung melalui harga ekspor rata-rata tahunan (yang bisa didapat melalui laporan tahunan TPL) dan harga impor rata-rata tahunan untuk pulp larut yang diimpor ke Tiongkok dari Indonesia (yang bisa diperoleh melalui data UN Comtrade), sebagaimana Gambar 16. Pada kondisi normal, perusahaan pemasaran biasa memperoleh komisi sebesar 2% dari nilai jual barang.⁷¹ Berbeda halnya dengan DP Macao, *spread*-nya bahkan lebih dari 50% nilai jual 2010 dan 2011. Pada lima tahun lain, *spread*-nya rerata lebih dari 30%.⁷²

71 Hal yang sangat relevan adalah setelah Sateri melepaskan DP Macao pada bulan September 2010, PT Macao mulai menjalankan Kontrak Keagenan dan bersepakat untuk menjual pulp larut yang dibeli dari PT Toba Pulp melalui SC International Macao, yaitu anak perusahaan milik Sateri, dengan komisi tetap sebesar 2% dari nilai jual (Sateri Holdings Limited, 2010).

72 Perlu dicatat bahwa pada tahun 2009, sepertinya PT Toba Pulp Lestari mengklasifikasi seluruh ekspor pulp larutnya dengan kode HS yang benar (HS 470200). Harga rata-rata untuk ekspor pulp larut tersebut sepertinya lebih tinggi daripada harga ekspor pulp grade kertas selama tahun 2009. Namun, masih terdapat *spread* yang cukup signifikan pada tahun 2009 antara harga ekspor pulp larut di Indonesia dan harga impor pulp larut di Tiongkok, yaitu tujuan untuk sebagian besar kiriman PT Toba Pulp Lestari. Hal ini mengakibatkan dinamika keuntungan yang serupa dengan tahun-tahun lainnya. Namun demikian, *spread* apapun yang ditangkap oleh DP Macao pada tahun 2009 tidak dianalisa dalam kajian ini (atau disajikan pada Gambar 15 dan 16), karena sepertinya tidak diderivasi dari praktik perdagangan yang terdokumentasi dalam laporan ini.

Spread terbesar diperoleh pada 2011, ketika DP Macao tercatat membeli produk TPL pada harga rata-rata US\$ 532 per ton, lalu menjualnya pada harga rata-rata US\$ 1.717 per ton. Dengan memasukkan biaya pengangkutan dan asuransi (terhitung sebesar US\$ 64 per ton) dan komisi pemasaran 2%, *spread* yang nampaknya diraup DP Macao rerata US\$ 1.087 per ton. *Spread* terkecil terjadi pada 2015, sebesar rerata US\$ 172 per ton, namun masih cukup signifikan karena 21% dari nilai jual.

Temuan-temuan ini mengindikasikan DP Macao nampaknya meraup banyak dari penjualan pulp larut yang diproduksi TPL. Mengingat Makau merupakan yurisdiksi bertarif pajak rendah, praktik ini patut diduga sebagai cara menghindari kewajiban pembayaran pajak korporasi di Indonesia.

13. Memperkirakan pernyataan penghasilan yang diduga terlalu rendah oleh PT Toba Pulp Lestari

Sejauh mana praktik perdagangan ini berakibat mengecilnya pencatatan pendapatan dalam laporan keuangan TPL dan bersamaan meningkatkan pencatatan pendapatan pada neraca keuangan DP Macao? Dan apa dampaknya terhadap kewajiban pajak korporat TPL di Indonesia?

Menurut data perdagangan Tiongkok, rentang Desember 2007 sampai Desember 2016, negara itu mengimpor 959.834 ton pulp larut dari Indonesia.⁷³ Sepanjang waktu itu, TPL adalah satu-satunya produsen pulp larut di Indonesia, dan karenanya secara logis menjadi satu-satunya sumber impor sampai 2016, tahun ketika APRIL mulai memproduksi pulp larut. Angka impor Tiongkok yang mengindikasikan penjualan pulp larut TPL ke DP Macao ini (dengan penyesuaian perlu dilakukan untuk 2009 dan 2010 ketika TPL melaporkan setidaknya sebagian dari ekspor pulpnya sebagai pulp larut, dan 2016 ketika APRIL mulai produksi pulp larut juga) dapat dipakai mengestimasi besaran pengalihan pendapatan (dan patut diduga sebagai pemindahan potensi keuntungan) selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, sepanjang 2007–2016 tampak DP Macao beroleh total *spread* sebesar US\$ 426 juta (Rp 4,23 triliun) dari penjualannya terhadap pulp yang diproduksi TPL. Hitungan ini sudah mengeluarkan komisi pemasaran 2% yang lazim diperoleh agen pemasaran seperti DP Macao pada transaksi komersil normal. Dengan kata lain, *spread* yang diperoleh DP Macao ini sedemikian besar dan di luar kewajaran. Semestinya, TPL akan beroleh *spread* ini, bukannya DP Macao, bila saja faktur penjualannya mencatat secara benar ekspor pulp larutnya sesuai dengan harga pasar yang berlaku (lihat Gambar 17).

Spread yang tampak diperoleh DP Macao bervariasi tahun demi tahun. Ketika harga pulp larut meningkat pada 2010 dan 2011, *spread* tahunan DP Macao oleh produk TPL masing-masing, secara berurut, sebesar US\$ 65 juta dan US\$ 156 juta. Tahun-tahun lainnya, ketika perbedaan antara harga pulp larut dengan pulp kelas-kertas mengecil, *spread* per ton pun ikut menurun, pun karena volume produksi pulp larutnya juga berkurang, yang seperti itu saat itu TPL juga mengalihkan sebagian produksinya menjadi pulp kelas-kertas. Pada 2013, *spread* DP Macao sebesar US\$ 17 juta, dan berkurang lagi pada 2014, yakni sekitar US\$ 8 juta.

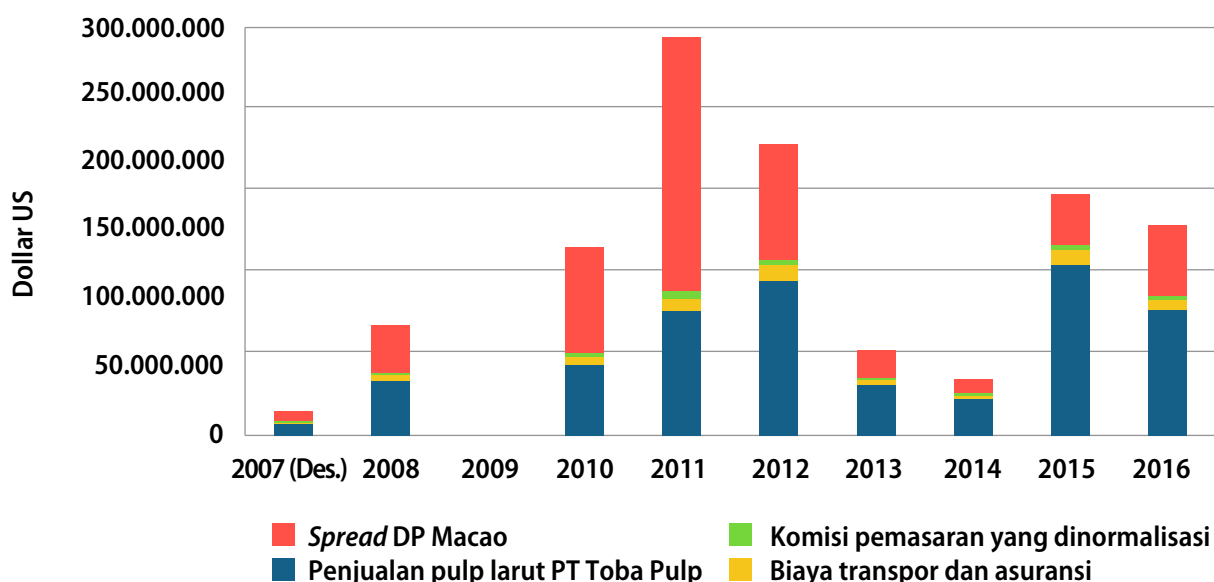
Secara agregat, analisis ini mengindikasikan bahwa pendapatan TPL, sebagai perusahaan yang memproduksi pulp yang dijual dalam rantai bisnis ini, pada 2007–2016 hanya relatif sedikit lebih besar dibanding *spread* yang diperoleh DP Macao sepanjang satu dekade tersebut. Penjualan pulp larut TPL

⁷³ Data volume impor UN Comtrade antara Januari 2008 dan Desember 2016. Sumber volume impor Desember 2007 berasal dari Sateri Holdings Limited, 2010, *Ibid*. Prosepektus ini mengindikasikan bahwa volume pada Desember 2017 sebanyak 9.038 ton.

ke Tiongkok sepanjang 2007–2016 yang tampak tercatat sebagai pulp kelas-kertas mendatangkan perkiraan pendapatan kotor sebesar US\$ 495 juta. Angka ini hanya sedikit lebih besar dibanding laba kotor DP Macao pada rentang waktu yang sama yang sebesar US\$ 426 juta, yang jelas jauh di atas komisi pemasaran standar 2% terhadap penjualan dan atau pemasaran suatu produk. Kenyataan bahwa TPL dan DP Macao adalah perusahaan terafiliasi dengan pemilik manfaat yang sebagian atau seluruhnya sama menjadi petunjuk kemungkinan adanya pengaturan harga dan pemasaran yang patut diduga memiliki satu atau lebih atribut dari skema pengalihan keuntungan.

Menanggapi temuan dalam laporan ini, Toba Pulp menyatakan: “Mengenai tuduhan pengalihan keuntungan, Perseroan telah memproduksi dan menjual produk sesuai dengan harga kewajaran dan setiap tahun dilakukan penilaian kewajaran atas harga produk oleh konsultan independen.” Tanggapan Toba Pulp secara lengkap disajikan secara lengkap pada Lampiran B.

Gambar 17. Estimasi distribusi total nilai pulp larut PT Toba Pulp Lestari yang diekspor dan nampaknya di-salah-klasifikasi dari Indonesia ke Tiongkok, Desember 2007–2016



Sumber: Laporan tahunan PT Toba Pulp Lestari Tbk 2007–2016; UN Comtrade; Biaya pengangkutan didasarkan pada data Fastmarkets RISI mengenai biaya angkut tahunan (US\$ per ton) untuk kiriman BHKP dari Indonesia ke Shanghai selama tahun 2007–2016. Biaya asuransi diperkirakan sebesar 0,6% dari harga jual bersih untuk produk yang dikirim.⁷⁴

Catatan: Komisi pemasaran lazim diasumsikan 2%. Harga jual eksportir TPL pada FOB, sedangkan harga beli importir pada CIF, sehingga penghitungan tersendiri (adjustment) dilakukan untuk perkiraan biaya pengangkutan (termasuk asuransi) dan komisi pemasaran (yang diasumsi tetap pada 2% dari harga penjualan). Data 2007 hanya Desember saja (tidak mencakup Januari – November tahun tersebut) karena hubungan dagang TPL dengan DP Macao tercatat bermula Desember 2007. Sumber data untuk volume pada 2007 adalah Sateri Holdings Limited, 2010. Prospectus for Initial Public Offering, prepared for The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission. Prospektus ini menunjukkan bahwa volume pulp larut yang DP Macao belikan dari TPL adalah 9.038 ton. Sumber data volume untuk tahun 2016 adalah data tingkat pengiriman yang berasal dari penyedia data perdagangan komersial. Volume tahun 2016 dihitung berdasarkan volume kiriman yang diekspor oleh PT Toba Pulp yang diklasifikasi sebagai pulp grade kertas dan diterangkan sebagai “Toba Cell Eucalyptus Pulp” (HS 470329).

74 Sourcing for the 2007 data is different than for other years since Toba Pulp’s trading relationship with DP Macao only started in December 2007, according to Sateri’s 2010 prospectus. For the average import price and volume, the data are from Sateri’s listing prospectus. Sateri (2010) states that DP Macao generated revenue of US\$ 13,271,000 from sales of 9,038 tons of dissolving pulp “primarily produced by TPL” to external customers. The Sateri prospectus lists the average selling price of DP Macao’s dissolving pulp for 2007 as US\$ 1,468 per ton. For the average export price, this estimate uses Toba Pulp annual report data, as with the other years.

14. Laba dan pembayaran pajak korporat yang dilaporkan PT Toba Pulp Lestari

Sepanjang 2007–2016, TPL membayar pajak penghasilan badan (*corporate income tax*) yang relatif kecil meski memproduksi lebih dari 1,8 juta ton pulp (kelas-kertas dan larut) dengan nilai jual lebih dari US\$ 1 miliar (lihat Tabel 6). Dari penjualan tersebut, TPL membukukan laba bersih sebesar US\$ 45,6 juta dan membayar pajak penghasilan badan bersih (*net corporate income tax*) sebesar US\$ 15,9 juta. Bila dibandingkan dengan nilai jual rata-ratanya pada rentang waktu tersebut yang senilai sekitar US\$ 550 per ton, maka pajak penghasilan badan terhadap pulp yang diproduksi rata-rata sebesar US\$ 8,66 per ton.

Tabel 6. Produksi dan penjualan pulp, laba bersih, dan pajak penghasilan korporat yang dilaporkan PT Toba Pulp Lestari Tbk, 2007–2016

	Unit	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Produksi pulp	Ton kering	172.710	197.093	210.607	175.989	189.630	178.676
Penjualan pulp	Ton kering	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	171.556	197.396
Nilai penjualan	Dolar AS	\$137.600.000	\$115.500.000	\$78.753.000	\$98.182.000	\$91.189.000	\$108.146.000
Laba bersih	Dolar AS	\$11.863.000	\$2.014.000	\$5.521.000	\$401.000	\$36.999	\$3.127.999
Pajak yang (dibayar) atau dikembalikan per laporan arus kas	Dolar AS	\$0	-\$17.650.000	-\$1.341.000	\$4.323.000	\$1.959.000	-\$1.204.000

	Unit	2013	2014	2015	2016	2007–2016
Produksi pulp	Ton kering	182.437	187.609	171.270	167.953	1.833.974
Penjualan pulp	Ton kering	170.362	196.798	165.057	161.598	
Nilai penjualan	Dolar AS	\$91.552.000	\$109.193.000	\$96.421.000	\$84.074.000	\$1.010.610.000
Laba bersih	Dolar AS	\$3.780.000	\$1.455.999	\$2.749.000	\$37.492.000	\$45.644.999
Pajak yang (dibayar) atau dikembalikan per laporan arus kas	Dolar AS	-\$113.000	-\$18.000	-\$1.337.000	-\$508.000	-\$15.889.000

Sumber: PT Toba Pulp Lestari Tbk. Laporan tahunan. 2007–2016.

Di Indonesia, dan di banyak negara lain sebenarnya, aksi korporasi menata pelaporan laba demi mengurangi kewajibannya bukanlah hal baru.⁷⁵ Pun, sebagaimana telah dibahas di atas, praktik pengalihan keuntungan dan membukukan laba di yurisdiksi berpajak rendah juga belum tentu ilegal, sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Meski begitu, ketika Pemerintah Indonesia sedang berupaya menghentikan pemindahan laba yang dapat dikenai pajak ke yurisdiksi bertarif pajak rendah, tentu tidaklah berlebihan berharap otoritas fiskal Indonesia menelisik apakah pengaturan pemasarannya TPL dengan DP Macao didasarkan pada faktur yang akurat dan penetapan harga yang wajar untuk ekspor pulp larut ketika dikirim.

Menariknya, pada tahun-tahun ketika TPL melaporkan laba yang relatif kecil atau bahkan merugi, DP Macao justru meraup keuntungan yang cukup besar melalui pemasaran pulp yang diproduksi TPL. Pada 2008, saat TPL mencatat laba bersih sebesar US\$ 2,0 juta, DP Macao justru mencatat keuntungan

⁷⁵ Menurut laporan dari beberapa tahun terakhir, perusahaan multinasional seperti Apple, Amazon, Starbucks, Nike dan General Electric telah mengelola penghasilan yang dilaporkan untuk meminimalkan kewajiban pajak.

US\$ 22,8 juta pada *segment profit* Sateri.^{76,77} Kemudian pada 2010, saat laba bersih TPL kurang dari US\$ 0,5 juta, hanya pada setengah tahun pertama tahun ini saja DP Macao mencetak untung sebesar US\$ 43,9 juta.⁷⁸ Sejak Sateri menjual DP Macao kepada Blue Dot Resources, yang juga dikendalikan Sukanto Tanoto, pada September 2010, sejauh yang penyusun ketahui tidak ada lagi pelaporan keuntungan DP Macao kepada publik.

Bagi pemilik manfaat TPL dan DP Macao, terdapat manfaat keuangan besar dengan mengalihkan laba yang dapat dikenai pajak di Indonesia ke Makau, yurisdiksi yang sudah sedemikian terkenal sebagai salah satu surga pajak. Menurut hukum Makau, DP Macao adalah perusahaan jasa luar negeri (*offshore service company*) dengan sebutan *Macao Commercial Offshore*.⁷⁹ Dengan begitu, DP Macao terbebas dari *complementary tax* Makau, atau pajak terhadap laba korporat, pada 2007–2016. Dengan posisi demikian, bisa jadi juga DP Macao pun tak membayar pajak penghasilan badan terhadap perkiraan laba kotor Rp 4,23 triliun⁸⁰ (US\$ 426 juta) yang diperoleh dari penjualan dan pemasaran produk TPL sepanjang waktu tersebut.

Sebaliknya, bila hal tersebut dilaporkan sebagai pendapatan yang dapat dikenai pajak terhadap TPL, bisa saja menjadi objek yang akan dikenai pajak penghasilan badan di Indonesia. Pada 2007 dan 2008, tarif pajak penghasilan badan di Indonesia sebesar 30%.⁸¹ Pada 2009, tarif tersebut diturunkan menjadi 28%, dan kemudian pada 2010 turun lagi menjadi 25%, dan tarif sebesar ini yang berlaku hingga sekarang.⁸² Secara hipotetis, bila seluruhnya dikenakan pajak penghasilan badan pada tarif tahun berjalan, otoritas fiskal Indonesia berpotensi beroleh penerimaan sebanyak Rp 1,07 triliun (US\$ 108 juta) dari pendapatan yang dikecilkan (*understated revenues*) sejumlah yang diperkirakan laporan ini.

Patut digarisbawahi bahwa penyusun tidak mengetahui secara persis rincian dan tarif pembayaran pajak TPL. Perhitungan lebih rinci perihal berapa kewajiban pajak yang semestinya dibayar TPL perlu dilakukan dengan menganalisis lebih rinci laporan laba-rugi dan status pembayaran pajak perusahaan sesuai aturan fiskal Indonesia.

Menanggapi temuan dalam laporan ini, Toba Pulp menyatakan: “Sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990, Perseroan selalu menjunjung tinggi *Good Corporate Governance* serta tetap berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.” Tanggapan Toba Pulp secara lengkap disajikan secara lengkap pada Lampiran B.

76 PT Toba Pulp Lestari Tbk, 2009, *Op. cit.*; Sateri Holdings Limited, 2010, *Op. cit.*

77 Pada tahun 2009, waktu PT Toba Pulp Lestari melaporkan kerugian sebesar US\$ 5,5 juta, justru keuntungan DP Macao mencapai US\$ 25,5 juta (PT Toba Pulp Lestari Tbk, 2010, *Op. cit.*; Sateri Holdings Limited, 2010, *Op. cit.*). Namun, sebagaimana dicatat di atas, keuntungan besar dari penjualan pulp larut yang tercatat oleh DP Macao pada tahun 2009 tidak dianalisa dalam kajian ini, karena sepertinya tidak diderivasi dari praktik perdagangan yang terdokumentasi dalam laporan ini. Selama tahun tersebut, sepertinya PT Toba Pulp Lestari mengklasifikasi semua ekspor pulp larutnya dengan kode HS yang sesuai (HS 470200).

78 PT Toba Pulp Lestari Tbk, 2011, *Op. cit.*; Sateri Holdings Limited, 2010, *Op. cit.*

79 Untuk informasi tentang perusahaan lepas pantai Macao, serta pengecualian pajak yang tersedia di bawah rezim lepas pantai Macao, lihat <http://www.hmv.com.mo/english/offshore/link/1.htm>.

80 Konversi mata uang Dolar AS ke Rupiah didasarkan pada nilai kurs resmi yang dihitung sebagai kurs rata-rata tahunan berdasarkan kurs rata-rata bulanan. Nilai kurs tahunan untuk Rupiah ke Dolar AS diakses dari Statistik Finansial Internasional dari Dana Moneter Internasional. Nilai kurs dari tahun 2007 sampai 2018 diterapkan pada nilai total tahunan untuk pernyataan penghasilan yang terlalu rendah dan potensi kehilangan pajak di tahun yang bersangkutan.

81 KPMG, 2019, “Tabel Tarif Pajak Perusahaan,” Situs web KPMG Internasional, <https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-table.html>, diakses 29 April 2020.

82 KPMG, 2019, *Op. cit.*

15. Pelaporan yang lebih akurat sejak tahun 2017

Dugaan pengalihan keuntungan oleh TPL tampaknya berakhir tak lama setelah 2016. Pada Maret 2017 TPL mulai mengumumkan setiap kali mengalihkan produksi pulp kelas-kertas menjadi pulp larut atau sebaliknya, dan ekspor pulp larutnya juga tercatat dengan kode HS 470200 pada pencatatan perdagangan resmi Indonesia. Satu pernyataan perusahaan bertanda tangan Direktur Eksekutif TPL diumumkan 3 Maret 2017 yang menyatakan TPL mengalihkan produksinya dari pulp kelas-kertas menjadi pulp larut.⁸³

Pengumuman tersebut tampaknya sejalan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Sebulan setelah pengumuman tersebut, April 2017, TPL tercatat mengekspor pulp larut sesuai dengan kode HS untuk pulp larut, yakni HS 470200, dengan keterangan “TPL-High Alpha Pulp”.⁸⁴ Sepanjang 2017, TPL tercatat mengekspor ke Tiongkok 121.241 ton pulp larut dengan nilai total US\$ 80.920.832 dan harga satuan rata-rata US\$ 667 per ton.⁸⁵

Sepanjang Januari – Maret 2017 TPL tercatat mengekspor ke Tiongkok 48.776 ton pulp berkode HS pulp kelas-kertas BHKP (HS 470329) dengan keterangan “Toba Cell Eucalyptus Pulp”.⁸⁶ Nilai total pengapalan ini US\$ 23.238.282, atau rerata US\$ 476 per ton.⁸⁷ tampaknya peralihan perusahaan akan mencatat secara tepat sebagai pulp larut berdampak pada kenaikan harga satuan rata-rata sebesar 40%, atau US\$ 191 per ton. Padahal selama tiga bulan tersebut harga CIF rata-rata impor pulp larut Tiongkok sedang meningkat, meski hanya 12%, dari US\$ 825 menjadi US\$ 925 per ton.⁸⁸

Hingga 31 Oktober 2020 TPL telah menerbitkan pengumuman terjadinya peralihan produksi antara pulp kelas-kertas dengan pulp larut pada 3 Maret 2017; 18 Juli 2017; 11 Mei 2018; 30 Juni 2018; 20 Februari 2019; dan 24 April 2019. Pada pengumuman ketiga, 11 Mei 2018, disebutkan TPL telah mengalihkan produksinya dari pulp larut menjadi pulp kelas-kertas sehari sebelumnya, atau 10 Mei 2018.⁸⁹ Pada 2018, ekspor TPL berkode HS 470329 pulp kelas-kertas BHKP mulai pada Juni, dan seluruh pengapalan ini diberi keterangan produk sebagai “PT Toba Pulp BHKP (Euca) 100% PEFC Certified”.⁹⁰ Keterangan produk ini menguatkan dugaan bahwa TPL pernah menggunakan keterangan produk “Toba Cell Eucalyptus Pulp” yang mengindikasikan yang diekspor tersebut adalah pulp larut meski tertera kode HS pulp kelas-kertas (HS 470329).

Laporan tahunan 2018 TPL menyatakan, “Sepanjang tahun 2018, Perseroan memproduksi sebanyak 139.335 ton *dissolving pulp* dan 30.571 ton BHKP.”⁹¹ Se jauh pengetahuan penyusun, inilah kali pertama TPL merinci produksi pulpnya per kelas dalam satu laporan tahunan pada periode 2007–2018. Volume

83 PT Toba Pulp Lestari Tbk, “Surat ke pada Direktur Bursa Efek Indonesia dari Vinod Kesavan,” 3 Maret 2017, https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201703/c623e30904_dd00a72ac7.pdf, diakses 30 April 2020.

84 Penyedia data perdagangan di Indonesia terkait dengan pengangkutan pulp larut untuk ekspor.

85 Penyedia data perdagangan di Indonesia terkait dengan pengangkutan pulp larut untuk ekspor.

86 Penyedia data perdagangan di Indonesia terkait dengan pengangkutan BHKP untuk ekspor.

87 Penyedia data perdagangan di Indonesia terkait dengan pengangkutan BHKP untuk ekspor.

88 Penyedia data perdagangan di Indonesia terkait dengan pengangkutan pulp larut untuk ekspor.

89 PT Toba Pulp Lestari Tbk, “Surat ke pada Direktur Bursa Efek Indonesia dari Anwar Lawden, S.H.,” 11 Mei 2018c, https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201805/e4f56b8448_e1aa3b29b1.pdf, diakses 29 April 2020.

90 Penyedia data perdagangan di Indonesia terkait dengan pengangkutan BHKP untuk ekspor.

91 PT Toba Pulp Lestari Tbk, 2019, *Ibid*.

produksi yang dilaporkan secara umum sesuai dengan volume yang tercatat pada data pengapalan Indonesia sebagai ekspor TPL baik berkode HS pulp larut maupun pulp kelas-kertas. Tampaknya sejak 2018 TPL tampil lebih transparan dengan menyampaikan secara spesifik jenis pulp yang diproduksi, baik pada laporan tahunan maupun klasifikasi jenis pulp yang diekspornya. Namun begitu, laporan ini bukan merupakan verifikasi independen terhadap akurasi pelaporan perusahaan, baik laporan tahunan pun pencatatan data pengapalannya.

Laporan Tahunan TPL 2019 melanjutkan tren 2018 dengan pengungkapan informasi yang lebih banyak, seperti dinyatakan dalam Laporan Dewan Direksi: "Perseroan memproduksi sebanyak 146.195 ton pulp dissolving dan 38.966 ton pulp BHKP di tahun 2019, secara total naik 8,98% dibandingkan tahun 2018 dengan volume produksi pulp dissolving 139.335 ton dan 30.570 ton pulp BHKP. Pencapaian penjualan pada tahun 2019 sebanyak 167.788 ton (pulp dissolving 128.825 ton dan pulp BHKP 38.963 ton), menurun sebesar 0,42%."⁹²

92 PT Toba Pulp Lestari, 2020, Laporan Tahunan 2019, https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2020/08/TPL_Annual-Report-2019.pdf, hlm. 18.



BAGIAN IV. INDIKASI PRAKTIK PENGALIHAN KEUNTUNGAN YANG SERUPA OLEH APRIL GRUP

16. Produksi pulp larut APRIL selama tahun 2016–2018

Per akhir tahun 2016, TPL tampak mengakhiri penggunaan praktik perdagangan yang terdokumentasi di beberapa bagian laporan ini. Akan tetapi, pada waktu yang berdekatan, pabrik pulp lain yang jauh lebih besar yang juga menempatkan Sukanto Tanoto sebagai pemilik manfaatnya, tampak mulai menggunakan praktik pengalihan keuntungan serupa yang sebelumnya patut diduga dipraktikkan TPL. Praktik tersebut, tampak terjadi juga pada 2018.

APRIL Grup merupakan produsen pulp terbesar kedua di Indonesia dan memiliki salah satu pabrik pulp terbesar di dunia, yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. Pabrik ini dioperasikan oleh perusahaan afiliasi, yaitu PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Intiguna Primatama. Data dari pihak perindustrian mengindikasikan, pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci mempunyai kapasitas produksi pulp sebesar 2,8 juta ton per tahun untuk BHKP, dan sebagian besar pulp di pabrik tersebut terintegrasi dengan produksi kertas.

Pada tahun 2015, APRIL mengumumkan perolehan izin untuk mengkonversi salah satu jalur produksi BHKP-nya menjadi jalur produksi “swing” yang mampu memproduksi pulp larut.⁹³ Menurut sumber perindustrian, APRIL mulai melakukan ujicoba produksi pulp larut di pabrik Pangkalan Kerinci pada pertengahan tahun 2016,⁹⁴ dan perusahaan tersebut memperluas produksi pulp larutnya pada setiap tahun berikutnya, setidaknya sampai tahun 2019. Pada tahun 2020, perusahaan afiliasi APRIL, yaitu Asia Pacific Rayon memulai pengoperasian fasilitas produksi viscose rayon dengan kapasitas 240.000 ton per tahun di pabrik Pangkalan Kerinci, setelah melakukan investasi sebesar Rp 15 triliun (US\$ 1,1 miliar).⁹⁵

Saat ini, situs web APRIL menyatakan, “Selain pulp grade kertas, APRIL juga memproduksi pulp grade rayon yang dipasok ke Sateri dan Asia Pacific Rayon, yang juga merupakan grup usaha di bawah RGE, sama seperti APRIL. Pulp grade rayon diproduksi menggunakan proses *prehydrolysis kraft*, dan produk akhir disebut AE pulp.”⁹⁶ Sebagaimana diketahui, pulp grade rayon merupakan sejenis pulp larut.

Tampaknya pengakuan publik pertama mengenai produksi pulp larut APRIL di pabriknya di Pangkalan Kerinci terdapat pada penilaian keberlanjutan terhadap operasi VSF Sateri di Tiongkok oleh Rainforest

93 Kontan Harian. 2015. Riau Andalan Bikin Produk Pulp Larut. 25 Februari 2015. <https://kemenperin.go.id/artikel/11218/Riau-Andalan-Bikin-Produk-Pulp-Larut>.

94 Lansdell, O. 2017. The outlook for dissolving wood pulp supply and demand. Hawkins Wright Ltd. Mei 2017. https://cellulose-fibres.eu/wp-content/uploads/2019/04/LansdellOliver_Abstract.pdf.

95 Harahap, Rizal. 2020. Jokowi officiates Asia Pacific Rayon plant in Riau. Jakarta Post. 22 Februari 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/22/jokowi-officiates-asia-pacific-rayon-plant-in-riau-islands.html>.

96 APRIL, “Pulp Products,” Situs web, <https://www.aprilasia.com/en/products/pulp-products>, diakses 11 October 2020.

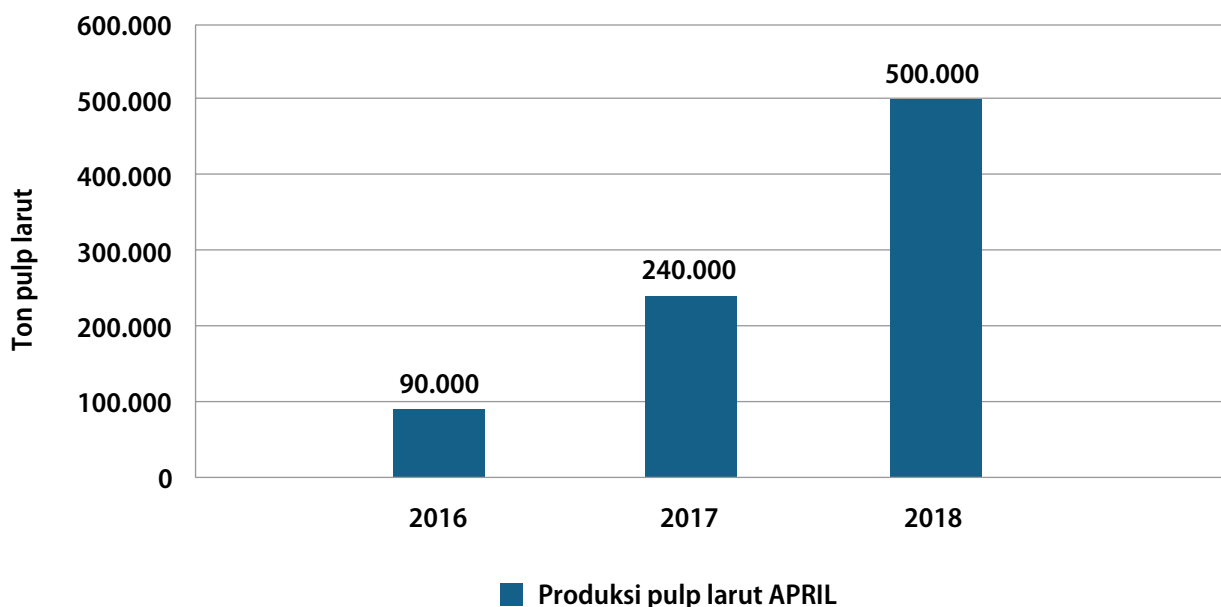
Alliance.⁹⁷ Dokumen tersebut mengindikasikan bahwa salah satu pemasok terbesar untuk pabrik Sateri selama periode audit sepuluh bulan dari bulan Januari sampai Oktober 2016 adalah pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci di Provinsi Riau. Sepengetahuan penyusun, APRIL tidak menyampaikan pengumuman publik pada tahun 2016 atau 2017 yang menyatakan bahwa pabrik di Pangkalan Kerinci sudah mulai memproduksi pulp larut.

Menanggapi beberapa pertanyaan dari kelompok masyarakat sipil, pada bulan Desember 2018, APRIL mengaku memproduksi 90.000 ton pulp larut sebagai “volume uji coba” pada tahun 2016, yaitu tahun pertama pengoperasian jalur produksi swing; 240.000 ton lagi pada tahun 2017; dan memperkirakan produksi sebesar 500.000 ton pada tahun 2018 (lihat Gambar 18):

Dalam surat elektronik anda tertanggal 28 November, dikatakan bahwa “Menurut audit CanopyStyle terhadap Sateri yang terbit pada bulan Mei 2018, pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci (di bawah RAPP) merupakan salah satu dari kedua pemasok pulp larut terbesar Sateri selama periode audit pada tahun 2016.” Sebagaimana terlihat dari partisipasi kami dalam audit tersebut, APRIL, melalui Sateri, telah menyediakan data pasokan historis untuk periode audit terkait. Demi tujuan pertanyaan anda, kami dapat membenarkan bahwa pada tahun 2016, APRIL memproduksi volume uji coba sebesar sekitar 90.000 ton, sedangkan produksi komersil dimulai pada tahun 2017 dengan volume sekitar 240.000 ton. Produksi tahun 2018 diperkirakan sebesar 500.000 ton.⁹⁸

Dalam Laporan Keberlanjutan 2018, APRIL mengindikasikan bahwa pulp larut diproduksi di pabrik Pangkalan Kerinci pada tahun 2017 dan 2018: “Angka [lindi hitam] ini naik dari tahun sebelumnya, dikarenakan naiknya produksi pulp larut sepanjang tahun ini, yang menghasilkan lebih banyak lindi hitam.”⁹⁹

Gambar 18. Produksi pulp larut di pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci di Provinsi Riau, 2016–2018



Sumber: Surat dari Direktur Keberlanjutan APRIL dan Asia Pacific Rayon kepada enam LSM tertanggal 17 Desember 2018.

97 Rainforest Alliance, “CanopyStyle Verification and Guidelines Evaluation Report for: Sateri Corporate Office and Manufacturing Mills In China,” Richmond, Vermont, 16 Mei 2018, https://www.rainforestalliance.org/business/wp-content/uploads/2018/10/Canopy-Verification-Report_Sateri_Final-Draft-16MAY2018.pdf.

98 Surat elektronik dari Direktur Keberlanjutan dan Urusan Eksternal APRIL, Lucita Jasmin, dan Wakil Presiden Komunikasi dan Keberlanjutan Asia Pacific Rayon kepada enam LSM (Environmental Paper Network, Greenpeace, Hutan Kita Institut, Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Jikalahari, Woods & Wayside International, dan Yayasan Auriga Nusantara), tertanggal 17 Desember 2018.

99 APRIL, Sustainability Report, 2018, Jakarta. https://www.aprilasia.com/images/pdf_files/sr/APRIL_SR-2018_EN.pdf.

Meskipun laporan tersebut menyatakan bahwa pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci telah memproduksi volume pulp larut yang cukup besar selama tahun 2016-2018, dalam catatan perdagangan resmi Indonesia tidak tercantum ekspor pulp larut (Kode HS 470200) apapun dari Pelabuhan Buatan di Provinsi Riau selama tahun-tahun tersebut. Perusahaan operasional PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Intiguna Primatama yang berafiliasi dengan APRIL diketahui mengekspor pulp grade kertas yang diproduksi di pabrik Pangkalan Kerinci dari Pelabuhan Buatan, sehingga patut diduga bahwa APRIL juga mengekspor pulp larut dari pelabuhan tersebut atau pelabuhan lain di Provinsi Riau.

Ketiadaan dalam data ekspor ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah APRIL juga melaporkan dan menilai pulp larut sebagai pulp grade kertas. Padahal, berbeda dengan TPL pada 2007–2016, APRIL justru mengaku memproduksi dan mengekspor pulp larut selama tahun 2016–2018, sebagaimana terlihat di atas.

17. Kesenjangan data perdagangan Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2017 dan 2018

Data impor Tiongkok tahun 2016–2018 menguatkan dugaan APRIL Grup memang mengekspor pulp larut ke Tiongkok pada rentang waktu tersebut. Tahun 2016, Tiongkok bahkan mencatat rekor impor pulp larut dari Indonesia mencapai 230.546 ton.¹⁰⁰ TPL tidak pernah memproduksi pulp larut sebanyak itu dalam satu tahun, paling tinggi 210.607 ton; artinya catatan rekor ini memberi petunjuk bahwa sejak tahun 2016 TPL bukan lagi satu-satunya eksportir pulp larut dari Indonesia. Rekor ini dipecahkan kembali tahun 2017, ketika impor pulp larut Tiongkok dari Indonesia tercatat sebanyak 385.707 ton.¹⁰¹ Tahun 2018, impor pulp larut Tiongkok dari Indonesia meningkat lagi, mencapai 573.727 ton.¹⁰²

Pada 2016, Indonesia tidak mencatat adanya ekspor pulp larut, kecuali satu pengiriman contoh pada bulan Desember ke Austria sebanyak 2 ton.¹⁰³ Tahun 2017, tercatat adanya ekspor pulp larut sebanyak 140.410 ton dari Pelabuhan Belawan, 86% di antaranya menuju Tiongkok.¹⁰⁴ Sebagaimana dijelaskan di atas, TPL menggunakan Pelabuhan Belawan, yang berada di Provinsi Sumatera Utara, sebagai pelabuhan ekspornya. Tahun 2018, ekspor pulp larut Indonesia tercatat sebanyak 137.926 ton, yang, sebagaimana tahun sebelumnya, seluruhnya dikapalkan dari Pelabuhan Belawan.¹⁰⁵ Kecil sekali kemungkinannya produksi pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, diekspor dari Pelabuhan Belawan, Provinsi Sumatera Utara, mengingat tambahan biaya pengangkutan darat sejauh 700 km dari Pangkalan Kerinci ke Belawan akan sedemikian besar. Dengan demikian, catatan ekspor pulp larut Indonesia tahun 2017 dan 2018 tersebut hampir bisa dipastikan terkait produksi TPL. Pengecekan pada data pengapalan dagang juga menguatkan kesimpulan bahwa ekspor pulp larut yang dicatat dalam data BPS tahun 2017 dan 2018 tersebut adalah ekspornya TPL.

Perbandingan pencatatan impor Tiongkok dengan pencatatan ekspor Indonesia pada rentang 2016–2018 memperlihatkan kesenjangan besar, yang tampaknya mengindikasikan tidak tercatatnya ekspor pulp larut APRIL dalam data ekspor Indonesia (lihat Gambar 19).¹⁰⁶ Baik tahun 2016, 2017, maupun 2018,

100 UN Comtrade, *Op. cit.*

101 UN Comtrade, *Op. cit.*

102 UN Comtrade, *Op. cit.*

103 Badan Pusat Statistik, 2019, *Op. cit.*

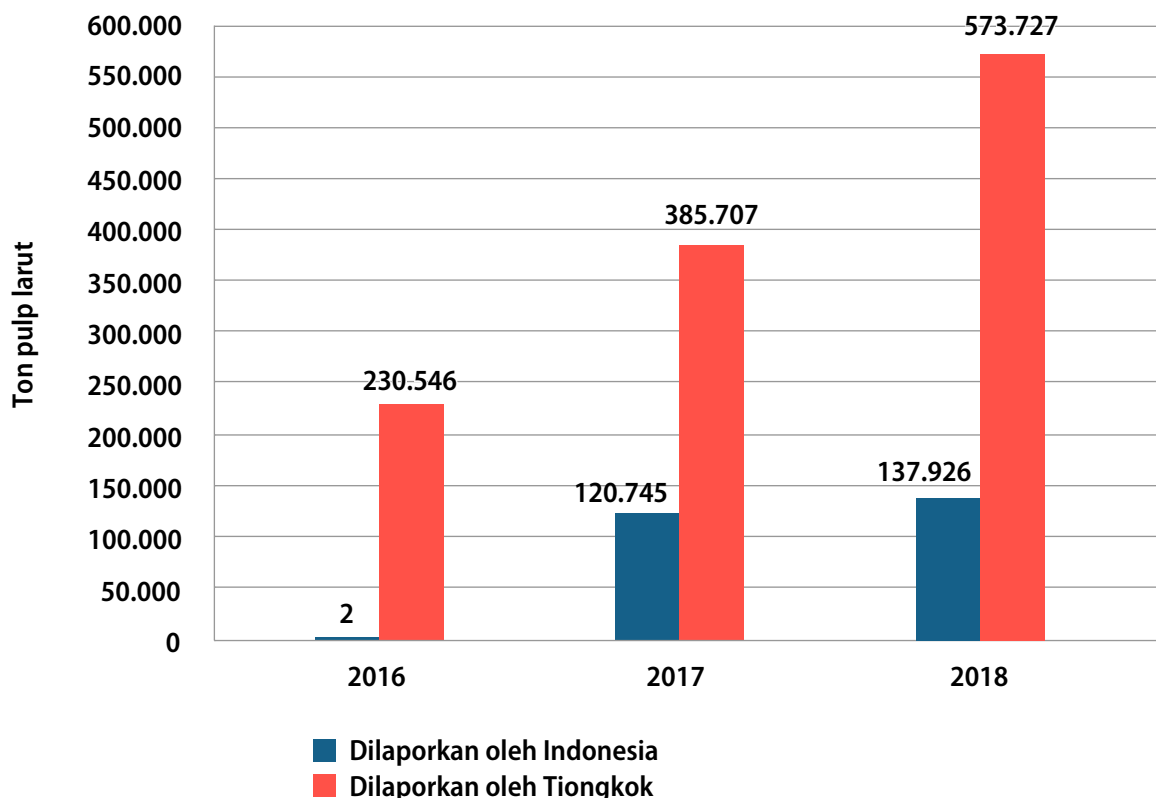
104 Badan Pusat Statistik, 2019, *Op. cit.*

105 Badan Pusat Statistik, 2019, *Op. cit.*

106 Aturan pelaporan UN Comtrade untuk importir akhir mensyaratkan bahwa itu tidak mengidentifikasi eksportir langsung tetapi negara asal sebagai yurisdiksi ekspor yang sesuai (lihat Panduan Metodologi untuk Pengguna Comtrade PBB). Akibatnya, data dari pola "perdagangan segitiga" dapat menciptakan anomali volume seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Anomali ini sendiri tidak menunjukkan masalah lebih lanjut. Namun, seperti yang diperlihatkan oleh informasi tambahan yang disajikan di bawah ini, anomali tertentu yang ditunjukkan pada Gambar 2 menunjukkan kasus dugaan pengalihan keuntungan.

data perdagangan Indonesia tidak menampakkan catatan adanya ekspor pulp larut dari Pelabuhan Buatan di Provinsi Riau, yaitu pelabuhan yang biasa dipakai untuk mengapalkan pulp yang diproduksi pabrik milik APRIL Grup di Pangkalan Kerinci.¹⁰⁷

Gambar 19. Pengiriman pulp larut dari Indonesia ke Tiongkok, 2016–2018



Sumber: Badan Pusat Statistik dan UN Comtrade.

Menanggapi temuan dalam laporan ini, dalam surat elektronik dari Direktur Hubungan Korporasi Agung Laksmiana tertanggal 27 Oktober 2020, APRIL menyatakan:

Sebagai latar belakang, kami jelaskan bahwa PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) memproduksi Kraft Pulp sejak tahun 1995 dan pada bulan Februari 2016, RAPP telah mendapatkan izin untuk memproduksi Dissolving Pulp dari BKPM. Setelah mendapatkan izin tersebut, RAPP melakukan serangkaian uji coba produksi jenis pulp baru yang kami namakan Acacia Eucalyptus (AE) Pulp yang merupakan modified kraft pulp. Jenis pulp ini menggunakan teknologi baru dengan campuran kayu Acacia Crassiparva dan Eucalyptus.

Pada tahun 2016, RAPP telah melakukan kerjasama 2 tahun untuk percobaan (trial) pemanfaatan serta peningkatan mutu AE Pulp dengan Sateri di China dengan harapan agar AE Pulp bisa dipakai sebagai bahan baku industri viscose staple fiber. Selama masa percobaan ini, Sateri akan mencampurkan pulp AE dari RAPP dalam proses produksinya dengan komposisi pencampuran tertentu dengan Dissolving Pulp hingga mencapai kualitas yang mereka inginkan. Proses percobaan dan modifikasi komposisi campuran yang bersifat trial and error berlangsung secara intensif dalam periode dua tahun tersebut.

¹⁰⁷ Badan Pusat Statistik, 2019, *Op. cit.*

Berhubung produk AE Pulp masih dalam tahap uji coba pengembangan, maka RAPP masih menggunakan HSCode Kraft atau HSCode 4703.290000 hingga spesifikasi produk AE Pulp ini memenuhi standar ekspektasi pembeli. Dan setelah 2 tahun masa uji coba, Sateri memberikan konfirmasi bahwa AE Pulp RAPP bisa mencapai kualitas yang sama atau substitusi Dissolving Pulp bagi proses produksi mereka. Sebagai realisasi kerjasama, RAPP sudah mengekspor sesuai dengan kebutuhan Sateri dengan HSCode Dissolving Pulp atau HSCode 4702.000000.

18. Ekspor pulp larut APRIL ke Tiongkok

Estimasi volume pulp larut yang sepertinya diekspor oleh pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci dan diberikan harga sebagai pulp kelas-kertas selama periode 2016–2018 dapat diderivasi dengan menghitung selisih antara impor pulp larut dari Indonesia yang dilaporkan di Tiongkok dan pulp larut yang sepertinya diekspor ke Tiongkok oleh TPL.

Pada tahun 2016, saat TPL belum melaporkan produk ekspornya sebagai pulp larut, volume ekspor pulp larut TPL dapat diperkirakan berdasarkan kiriman ekspornya ke Tiongkok sebagai pulp kelas-kertas yang diberi label "*Toba Cell Eucalyptus Pulp*" (HS 470329). (Lihat Bagian II di atas yang menguraikan dugaan ekspor pulp larut TPL diklasifikasi salah sebagai pulp kelas-kertas dan diterangkan sebagai "*Toba Cell Eucalyptus Pulp*"). Pada tahun 2016, total volume pengapalan TPL mencapai 154.646 ton.¹⁰⁸ Sebagai perbandingan, volume pulp larut dari Indonesia yang diimpor Tiongkok pada tahun 2016 mencapai 230.546 ton, menurut pelaporan Tiongkok kepada UN Comtrade.¹⁰⁹ Dengan demikian, 75.900 ton (yaitu selisih antara impor yang dilaporkan di Tiongkok dan estimasi ekspor TPL) diduga sebagai jumlah pulp larut yang diekspor oleh pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci ke Tiongkok. Jumlah tersebut merupakan 84,3% dari "volume uji coba" pulp larut seberat 90.000 ton yang diproduksi pabrik Pangkalan Kerinci pada 2016 sebagaimana disampaikan APRIL kepada kelompok masyarakat sipil.¹¹⁰

Pada tahun 2017, volume ekspor TPL ke Tiongkok yang diklasifikasi sebagai pulp kelas-kertas dan diberi label "*Toba Cell Eucalyptus Pulp*" (HS 470329) mencapai 48.776 ton.¹¹¹ Sebagaimana diuraikan di atas, pada bulan Maret 2017, TPL mengumumkan peralihan produksinya ke pulp larut, dan sepertinya pada bulan April 2017, TPL mulai mengekspor pulp larut yang diklasifikasi dengan kode HS yang benar (HS 470200). Indonesia mencatat ekspor pulp larut ke Tiongkok sebanyak 120.745 ton pada 2017, dan semuanya berasal dari Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara.¹¹² Oleh karena itu, total volume ekspor pulp larut TPL ke Tiongkok pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 169.521 ton (yaitu ekspor yang sepertinya diklasifikasi salah sebagai BHKP grade kertas dan diterangkan sebagai "*Toba Cell Eucalyptus Pulp*" ditambah dengan ekspor pulp larut yang diklasifikasi dengan kode HS yang benar).

Tiongkok melaporkan bahwa impor pulp larut dari Indonesia pada tahun 2017 mencapai 385.707 ton.¹¹³ Artinya, terdapat selisih antara impor pulp larut dari Indonesia yang dilaporkan di Tiongkok dan estimasi volume ekspor TPL ke Tiongkok adalah, yakni sebanyak 216.816 ton. Volume tersebut diduga sebagai

108 Penyedia data perdagangan komersial tentang ekspor BHKP tingkat pengiriman di Indonesia.

109 UN Comtrade, *Op. cit.*

110 Surat elektronik dari Direktur Keberlanjutan dan Urusan Eksternal APRIL, Lucita Jasmin, dan Wakil Presiden Komunikasi dan Keberlanjutan Asia Pacific Rayon, Cherie Tan, kepada enam LSM (Environmental Paper Network, Greenpeace, Hutan Kita Institute, Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Jikalahari, Woods & Wayside International, dan Yayasan Auriga Nusantara), tertanggal 17 Desember 2018.

111 Penyedia data perdagangan komersial tentang ekspor BHKP tingkat pengiriman di Indonesia.

112 Badan Pusat Statistik, 2019, *Op. cit.*

113 UN Comtrade, *Op. cit.*

jumlah pulp larut yang diekspor oleh pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci ke Tiongkok pada tahun 2017. Angka tersebut merupakan 90% dari 240.000 ton pulp larut yang diproduksi pabrik Pangkalan Kerinci pada 2017 sebagaimana disampaikan APRIL kepada kelompok masyarakat sipil.¹¹⁴

Pada tahun 2018, volume pulp larut yang dilaporkan sebagai ekspor dari Indonesia ke Tiongkok mencapai 137.926 ton, dan menurut data BPS, seluruh pulp tersebut berasal dari Pelabuhan Belawan, yang mengindikasikan bahwa pulp tersebut diekspor TPL.¹¹⁵ Diasumsikan bahwa TPL mengklasifikasi seluruh ekspor pulp larutnya dengan kode HS yang benar pada tahun 2018. Tiongkok melaporkan bahwa volume impor pulp larut dari Indonesia pada tahun 2018 mencapai 573.727 ton.¹¹⁶ Selisih antara impor pulp larut dari Indonesia yang dilaporkan di Tiongkok dan volume ekspor ke Tiongkok yang dilaporkan di Indonesia adalah sebesar 435.801 ton, dan ini diduga sebagai volume pulp larut yang diekspor oleh pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci ke Tiongkok pada tahun 2018. Volume tersebut merupakan 87% dari 500.000 ton yang diproduksi pabrik Pangkalan Kerinci pada 2018 sebagaimana disampaikan APRIL kepada koalisi masyarakat sipil.¹¹⁷

Sejak Januari 2019, sepertinya APRIL mulai melaporkan ekspor pulp larut dari Indonesia dengan kode HS yang tepat, yaitu HS 470200. Berdasarkan data perdagangan, harga ekspor pulp dari Pelabuhan Buatan yang dilaporkan sebagai pulp larut jauh lebih tinggi daripada harga ekspor dari Pelabuhan Buatan yang dilaporkan sebagai pulp grade kertas.

19. Dugaan *under-statement* pendapatan APRIL

Bila APRIL mencatat ekspornya dengan klasifikasi pulp kelas-kertas tapi secara faktual adalah pulp larut, dampaknya tentulah signifikan terhadap pencatatan nilai ekspornya, pun terhadap pelaporan pendapatannya kepada Pemerintah Indonesia. Harga rata-rata ekspor pulp kelas-kertas produksi pabrik milik APRIL di Pangkalan Kerinci jauh di bawah harga impor pulp larut dari Indonesia yang dicatat otoritas Tiongkok tahun 2016–2018.

Data perdagangan resmi Indonesia mencatat harga rata-rata pulp kelas-kertas dari Pelabuhan Buatan (diasumsikan semuanya bersumber dari produksi pabrik milik APRIL di Pangkalan Kerinci) ke Tiongkok masing-masing senilai US\$ 417 per ton tahun 2016, US\$ 458 per ton tahun 2017, dan US\$ 547 per ton tahun 2018.¹¹⁸ Sebagai perbandingan, pulp larut dari Indonesia tercatat di Tiongkok rata-rata seharga US\$ 881 per ton tahun 2016, US\$ 894 per ton tahun 2017, dan US\$ 928 per ton tahun 2018.¹¹⁹

114 Surat elektronik dari Direktur Keberlanjutan dan Urusan Eksternal APRIL, Lucita Jasmin, dan Wakil Presiden Komunikasi dan Keberlanjutan Asia Pacific Rayon, Cherie Tan, kepada enam LSM (Environmental Paper Network, Greenpeace, Hutan Kita Institute, Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Jikalahari, Woods & Wayside International, dan Yayasan Auriga Nusantara), tertanggal 17 Desember 2018.

115 Badan Pusat Statistik, 2019, *Op. cit.*

116 UN Comtrade, *Op. cit.*

117 Surat elektronik dari Direktur Keberlanjutan dan Urusan Eksternal APRIL, Lucita Jasmin, dan Wakil Presiden Komunikasi dan Keberlanjutan Asia Pacific Rayon, Cherie Tan, kepada enam LSM (Environmental Paper Network, Greenpeace, Hutan Kita Institute, Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Jikalahari, Woods & Wayside International, dan Yayasan Auriga Nusantara), tertanggal 17 Desember 2018.

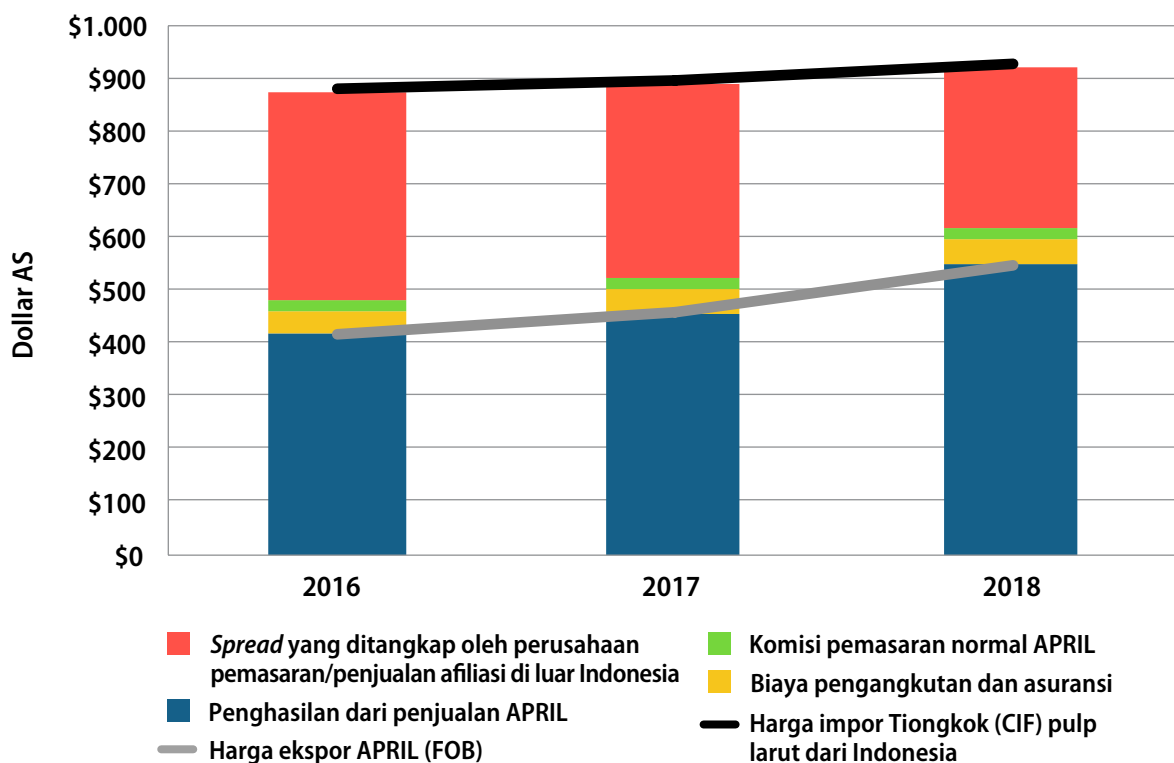
118 Badan Pusat Statistik, 2019, *Op. cit.* Pemeriksaan terhadap data tingkat kiriman yang diperoleh dari penyedia data perdagangan milik untuk ekspor Indonesia mengindikasikan bahwa harga untuk kiriman pulp grade kertas dari kedua eksportir pulp APRIL (PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Intiguna Primatama) tidak terlalu bervariasi, sehingga meniadakan kemungkinan bahwa APRIL melaporkan pulp sebagai pulp grade kertas dengan menetapkan harga lebih tinggi yang mencerminkan harga pasar untuk pulp larut.

119 UN Comtrade, *Op. cit.* Pemeriksaan terhadap data tingkat kiriman yang diperoleh dari penyedia data perdagangan milik untuk impor Tiongkok mengindikasikan bahwa harga rata-rata kiriman pulp larut ke pabrik Sateri dari Indonesia banyak persamaan dengan harga rata-rata secara keseluruhan untuk semua impor pulp larut di Tiongkok dari Indonesia selama periode 2016–2018. Perlu dicatat bahwa dalam “audit” keberlanjutan tahun 2018 oleh Rainforest Alliance, Sateri mengindikasikan bahwa sejak bulan September 2016, pulp larutnya sudah tidak berasal lagi dari PT Toba Pulp. Hal ini berarti sesudah bulan September 2016, seluruh pulp larut yang dikirim ke pabrik Sateri di Tiongkok pasti berasal dari pabrik APRIL, karena pabrik APRIL merupakan satu-satunya produsen pulp larut di Indonesia selain PT Toba Pulp.

Data pengapalan dagang mengindikasikan bahwa seluruh ekspor pulp kelas-kertas bertujuan akhir Tiongkok oleh produsen dalam APRIL Grup, yaitu PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Indiguna Primatama, sepanjang 2016–2018 dikirim kepada pihak berelasi di Makau, Malaysia, dan Singapura.¹²⁰ Pihak terkait yang menerima kiriman ekspor adalah: AP Enterprises (Macao Commercial Offshore) Limited; Alkira Trading (Macao Commercial Offshore) Limited; APRIL Far East (Malaysia) Sdn Bhd; and APRIL International Enterprise Pte Ltd. Yang mana pun di antara perusahaan ini dipakai mengklasifikasi ulang menjadi pulp larut produk yang sebelumnya dicatat sebagai pulp-kertas saat mengekspor dari Indonesia akan memperoleh *spread* yang cukup besar.

Spread yang tampak diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut terhitung masing-masing senilai sekitar US\$ 396 per ton tahun 2016, US\$ 366 per ton tahun 2017, dan US\$ 305 per ton tahun 2018 (lihat Gambar 20). Estimasi *spread* ini dihitung dengan mengurangi harga FOB tahunan rata-rata untuk ekspor

Gambar 20. Estimasi distribusi harga impor per ton di Tiongkok untuk pulp larut hasil produksi APRIL Grup yang diproduksi dan nampaknya di-salah-klasifikasi dari Indonesia, 2016–2018



Sumber: Badan Pusat Statistik dan UN Comtrade. Biaya pengangkutan didasarkan pada data Fastmarkets RISI mengenai biaya angkut tahunan (US\$ per ton) untuk kiriman BHKP dari Indonesia ke Shanghai selama tahun 2016–2018. Biaya asuransi diperkirakan sebesar 0,6% dari harga jual bersih untuk produk yang dikirim.

Catatan: Komisi pemasaran yang normal diasumsikan sebesar 2%. Harga jual APRIL Grup disampaikan dalam FOB, dan harga beli importir dalam CIF, maka penyesuaian dibuat untuk biaya pengangkutan dan asuransi serta komisi pemasaran normal.

¹²⁰ Semua perusahaan ini tercantum sebagai “Kantor Administrasi Penjualan” di Sertifikat Registrasi Lacak Balak PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Indiguna Primatama dari *Programme for the Endorsement of Forest Certification* (PEFC). Sertifikat Registrasi dari PEFC tersebut terbit pada tanggal 25 Mei 2015, diperbaharui pada tanggal 4 Mei 2017, dan habis masa berlakunya pada tanggal 24 Mei 2020 (kemudian diperpanjang hingga 24 Mei 2025). Selain itu, pengaduan terhadap perusahaan di APRIL Grup yang disampaikan kepada Forest Stewardship Council (FSC) pada tanggal 13 Mei 2013 oleh Greenpeace International, WWF Indonesia, dan Rainforest Action Network mencakup dokumentasi mengenai keterikatan APRIL Grup dengan dua pihak yang berkaitan sebagai penerima kiriman ekspor, yaitu: AP Enterprises (Macao) Commercial Offshore Limited dan Alkira Trading (Macao Commercial Offshore) Limited (lihat <http://ic.fsc.org/download.april-group-complaining.1163.htm>). Pengaduan tersebut memicu pemutusan hubungan dengan APRIL Grup dan perusahaan-perusahaan terkait oleh FSC.

pulp kelas-kertas dari pelabuhan Buatan ke Tiongkok dari harga rata-rata CIF untuk impor pulp larut ke Tiongkok dari Indonesia. Estimasi tersebut juga menyesuaikan untuk estimasi biaya pengangkutan dan asuransi¹²¹, dan asumsi komisi pemasaran normal sebesar 2%. Bila *spread* tersebut dikalikan dengan volume produksi pulp larut APRIL pada tahun bersangkutan – yaitu 75,900 ton tahun 2016, 216.186 ton tahun 2017, dan 435,801 ton tahun 2018 – maka nilai keseluruhan menjadi sangat besar: US\$ 30 juta tahun 2016, US\$ 79 juta tahun 2017, dan US\$ 133 juta tahun 2018 (lihat Gambar 21). Digabungkan seluruhnya, estimasi berdasarkan hitung-hitungan ini mengindikasikan pencatatan pendapatan APRIL melalui ekspor pulp larutnya dengan pencatatan lebih rendah (*under-stated*) sekitar US\$ 242 juta (Rp 3,35 triliun¹²²) pada rentang 2016–2018.

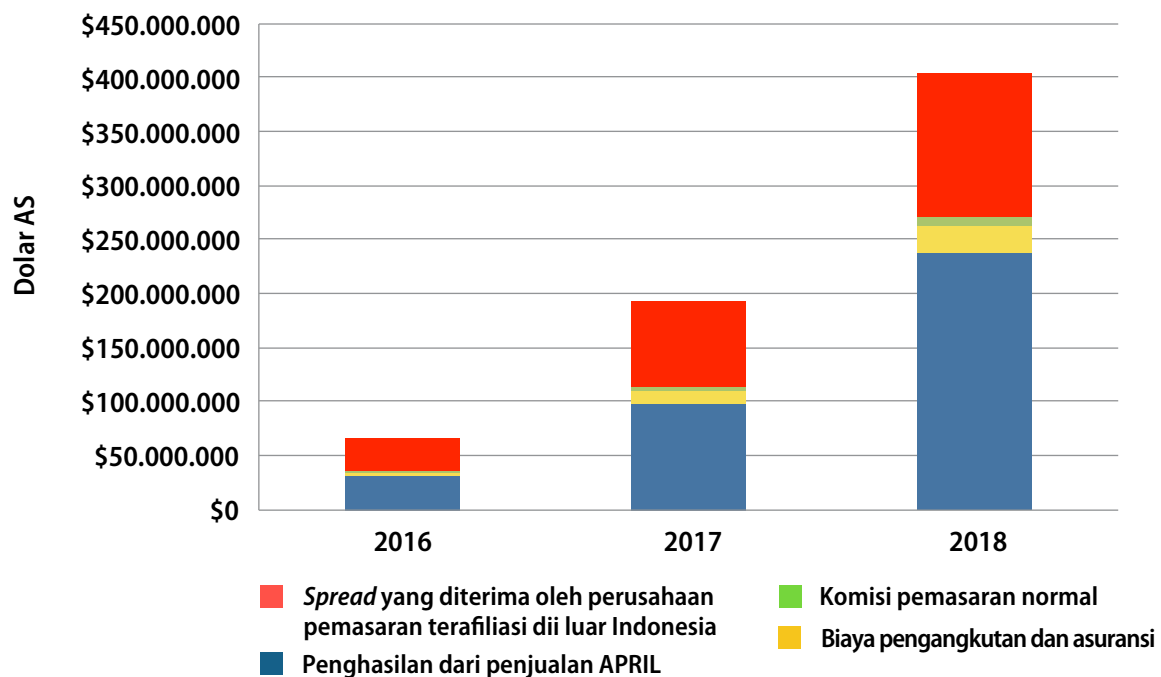
Jumlah *under-stated* tersebut semestinya dapat berupa laba yang dapat dikenai pajak di Indonesia bila saja ekspor pulp larut APRIL dilaporkan sebagai *dissolving grade* dengan kode HS 470200. Secara hipotesis, bila seluruh *under-stated* pada ketiga tahun tersebut dikenai pajak penghasilan badan sesuai tahun berjalan sebesar 25%, otoritas pajak Indonesia berpotensi beroleh tambahan penerimaan pajak sebesar US\$ 60 juta (Rp 838 miliar).

Patut digarisbawahi bahwa penyusun tidak mengetahui secara persis rincian dan tarif pembayaran pajak APRIL Grup atau perusahaan-perusahaan operasionalnya. Perhitungan lebih rinci perihal berapa kewajiban pajak APRIL Grup atau perusahaan-perusahaan operasionalnya perlu dilakukan dengan menganalisis lebih rinci laporan laba-rugi dan status pembayaran pajaknya sesuai aturan fiskal Indonesia.

121 Biaya pengangkutan didasarkan pada data Fastmarkets RISI mengenai biaya angkut tahunan (US\$ per ton) untuk kiriman BHKP dari Indonesia ke Shanghai selama tahun 2016–2018. Biaya asuransi diperkirakan sebesar 0,6% dari harga jual bersih untuk produk yang dikirim.

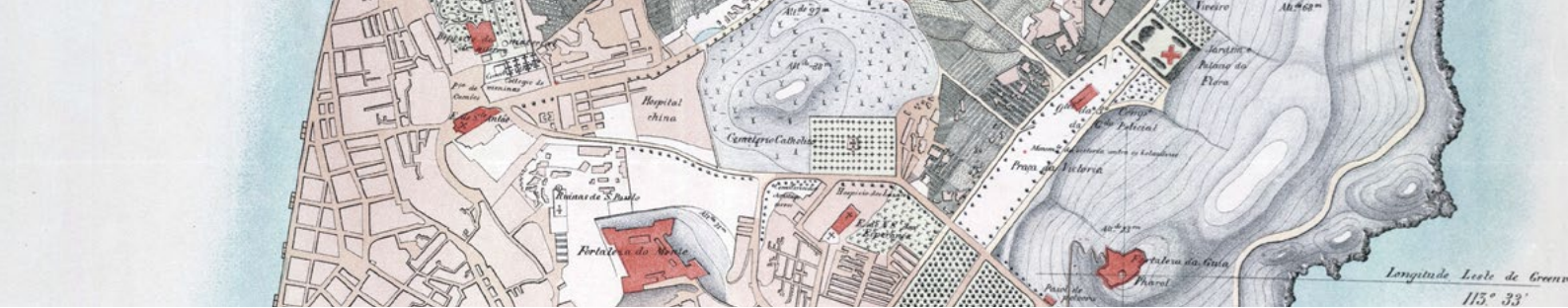
122 Konversi mata uang Dolar AS ke Rupiah didasarkan pada nilai kurs resmi yang dihitung sebagai kurs rata-rata tahunan berdasarkan kurs rata-rata bulanan. Nilai kurs tahunan untuk Rupiah ke Dolar AS diakses dari Statistik Finansial Internasional dari Dana Moneter Internasional. Nilai kurs dari tahun 2007 sampai 2018 diterapkan pada nilai total tahunan untuk pernyataan penghasilan yang terlalu rendah dan potensi kehilangan pajak di tahun yang bersangkutan.

Gambar 21. Estimasi distribusi total nilai pulp larut APRIL Grup yang diekspor dan nampaknya di-salah-klasifikasi dari Indonesia ke Tiongkok, 2016–2018



Sumber: Badan Pusat Statistik dan UN Comtrade. Biaya pengangkutan didasarkan pada data Fastmarkets RISI mengenai biaya angkut tahunan (US\$ per ton) untuk kiriman BHKP dari Indonesia ke Shanghai selama tahun 2016–2018. Biaya asuransi diperkirakan sebesar 0,6% dari harga jual bersih untuk produk yang dikirim. Data tingkat pengiriman dari penyedia data perdagangan komersial untuk volume ekspor pulp.

Catatan: Komisi pemasaran yang normal diasumsikan sebesar 2%. Harga jual APRIL Grup disampaikan dalam FOB, dan harga beli importir dalam CIF, maka penyesuaian dibuat untuk biaya pengangkutan dan asuransi serta komisi pemasaran normal.



BAGIAN V: PERBAIKAN TATAPEMERINTAHAN DEMI MEMBERANTAS KEBOCORAN PAJAK DARI PENGALIHAN KEUNTUNGAN

20. Cakupan masalah bagi Indonesia dan dunia

Secara hipotetis, Pemerintah Indonesia berpotensi memungut pajak sebesar Rp. 1,9 triliun (US\$ 168 juta) selama periode dua-belas tahun antara 2007 dan 2018 apabila tidak terjadi pemindahan pendapatan ke luar negeri melalui dugaan praktik pengalihan keuntungan (*profit shifting*) oleh perusahaan sebagaimana dibahas laporan ini.¹²³ Angka ini bisa jadi hanya sebagian kecil dari potensi penerimaan pajak yang tidak terpungut di semua sektor ekonomi Indonesia selama ini karena praktik pengalihan keuntungan (*profit shifting*), termasuk rekayasa faktur dagang (*trade misinvoicing*) dan penyalahgunaan harga transfer (*abusive transfer pricing*).

Laporan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Wilayah Asia dan Pasifik memperkirakan arus uang keluar dari Indonesia sebagai akibat dari pencatatan nilai faktur penjualan yang terlalu rendah dalam proses ekspor mencapai US\$ 15,5 miliar pada tahun 2016.¹²⁴ Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa Pemerintah Indonesia kehilangan penerimaan pajak sebesar lebih dari US\$ 4,5 miliar akibat dari praktik rekayasa nilai faktur penjualan.¹²⁵

Global Financial Integrity (GFI), salah satu lembaga pemikir (*think tank*) yang bemarkas di Washington, DC, Amerika Serikat memperkirakan bahwa karena praktik rekayasa faktur dagang Pemerintah Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak US\$ 6,5 miliar tahun 2016 – setara 6% total penerimaan pajak tahun tersebut.¹²⁶ Angka ini dihitung GFI berdasarkan kesenjangan faktur dagang barang keluar-masuk Indonesia yang nilainya mencapai US\$ 38,5 miliar, atau 13,7% total perdagangan Indonesia tahun 2016 yang nilainya US\$ 280,2 miliar.¹²⁷ Meski angkanya telah sedemikian besar, namun, menurut GFI, perhitungan tersebut merupakan taksiran rendah karena “belum memasukkan berbagai jenis rekayasa faktur dagang dan aliran dana gelap (*illicit financial flows*) yang tidak muncul pada statistik perdagangan resmi.”

Pada tahun 2018, Prakarsa, satu organisasi riset yang berbasis di Jakarta, memperkirakan akibat praktik rekayasa faktur dagang pada rentang 1989–2017 Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 40,58

123 Perkiraan ini didasarkan pada jumlah pajak yang secara hipotetis dapat dipungut oleh Pemerintah Indonesia apabila tarif PPh badan sebesar antara 25% dan 30% pada periode 2007–2018 dikenakan pada perkiraan penerimaan perusahaan yang sepertinya dilaporkan terlalu rendah melalui praktik pengalihan keuntungan yang dibahas dalam laporan ini. Namun demikian, laporan ini tidak mengklaim bahwa perkiraan tersebut mencerminkan situasi perpajakan atau tarif pajak efektif PT Toba Pulp dan/atau APRIL Grup.

124 Alexey Kravchenko, *Where and how to dodge taxes and shift money abroad using trade misinvoicing: A beginner's guide*. Seri Kertas Kerja Dagang, Investasi, dan Inovasi No. 1, April, 2018, Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Wilayah Asia dan Pasifik (ESCAP), Divisi Dagang, Investasi, dan Inovasi, https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/Where_and_how_to_dodge_taxes_and_shift_money_abroad_using_trade_misinvoicing_A_beginner%E2%80%99s_guide_0.pdf, diakses 28 April 2020. Kajian ini memperingatkan bahwa “estimasi tentang rekayasa nilai faktur penjualan tergantung pada asumsi metodologi, dan analisis sangat terhambat oleh kurang tersedianya data ekspor tingkat transaksi yang mendetail dan data impor terkait [...] Namun, kajian ini bertujuan untuk [...] menyediakan tingkat besaran kasar mengenai rekayasa nilai faktur penjualan [...]”

125 Kravchenko, 2018, *Op. cit.* Lihat peringatan mengenai keterbatasan estimasi ini pada catatan kaki di atas.

126 Global Financial Integrity, 2019, *Op. cit.*

127 Global Financial Integrity, 2019, *Op. cit.*

miliar, hanya dari enam komoditas ekspor unggulan: batubara, tembaga, minyak sawit, karet, kopi, dan krustasea (udang-udangan dan kepiting).¹²⁸ Dari keenamnya, kerugian sektor batubara saja mencapai US\$ 19,64 miliar, yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak US\$ 5,32 miliar.

Praktik pengalihan keuntungan yang diuraikan dalam laporan ini, serta praktik yang mengakibatkan kerugian sebagaimana diperkirakan dan dibahas di atas, merupakan sebagian dari apa yang disebut sebagai *base erosion and profit shifting* (BEPS), yakni strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang mengarah pada "strategi penghindaran pajak yang memanfaatkan celah dan ketidakselarasan aturan pajak untuk secara artifisial memindahkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah atau bahkan bebas pajak."¹²⁹ Dikutip media, Dirjen Pajak pada tahun 2015 memperkirakan Indonesia kehilangan pendapatan Rp 200 triliun akibat penghindaran pajak, sebagian besar pada sektor komoditas.¹³⁰

Demi menyajikan bukti empiris praktik pengalihan keuntungan oleh perusahaan multinasional yang mengerjakan pajak penghasilan badan di Indonesia, satu disertasi doktor (S3) di The Australian National University (ANU) pada tahun 2018 menggunakan data pemberitahuan pajak (SPT) – yang bersifat tertutup – periode 2009–2015.¹³¹ Penelitian Dr. Arnaldo Purba ini, sebagai pelaksanaan tugas belajarnya dari Direktorat Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menguatkan hipotesa bahwa, dibanding skema pembiayaan utang (*debt financing*) penentuan harga transfer berperan lebih dalam praktik pengalihan keuntungan di Indonesia.

Pengalihan keuntungan yang berdampak pada dasar pengenaan pajak sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. BEPS dianggap sebagai persoalannya yang meluas secara internasional dan berdampak pada hampir seluruh negara di dunia. Perkiraan kerugian pemerintah secara global oleh praktik ini berkisar US\$ 100 miliar hingga lebih dari US\$ 600 miliar per tahun.¹³² Betapapun persoalan ini tidak secara proporsional terhadap negara berkembang, sebagaimana para peneliti Dana Moneter Internasional (IMF) tahun 2015 memperkirakan kerugian tahunan negara berkembang sekitar US\$ 200 miliar.¹³³

21. Upaya perbaikan regulasi demi mengendalikan praktik pengalihan keuntungan

Pemerintah Indonesia tampaknya menyadari permasalahan pengalihan keuntungan ini sehingga, sebagaimana banyak negara lainnya, berupaya mengatasinya. Pada Desember 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 213 tahun 2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya,

128 Prakarsa, 2019, "Menguak aliran keuangan gelap di enam komoditas ekspor unggulan Indonesia," *Prakarsa Policy Brief* No. 17. November 2019.

129 OECD. 2019. "Base erosion and profit shifting." Halaman situs web diakses pada tanggal 16 Mei 2019. <https://www.oecd.org/tax/beps/>.

130 Gayatri Suroyo dan Eveline Danubrata, "Indonesia akan Tindak Penghindaran Pajak Korporat," *Reuters*, 23 Februari 2015, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-tax-taxavoidance-idUSKBN0LS05320150224>, diakses 29 April 2020.

131 Arnaldo Purba, 2018, "Penggerusan basis dan pengalihan keuntungan di Indonesia," Disertasi S3 yang diserahkan pada Universitas Nasional Australia, 20 Juli 2018, Dapat dilihat online di situs <https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/148758>, diakses 4 Mei 2020.

132 OECD memperkirakan bahwa BEPS menyebabkan kerugian penerimaan tahunan sebesar US\$ 100 sampai US\$ 240 miliar. *Laporan Investasi Dunia UNCTAD tahun 2015* memperkirakan bahwa kerugian penerimaan tahunan di negara berkembang saja mencapai US\$ 100 miliar. Kertas kerja IMF memperkirakan kerugian tahunan secara keseluruhan mencapai US\$ 600 miliar. Para peneliti dari *Tax Justice Network* memperkirakan bahwa kerugian secara keseluruhan dari grup usaha multinasional AS pada tahun 2012 mencapai US\$660 miliar.

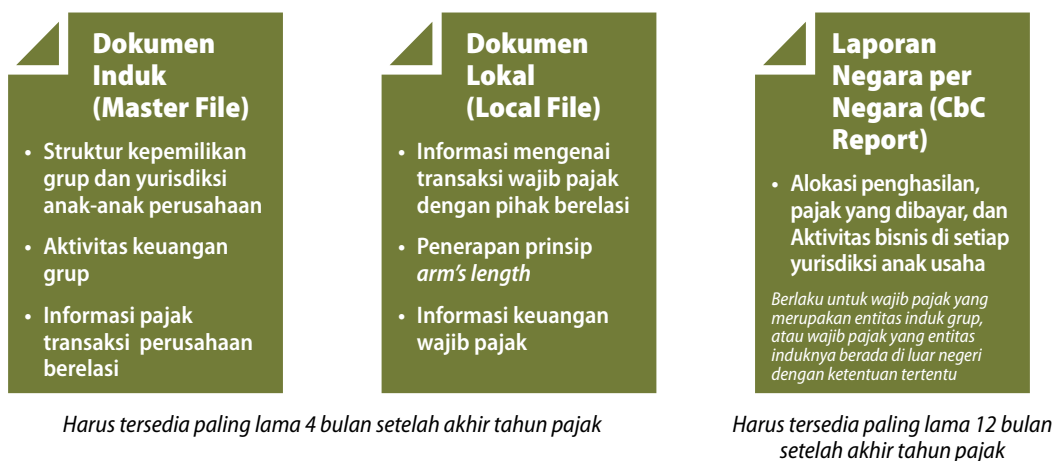
133 Ernesto Crivelli et al., Penggerusan basis, pengalihan keuntungan, dan negara berkembang. Kertas Kerja IMF, WP/15/118, Departemen Urusan Fiskal, Dana Moneter Internasional, Mei 2015, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15118.pdf>, diakses 5 Mei 2020.

atau biasa disebut PMK 213/2016. Pada intinya, peraturan ini menetapkan persyaratan dokumentasi terhadap transaksi wajib pajak berelasi.¹³⁴

Persyaratan tersebut mengikuti standar yang tercantum dalam Action 13 of the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), yang menguraikan pendekatan tiga tingkat dalam pendokumentasian transaksi penentuan harga transfer, yaitu transaksi antara pihak terafiliasi. Pertama, *Master File* (dokumen induk) menyampaikan gambaran umum tentang kegiatan usaha, rantai pasokan, struktur badan hukum, dan pemicu nilai pada grup usaha multinasional. Kedua, *Local File* (dokumen lokal) berfokus pada transaksi grup usaha multinasional di dalam negara penerima laporan, termasuk praktik penentuan harga transfer, hasil, dan analisis perbandingan. Ketiga, *Country-by-Country Report* (CbC – laporan per negara) memuat informasi tentang setiap badan hukum yang tergabung dalam grup usaha multinasional, termasuk penghasilan, laba, pajak penghasilan yang dibayar, aset, dan jumlah pegawai tetap.

Sebelumnya, ruang lingkup dokumentasi penentuan harga transfer yang disyaratkan dalam peraturan di Indonesia hanya spesifik pada kegiatan usaha di Indonesia. Namun, dengan pendekatan tiga tingkat sebagaimana Action 13 of the OECD tersebut, PMK 213/2016 memperluas jangkauan persyaratan dokumentasi sehingga mencakup informasi tentang kepemilikan dan keuangan anak perusahaan lain yang tergabung dalam grup usaha di yurisdiksi di luar Indonesia (lihat Gambar 20). Demi pemenuhan PMK 213/2016, wajib pajak harus melaporkan, berikut informasi lainnya, laba dan pembayaran pajak perusahaan berelasi di yurisdiksi luar negeri bertarif pajak rendah.¹³⁵ Meski dokumentasi itu sendiri belum cukup untuk membasmi penyalahgunaan pengalihan keuntungan, namun hal ini menandakan pengakuan terhadap masalah yang ada dan upaya membangun landasan yang dapat ditindaklanjuti penegakan hukum dan pembaruan kebijakan.

Gambar 22. Persyaratan dokumentasi untuk transaksi afiliasi berdasarkan PMK-213



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. 30 Desember 2016. Lihat juga Deloitte. 2017. "Tanggap penentuan harga transfer Januari 2017: Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016." 11 Januari. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/tax/id-tax-alert-en-jan2017.pdf>.

134 Kementerian Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya," 30 Desember 2016, <https://peraturanpajak.com/2017/01/06/pmk-213pmk-032016/>, diakses 5 Mei 2020.

135 Berdasarkan peraturan tersebut, wajib pajak Indonesia diharuskan untuk menyiapkan informasi ini paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak, dan menyampaikannya (dalam waktu paling lama satu bulan) apabila diminta oleh Auditor Pemerintah.

Selain reformasi oleh negara tertentu seperti yang dilakukan Indonesia, peningkatan perhatian terhadap praktik pengalihan keuntungan ini juga memicu inisiatif global memeranginya. Dengan OECD sebagai penggerak, 80 negara—termasuk Indonesia, Tiongkok dan yurisdiksi surga pajak seperti Makau, Seychelles, British Virgin Islands (BVI)¹³⁶—telah sepakat berbagi informasi melalui kesepakatan *Multilateral Competent Authority Agreement on Exchange of Country-by-Country Reporting* (CbC MCAA). Lebih dari 2.400 pertukaran informasi bilateral telah terjadi sejak kesepakatan ini berlaku pada Juni 2018, termasuk pertukaran informasi antara Indonesia dan Tiongkok.¹³⁷

Perbaikan regulasi Indonesia, sejalan dengan instrumen internasional yang memfasilitasi pertukaran informasi antar-negara, berpotensi menjadi senjata penting Pemerintah Indonesia untuk lebih agresif memerangi praktik pengalihan keuntungan. Meski begitu, masih menjadi pertanyaan apakah dukungan politik dan sumber daya akan memadai bagi upaya penegakan hukum yang fokus pada masalah ini. Walau, telah ada sebelumnya kasus besar sebagai pembelajaran ketika aparat penegak hukum menuntut perusahaan raksasa atas sangkaan tindak pidana terkait praktik pengalihan keuntungan, yaitu perusahaan sawit PT Asian Agri, yang tahun 2012 divonis bersalah atas tuduhan penggelapan pajak (lihat Kotak 4).

Kotak 4. Kasus Asian Agri

Meski Indonesia kehilangan triliunan rupiah akibat praktik penyelewengan pengalihan keuntungan, namun penegakan hukum terhadap kasus-kasus sejenis belum banyak. Satu kasus menonjol sejauh ini adalah kasus penggelapan pajak oleh PT Asian Agri, sebuah perusahaan produsen minyak sawit afiliasi Royal Golden Eagle Grup. Pada Desember 2012, dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia memvonis mantan manajer perpajakan Asian Agri bersalah atas tuduhan “mengisi data palsu kewajiban perusahaan berturut-turut selama empat tahun terhadap sejumlah 14 perusahaan, hingga tidak atau kurang membayar kewajiban pajak. . .”¹³⁸

Artikel dari tahun 2014 di *Bulletin for International Taxation* meringkas kasus tersebut sebagai berikut:

[Asian Agri] mendirikan empat perusahaan cangkang di Hong Kong, satu di Makau dan satu di British Virgin Islands. Produk yang dijual kepada pembeli akhir pertama melalui perusahaan perantara di Hong Kong, yang kemudian dijual ke perusahaan di Makau atau British Virgin Islands. Harga diatur agar keuntungan perusahaannya yang di Indonesia berkurang dan laba yang lebih tinggi dialihkan ke wilayah yurisdiksinya perusahaan perantara. Pada kasus ini, hukuman dijatuhkan berkaitan dengan pencatatan nilai faktur penjualan yang terlalu rendah.¹³⁹

136 Ulrika Lomas, “BVI, Seychelles akan Tukar Laporan CbC Secara Otomatis,” *Tax-News*, 13 September 2019, https://www.taxnews.com/news/BVI_Seychelles_To_Automatically_Exchange_CbC_Reports_97313.html, diakses 6 Mei 2020.

137 Organisation of Economic Development and Co-operation (OECD), “Country-by-Country exchange relationships,” Situs Web OECD, <https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm>, diakses 5 Mei 2020.

138 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2239 K/PID.SUS/2012*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2dec38361ab4193b649785cf9c668f52.html>, diakses 24 April 2020, hlm 5; Dharmasaputra, Metta, *Saksi Kunci*, Tempo Publishing, 2013; *Mongabay*, “Gelapkan Pajak, Asian Agri Dihukum Denda Rp 2,5 Triliun,” 28 Desember 2012, <https://www.mongabay.co.id/2012/12/28/gelapkan-pajak-asian-agri-dihukum-denda-rp25-triliun/>.

139 Adrianto Dwi Nugroho, “The Asian Agri case (2012): the giant goes berserk,” *Bulletin for International Taxation*, August 2014.

Dakwaan, jaksa menyebut, "... Akibat transaksi penjualan ekspor dengan cara *under invoicing* tersebut adalah laba yang dilaporkan oleh perusahaan di Indonesia menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya sehingga pajak terutang yang dilaporkan menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya."¹⁴⁰ Setelah berkali banding, Mahkamah Agung memutus bersalah Asian Agri dan diperintahkan membayar denda Rp 2,5 triliun (sekitar US\$ 205 juta) kepada Pemerintah Indonesia, sekitar dua kali dugaan penggelapan pajak perusahaan sepanjang 2002–2005, ditambah pajak terutang Rp 1,9 triliun (sekitar US\$ 156 juta).¹⁴¹

Pengendali utama Asian Agri adalah Sukanto Tanoto dan anggota keluarganya, yang juga merupakan pengendali PT Toba Pulp, DP Macao, Sateri, dan perusahaan lainnya di bawah APRIL Grup.

22. Memperbaiki kinerja ekspor sambil meningkatkan kewaspadaan Instansi Kepabeanan

Bukti-bukti penentuan harga transfer (*transfer pricing*) semata belum tentu memadai mengenali kejadian sebagaimana diurai laporan ini. Tanpa dukungan pengawasan kepabeanan otoritas pajak akan kesulitan mengetahui apakah TPL atau APRIL mengekspor pulp larut dengan pembukuan harga yang lebih rendah dari harga semestinya.

Sayangnya, kebijakan dan peraturan saat ini cenderung melonggarkan prosedur kepabeanan sebagai upaya mengurangi waktu-tunggu pengapalan di pelabuhan. Kebijakan memudahkan prosedur ekspor sebenarnya dapat dipahami sebagaimana pemerintah sedang berupaya keras menekan defisit perdagangan sembari menarik minat investasi asing. Namun demikian, pelonggaran pengawasan kepabeanan bisa jadi berdampak sebaliknya. Bila faktur dagang tidak diverifikasi dengan tertib guna mendeteksi pengurangan catatan nilainya (*under-value*), hal ini akan berdampak negatif terhadap neraca perdagangan dan dasar pengenaan pajak. Pengalaman APRIL Grup dapat memberikan contoh yang berguna.

Pada Februari 2017, beberapa perusahaan terafiliasi APRIL Grup beroleh sertifikat Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator* – AEO) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbekal sertifikat ini kedua perusahaan pengekspor pulp produksi APRIL di Riau – yakni PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Intiguna Primatama – diperbolehkan melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap ekspornya.¹⁴² Saat penyerahan sertifikat tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengatakan, "... Jadi tidak usah dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen lagi karena kita sudah memverifikasinya [perusahaan yang diberikan sertifikat AEO] selama berbulan-bulan, jadi [sertifikat] tidak akan disalahgunakan."¹⁴³ Padahal, sertifikat AEO ini diberikan hanya berselang beberapa bulan setelah APRIL Grup diduga memulai praktik pengalihan keuntungan sebagaimana dibahas dalam laporan ini.

Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk memperbaiki kinerja ekspor. Untuk itu, Kementerian Keuangan mengembangkan sistem informasi yang ditujukan mengurangi biaya ekspor,

140 Putusan Mahkamah Agung, 2012, *Op. cit.*; Dharmasaputra, 2013, *Op. cit.*

141 *Jakarta Post*, "Pengadilan Pajak Tolak Banding Asian Agri," 6 November 2014, <https://www.thejakartapost.com/news/2014/11/06/tax-court-rejects-asian-agri-s-appeal.html>.

142 Antara, 2017, *Op. cit.*

143 Antara, 2017, *Op. cit.*

mempersingkat waktu pemrosesan, dan meningkatkan kualitas layanan. Pemerintah Indonesia telah berbuat banyak, termasuk membangun dan memberlakukan *Indonesia National Single Window* (INSW)¹⁴⁴ dan *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA).¹⁴⁵ Kedua sistem ini berhasil mempersingkat waktu-tunggu pengapalan dan mengurangi biaya ekspor, namun masih perlu dikembangkan sehingga, misalnya dengan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence* – AI), bisa mendeteksi praktik rekayasa faktur dagang dan praktik pengalihan keuntungan yang lain. Pengintegrasian data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan kementerian/lembaga negara terkait juga akan memperbaiki pengawasan ekspor. Data produksi dari Kementerian Perindustrian, misalnya, dapat diintegrasikan ke dalam portal CEISA, sehingga mengurangi peluang eksportier memanipulasi kode HS.

144 Kementerian Keuangan, “*Indonesia National Single Window*,” Pemerintah Indonesia, 2020, <https://www.insw.go.id/index.php>, diakses 5 Mei 2020.

145 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “*Customs-Excise Information System and Automation*,” Situs web DJBC, Pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, <https://customer.beacukai.go.id/>, diakses 5 Mei 2020.



BAGIAN VI: KESIMPULAN

23. Rangkuman temuan

Laporan ini menyajikan dugaan pengaturan pengalihan keuntungan yang tampaknya dilakukan TPL dan APRIL Grup dengan memindahkan pencatatan sejumlah besar laba produksi pulp larut di Indonesia ke perusahaan afiliasinya di negara lain, termasuk ke satu negara surga pajak. Dengan menganalisa kesenjangan data perdagangan dan berbagai laporan perusahaan dan afiliasinya, laporan ini memperlihatkan bahwa ekspor pulp larut TPL dan APRIL Grup tampaknya di-salah-klasifikasikan sebagai pulp kelas-kertas dan diekspor dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar untuk pulp larut. Pada rentang 2007–2016, dugaan praktik pengalihan keuntungan TPL berakibat pencatatan laporan pendapatannya lebih rendah (*under-statement*) sekitar US\$ 426 juta (Rp 4,23 triliun). Secara mirip, sepanjang 2016–2018, APRIL Grup diduga juga mempraktikkan pengalihan keuntungan dengan perkiraan pencatatan pendapatan lebih rendah (*under-statement*) sekitar US\$ 242 juta (Rp 3,35 triliun).

Secara hipotetis, apabila terhadap nilai tersebut dikenai pajak sesuai tarif pajak penghasilan badan perusahaan, otoritas keuangan Indonesia berpotensi memungut sebanyak US\$ 108 juta (Rp 1,07 triliun) dari TPL dan US\$ 60 juta (Rp 838 miliar) dari APRIL Grup. Namun begitu, perlu digarisbawahi bahwa penyusun laporan ini tidak mengetahui secara persis rincian dan tarif pembayaran pajak TPL atau APRIL Grup dan perusahaan-perusahaan operasionalnya, dan kurs pajak efektif perusahaan seringkali jauh lebih rendah daripada kurs pajak nominal korporat.¹⁴⁶ Perhitungan lebih rinci perihal berapa kewajiban perusahaan-perusahaan tersebut, sekiranya mereka tidak melakukan pengalihan keuntungan sebagaimana dipaparkan laporan ini, perlu dilakukan dengan menganalisis lebih rinci laporan laba-rugi dan status pembayaran pajaknya sesuai aturan fiskal Pemerintah Indonesia.

Sebagaimana disampaikan di atas, perusahaan tak jarang memiliki alasan bisnis yang kuat melakukan pengalihan keuntungan antar-perusahaan afiliasi, juga untuk membukukan laba di yurisdiksi bertarif pajak rendah. Pada banyak kasus, cara-cara itu sah secara hukum nasional maupun persetujuan internasional. Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak dan perundangan memeriksa secara cermat apakah dugaan pengalihan keuntungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan laporan ini bersamaan ketika Pemerintah Indonesia menghadapi membesarnya defisit perdagangan dan kekurangan anggaran, dan karenanya berupaya keras menggenjot penerimaan negara demi membiayai program kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur yang sedemikian ambisius. Bila Direktorat Jenderal Pajak memutuskan TPL dan/atau APRIL Grup telah melaporkan lebih

¹⁴⁶ Berdasarkan kajian terhadap beberapa negara terpilih di wilayah Asia Pasifik pada tahun 2015, maka kurs pajak rata-rata efektif Indonesia diestimasi sebesar 23,9% untuk investasi dalam negeri tanpa insentif, dan 11,4% untuk investasi yang memenuhi syarat untuk insentif pajak. Wiedemann, Verena dan Katharina Finke. 2015. "Taxing investments in the Asia-Pacific region: The importance of cross-border taxation and tax incentives." ZEW Discussion Papers No. 15-014. Leibniz Centre for European Economic Research (ZEW). <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/107420/1/818760338.pdf>.

rendah (*under-stated*) penghasilan kena pajaknya, pungutan pajak terhadap hal ini akan menambah secara signifikan penerimaan pajak sekaligus mengirim pesan kuat ke sektor bisnis di Indonesia.¹⁴⁷ Kasus TPL dan/atau APRIL Grup ini dapat menjadi pendorong bagi otoritas pajak dan masyarakat sipil untuk mengawasi perusahaan lainnya yang bisa jadi melakukan pengalihan keuntungan demi menghindari kewajiban pajak. Perhatian yang lebih cermat terhadap praktik-praktik pengalihan keuntungan berpotensi meningkatkan efektivitas pemungutan pajak secara signifikan dan juga mengurangi pelarian keuntungan yang dihasilkan di Indonesia ke yurisdiksi di luar negeri bertarif pajak lebih rendah.

Perihal TPL, patut diingat bahwa perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan publik diharuskan membuka informasi mengenai operasi dan aktivitasnya sebagai bahan pertimbangan investor dan pemegang saham.¹⁴⁸ Artinya, aturan ini mengharuskan perusahaan publik melaporkan secara akurat dan terperinci produk yang diproduksi dan dijualnya, dan melaporkan harga produknya secara akurat, baik pada dokumen pengapalan maupun pada neraca untuk diaudit. Dengan demikian temuan laporan ini perlu didalami OJK untuk menentukan apakah TPL telah melaporkan secara memadai data dan informasi terkait produksi dan penjualan pulp larutnya sepanjang periode yang dianalisa tersebut.

Lebih jauh, praktik pengalihan keuntungan yang tampak dilakukan produsen pulp larut di Indonesia memantik pertanyaan mendasar mengenai bagaimana penerimaan dari eksploitasi sumber daya alam didistribusikan di Indonesia, mengingat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bumi dan air dan kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Akan sangat sulit bagi Indonesia memenuhi amanat tersebut bila praktik seperti yang disajikan laporan ini dibiarkan terus berlanjut.

147 Sejak tahun fiskal 2008 dan seterusnya, undang-undang pembatasan otoritas perpajakan Indonesia untuk menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar adalah lima tahun, atau 10 tahun untuk tindak pidana. (Lihat Deloitte. 2018. "Indonesia Tax Guide 2018." 31 Agustus 2018. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/international-business-support/deloitte-cn-ibs-indonesia-tax-guide-2018-en-190227.pdf>.)

148 Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik," Pemerintah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Tertanggal 16 Desember 2015, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/pojk-31-keterbukaan-atas-informasi-fakta-material-oleh-emiten-perusahaan-publik/SALINAN-POJK%20Keterbukaan%20Informasi%20Emiten.pdf>, diakses 4 Mei 2020.



BAGIAN VII: REKOMENDASI

24. Rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang menerbitkan laporan menyampaikan rekomendasi berikut kepada Pemerintah Indonesia:

1. Direktorat Jenderal Pajak mengaudit laporan keuangan PT Toba Pulp Lestari Tbk untuk memastikan apakah perusahaan tersebut melaporkan penghasilan kena pajaknya secara jujur dan akurat, dan mematuhi peraturan perundang-undangan, terutama perihal penentuan harga transfer dan penerbitan faktur perdagangan.
2. Direktorat Jenderal Pajak mengaudit laporan keuangan perusahaan-perusahaan APRIL Grup, baik perusahaan induk, operasional, hingga pemasaran, yang terlibat dalam produksi hingga ekspor pulp larut untuk memastikan apakah penghasilan kena pajaknya telah dilaporkan secara jujur dan akurat, mematuhi peraturan perundang-undangan, terutama perihal penentuan harga transfer dan penerbitan faktur perdagangan.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memeriksa kembali laporan keuangan teraudit dan laporan lainnya yang disampaikan PT Toba Pulp Lestari Tbk untuk memastikan apakah perusahaan tersebut telah menyampaikan secara memadai seluruh informasi dan fakta yang diharuskan disampaikan kepada investor dan pemegang sahamnya.
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelidiki apakah PT Toba Pulp Lestari Tbk dan APRIL Grup, termasuk perusahaan induk, operasional, hingga pemasarannya, mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur klasifikasi ekspor pulp dengan kode HS yang benar serta pelaporan harga yang mencerminkan nilai sebenarnya produk yang dipaparkan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji apakah pengawasan ekspor pulp larut telah memadai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, juga apakah dugaan praktik pengalihan keuntungan (*profit shifting*) yang diulas laporan ini berakibat adanya kerugian fiskal bagi Pemerintah Indonesia.
6. Kementerian Keuangan dan KPK melakukan kajian bersama multi-sektoral untuk mengidentifikasi apakah perusahaan-perusahaan di berbagai sektor sumber daya alam di Indonesia mempraktikkan rekayasa faktur dagang (*trade misinvoicing*) dan/atau penyalahgunaan skema harga transfer demi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). 2020. "Pinnacle Company Pte. Ltd." Business Profile. Pemerintah Singapura. 17 Februari 2020.

Akbar, Sofyan. 2019. "Walhi Sumut: Konflik agraria jadikan masyarakat sebagai korban." *Tribun Medan*, 28 November 2019. <https://medan.tribunnews.com/2019/11/28/walhi-sumut-konflik-agraria-jadikanmasyarakat-sebagai-korban>.

Akhlas, Adrian Wail. 2020. "World Bank calls for stronger tax collection to bring 115 million Indonesians into middle class." *Jakarta Post*, 31 Januari 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/01/31/world-bank-calls-for-stronger-tax-collection-to-bring-115-million-indonesians-into-middle-class.html>.

Akitoby, Bernardin, Anja Baum, Clay Hackney, Olamide Harrison, Keyra Primus and Veronique Salins. 2019. "Tax Revenue Mobilization Episodes in Developing Countries." *Policy Design and Practice* 3 (1): 1–29. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25741292.2019.1685729>.

Alecci, Scilla. 2017. "Leaked records reveal offshore's role in forest destruction." *International Consortium of Investigative Journalists*. 8 November 2017. <https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/leaked-records-reveal-offshores-role-in-forest-destruction/>.

Antara. 2017. "4 perusahaan APRIL raih sertifikasi AEO dari Bea Cukai." *Antarnews.com*. 21 Februari 2017. <https://riau.antaranews.com/berita/86322/4-perusahaan-april-raih-sertifikasi-aeo-dari-bea-cukai>.

APRIL. 2018. Sustainability Report 2017. Singapura: Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. https://www.aprilasia.com/images/pdf_files/sr/APRIL%20SR%202017_Interactive.pdf.

APRIL Group. 1998. "APRIL switches part of production to dissolving pulp and increases paper pulp price." *Rilis Pers. PR Newswire*, 26 Maret 1998.

Badan Pusat Statistik. 2019a. "Data ekspor 2007–2018 untuk HS Code 4703290000 (Chemical wood pulp, soda, other than dissolving grades, bleached, non con)." *Pemerintah Republik Indonesia*.

Badan Pusat Statistik. 2019b. "Data ekspor 2007–2018 untuk HS Code 4702000000 (Chemical wood pulp, dissolving grades)." *Pemerintah Republik Indonesia*.

Borsuk, Richard. 2002. "Toba Pulp to dismantle Indonesian rayon plant." *Wall Street Journal*, 5 Juli 2020.

Bracell Limited. 2016. "(1) Proposed privatisation of Bracell Limited by BHL Limited by way of a scheme of arrangement under Section 99 of the Companies Act of Bermuda and (2) Proposed withdrawal of listing of Bracell Limited." *Dokumen diterbitkan Bersama oleh Bracell Limited dan BHL Limited*. 30 Agustus 2016. <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2016/0829/ltm20160829301.pdf>.

Changing Markets Foundation, WALHI Jawa Barat, Ecologistas en Acción, and Ethical Consumer. 2017. "Dirty Fashion: How Pollution in the Global Textiles Supply Chain is Making Viscose Toxic." Juni. http://changingmarkets.org/wpcontent/uploads/2017/06/CHANGING_MARKETS_DIRTY_FASHION_REPORT_SPREAD_WEB.pdf.

- CNN Indonesia. 2019. "Pemerintah ubah pengawasan di 119 kawasan berikat jadi online." 20 September 2019. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190919173121-532-432046/pemerintah-ubahpengawasan-di-119-kawasanberikat-jadi-online>.
- Cobham, Alex. 2005. "Taxation Policy and Development." OCGG Economy Analysis Number 2. Oxford: The Oxford Council on Good Governance. http://taxjustice.net/cms/upload/pdf/OCGG_-_Alex_Cobham_-_Taxation_Policy_and_Development.pdf.
- Crivelli, Ernesto, Ruud de Mooij, and Michael Keen. 2015. "Base Erosion, Profit Shifting, and Developing Countries." IMF Working Paper WP/15/118 (May). Washington, DC: International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15118.pdf>.
- Cuddy, Alice. 2017. "'Give us back our land': Paper giants struggle to resolve conflicts with communities in Sumatra." Mongabay, 9 Juni 2017. <https://news.mongabay.com/2017/06/give-us-back-our-land-papergiants-struggle-to-resolve-conflicts-withcommunities-in-sumatra/>.
- Deloitte. 2018. "Indonesia Tax Guide 2018." 31 Agustus 2018. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/international-business-support/deloitte-cn-ibs-indonesia-tax-guide-2018-en-190227.pdf>.
- Deloitte. 2017. "Transfer Pricing Alert January 2017: Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.03/2016." Jakarta: Deloitte Tax Solutions. 11 Januari 2017. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/tax/id-tax-alert-en-jan2017.pdf>.
- Detik Finance. 2007. "Pinnacle Company incar saham Toba Pulp Lestari." 19 Oktober 2007. <https://finance.detik.com/bursa-danvalas/d-842647/pinnacle-company-incar-saham-toba-pulp-lestari>.
- Dharmasaputra, Metta. 2007. *Saksi Kunci*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). 2020. "Profil Perusahaan PT Toba Pulp Lestari Tbk." Profil Perusahaan. Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. 17 Februari 2020.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2020 "Customs-Excise Information System and Automation." DJBC website. Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Keuangan. <https://customer.beacukai.go.id/>.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2020. "AEO." DJBC website. Government of Indonesia. Ministry of Finance. Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Keuangan. Diakses pada 20 Februari 2020. <http://kwbackepri.beacukai.go.id/aeo/>.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dirketur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa." Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Keuangan. 11 November 2011. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-04/PER%20-%2032.PJ_.2011%20tg%20Perubahan%20PER43.PJ_.2010%20tg%20Penerapan%20Prinsip%20Kewajaran%20dan%20Kelaziman%20Usaha%20.pdf.
- ETCN. 2020. "China HS Code Search." <https://hs.e-to-china.com/ks-470200.html>.
- Fastmarkets RISI. 2019. "World Pulp Annual Historical Data 2018." Burlington, Massachusetts.

Gaworecki, Mike. 2014. "Dissolving pulp: the threat to Indonesia's forests you've probably never heard of." Mongabay, 23 September 2014. <https://news.mongabay.com/2014/09/dissolving-pulp-the-threat-to-indonesias-forests-youve-probably-never-heard-of/>.

Global Financial Integrity. 2020. "Trade Misinvoicing." Washington, DC. Diakses pada 20 Februari 2020. <https://www.gfintegrity.org/issue/trademisinvoicing/>.

Global Financial Integrity. 2019. "Indonesia: Potential Revenue Losses Associated with Trade Misinvoicing." Washington, DC. <https://gfintegrity.org/report/indonesia-potential-revenue-losses-associated-with-trade-misinvoicing/>.

Gunawan, Apriadi. 2012. "Paper mill deploys force in land conflict." Jakarta Post, 22 September 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2012/09/22/paper-mill-deploys-force-land-conflict.html>.

Harahap, Rizal. 2020. Jokowi officiates Asia Pacific Rayon plant in Riau. Jakarta Post. 22 Februari 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/02/22/jokowi-officiates-asia-pacific-rayon-plant-in-riau-islands.html>.

International Accounting Standards Board. 2019. "IAS 24 Related Party Disclosures." IFRS Foundation website. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-24-related-party-disclosures/>.

Jakarta Post. 2014. "Tax Court rejects Asian Agri's appeal." 6 November 2014. <https://www.thejakartapost.com/news/2014/11/06/taxcourt-rejects-asian-agri-s-appeal.html>.

Karokaro, Ayat S. 2017. "Berkonflik lahan dengan Toba Pulp Lestari, Ketua Adat Tungko Ni Solu terjerat hukum." Mongabay, 10 Mei 2017. <https://www.mongabay.co.id/2017/05/10/berkonflik-lahan-dengantoba-pulp-lestari-ketua-adat-tungko-ni-solu-terjerat-hukum/>.

Katadata. 2020. "Investigasi: Akal-akalan Toba Pulp melipat untung ekspor bubuk kayu." 7 Februari 2020. <https://katadata.co.id/telaah/2020/02/07/investigasi-akal-akalan-toba-pulp-melipat-untung-ekspor-bubur-kayu/0>.

KBR. 2020. "Dugaan manipulasi dokumen ekspor Toba Pulp Lestari." 5 Februari 2020. https://kbr.id/berita/022020/dugaan_manipulasi_dokumen_ekspor_toba_pulp_lestari_/102174.html.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Indonesia's Timber Legality Information System (Sistem Informasi Legalitas Kayu, or SILK). Pemerintah Republik Indonesia. <http://silk.dephut.go.id/>.

Kementerian Keuangan. 2016. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pemerintah Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf>.

Kementerian Keuangan. 2016. "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya." Pemerintah Republik Indonesia. 30 Desember 2016. <https://peraturanpajak.com/2017/01/06/pmk-213pmk-032016/>.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. "Basis Data Geospasial Linkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019." Pemerintah Republik Indonesia. <http://appgis.dephut.go.id/appgis/download/1.5.%20Buku%20BASIS%20DATA%20SPASIAL%20KEHUTANAN/BUKU%20BASIS%20DATA%20GEOSPASIAL%202019.pdf>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. "PT Toba Pulp Lestari Tbk – Laporan Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu." Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. "PT Toba Pulp Lestari Tbk – Laporan Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu." Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. "PT Toba Pulp Lestari Tbk – Laporan Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu." Pemerintah Republik Indonesia.
- Kontan Harian. 2015. Riau Andalan Bikin Produk Pulp Larut. 25 Februari 2015. <https://kemenperin.go.id/artikel/11218/Riau-Andalan-Bikin-Produk-Pulp-Larut>.
- KPMG. 2019. "Corporate tax rates table." KPMG International website. <https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-table.html>.
- Kementerian Perdagangan. 2016. Peraturan Menteri Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Definisi Ekspor Produk Hasil Hutan. Pemerintah Republik Indonesia. 22 Desember 2016. <http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20170228/54663a489f92d767098cbe2eb0df4eb7.pdf>.
- Kravchenko, Alexey. 2018. "Where and How to Dodge Taxes and Shift Money Abroad Using Trade. Misinvoicing: A Beginner's Guide." Trade, Investment, and Innovation Working Paper Series No. 1. Bangkok: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). Trade, Investment, and Innovation Division. https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/Where_and_how_to_dodge_taxes_and_shift_money_abroad_using_trade_misinvoicing_A_beginner%E2%80%99s_guide_0.pdf.
- Lansdell, O. 2017. The outlook for dissolving wood pulp supply and demand. Hawkins Wright Ltd. Mei 2017. https://cellulosefibres.eu/wp-content/uploads/2019/04/LansdellOliver_Abstract.pdf.
- Lembaga National Single Window. 2020. "Indonesia National Single Window." Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian Keuangan. <https://www.insw.go.id/index.php>.
- Lomas, Ulrika. 2019. "BVI, Seychelles to automatically exchange CbC reports." Tax-News, 13 September 2019. https://www.tax-news.com/news/BVI_Seychelles_To_Automatically_Exchange_CbC_Reports____97313.html.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012. No. 2239 K/PID.SUS/2012. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2dec38361ab4193b649785cf9c668f52.html>.
- Marini, Marco, Robert Dipplesman and Michael Stanger. 2018. "New Estimates for Direction of Trade Statistics." IMF Working Paper WP/18/16 (January). Washington, DC: International Monetary Fund. <https://www.imf.org/~media/Files/Publications/WP/2018/wp1816.ashx>.

Miao, Guannan and Fabienne Fortanier. 2017. "Estimating Transport and Insurance Costs of International Trade." OECD Statistics Working Papers 2017/04. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/8267bb0f-en.pdf>.

Nugroho, Adrianto Dwi. 2014. "The Asian Agri Case (2012): The Giant Goes Berserk." Bulletin for International Taxation. 68 (8): 445-450. Agustus. https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Journal-Articles/Bulletin-for-International-Taxation/collections/bit/html/bit_2014_08_id_1.html.

Organisation of Economic Development and Co-operation (OECD). 2020. "Country-by-Country exchange relationships." OECD website. Diakses pada 24 Januari 2020. <https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm>.

Organisation of Economic Development and Co-operation (OECD). 2019. "Base erosion and profit shifting." OECD website. Diakses pada 16 Mei 2019. <https://www.oecd.org/tax/beps/>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik," Pemerintah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Tertanggal 16 Desember 2015, diakses 4 Mei 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/pojk-31-keterbukaan-atas-informasi-fakta-material-oleh-emiten-perusahaan-publik/SALINAN-POJK%20Keterbukaan%20Informasi%20Emiten.pdf>.

Pemerintah Republik Indonesia. 2018. "Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." 5 Maret 2018.

Pemerintah Republik Indonesia. 2008. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan." 23 September 2008.

Prakarsa. 2019. "Highlighting Illicit Financial Flow of Indonesia's Top Six Export Commodities." Policy Brief No. 17 (November). Jakarta: Prakarsa.

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). 2015. "PT Riau Andalan Pulp and Paper." PEFC Certification – Chain of Custody. AJAEU/PEFC/15/00068. Tanggal pendaftaran asli 25 Mei 2015. Tanggal kedaluwarsa 4 Mei 2020.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2020a. "Response – PT Toba Pulp Lestari Tbk." Medan, Indonesia. Pengumuman perusahaan. 3 Februari 2020. <https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2020/02/Response-TPL-3-Feb-2020.pdf>.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2020b. "Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek." Medan, Indonesia. Nomor pendaftaran korporasi 003/TPL/MDN/I/20(EReport). 8 Januari 2020. https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202001/445253b404_fe51cb1b20.pdf.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2020c. "Penjelasan atas Pemberitaan Media Massa." 5 Februari 2020. https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202002/43d7216f94_a75786ea1f.pdf.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2019a. Laporan Tahunan 2018 [termasuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 and 2017 dan Laporan Auditor Independen]. Medan, Indonesia. <https://www.tobapulp.com/wpcontent/uploads/2019/05/LAPORAN-TAHUNAN-INRU-2018.pdf>.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2019b. "Announcement – PT Toba Pulp Lestari switched to producing pulp dissolving grade." Pengumuman perusahaan. Medan, Indonesia. 24 April 2019. <https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2019/04/Announcement-24-April-2019.pdf>.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2018a. Laporan Tahunan 2017 [termasuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 and 2016 dan Laporan Auditor Independen]. Medan, Indonesia. <https://www.tobapulp.com/wpcontent/uploads/2017/07/TPL-AR-2016-Report-s.pdf>.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2018b. "Announcement – PT Toba Pulp Lestari switched to producing paper pulp." Pengumuman perusahaan. Medan, Indonesia. 10 Mei 2018. <https://www.tobapulp.com/wpcontent/uploads/2018/05/Announcement.pdf>.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2018c. "Surat kepada Direktur Bursa Efek Indonesia dari Anwar Lawden, S.H." Pengumuman perusahaan. Medan, Indonesia. 11 Mei 2018. https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201805/e4f56b8448_e1aa3b29b1.pdf.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2017a. Laporan Tahunan 2016 [termasuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2016 and 2015 dan Laporan Auditor Independen] Medan, Indonesia. https://www.tobapulp.com/wpcontent/uploads/2017/05/INRU_Annual-Report_2015.pdf.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2017b. "Keterbukaan informasi kepada pemegang saham mengenai rencana transaksi material dan transaksi afiliasi PT Toba Pulp Lestari Tbk." Medan, Indonesia. Pengumuman perusahaan. 22 November 2017. <https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2019/01/Keterbukaan-Information-Transaksi-Material-dan-Afiliasi-Perjanjian-Pinjam-Meminjam-22-November-2017.pdf>.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2017c. "Surat kepada Direktur Bursa Efek Indonesia dari Vinod Kesavan." Medan, Indonesia. 3 Maret 2017. https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201703/c623e30904_dd00a72ac7.pdf.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2016. Laporan Tahunan 2015 [termasuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 and 2014 dan Laporan Auditor Independen]. Medan, Indonesia. https://www.tobapulp.com/wpcontent/uploads/2017/05/INRU_Annual-Report_2015.pdf.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2015. Laporan Tahunan 2014 [termasuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 and 2013 dan Laporan Auditor Independen]. Medan, Indonesia. https://www.tobapulp.com/wpcontent/uploads/2017/05/INRU_Annual-Report_2014.pdf.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2014. Laporan Tahunan 2013 [termasuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 and 2012 dan Laporan Auditor Independen]. Medan, Indonesia. https://www.tobapulp.com/wpcontent/uploads/2017/05/INRU_Annual-Report_2013.pdf.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2013. Laporan Tahunan 2012 [termasuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2012 and 2011 dan Laporan Auditor Independen]. Medan, Indonesia. https://www.tobapulp.com/wpcontent/uploads/2017/05/INRU_Annual_Report_2012.pdf.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2012. Laporan Tahunan 2011 [termasuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2011 and 2010 dan Laporan Auditor Independen]. Medan, Indonesia. https://www.tobapulp.com/wpcontent/uploads/2017/05/INRU_Annual-Report_2011.pdf.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2011. Laporan Tahunan 2010 [termasuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2010 and 2009 dan Laporan Auditor Independen]. Medan, Indonesia. https://www.tobapulp.com/wpcontent/uploads/2017/05/INRU_Annual-Report_2010.pdf.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2010. Laporan Tahunan 2009 [termasuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2009 and 2008 dan Laporan Auditor Independen]. Medan, Indonesia. https://www.tobapulp.com/wpcontent/uploads/2017/05/INRU_Annual-Report_2009.pdf.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2009. Laporan Tahunan 2008 [termasuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2008 and 2007 dan Laporan Auditor Independen]. Medan, Indonesia. https://www.tobapulp.com/wpcontent/uploads/2017/03/INRU_Annual-Report_2008.pdf.

PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2008. Laporan Tahunan 2007 [termasuk Laporan Keuangan per 31 Desember 2007 and 2006 dan Laporan Auditor Independen]. Medan, Indonesia.

Pulp & Paper International. 2003. "Toba Pulp Lestari prepares to roll again." 45:3 (April).

Purba, Arnaldo. 2018. Base Erosion and Profit Shifting in Indonesia. PhD thesis submitted to the Australian National University. 20 Juli 2018. <https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/148758>.

Rainforest Alliance. 2018. "CanopyStyle Verification and Guidelines Evaluation Report for: Sateri Corporate Office and Manufacturing Mills In China." Richmond, Vermont. 16 Mei 2018. https://www.rainforestalliance.org/business/wp-content/uploads/2018/10/Canopy-Verification-Report_Sateri_Final-Draft-16MAY2018.pdf.

Reuters. 2009. "Indonesia's Toba Pulp to invest \$150 mln in capacity." 10 November 2009. <https://www.reuters.com/article/tobapulpindonesia/indonesias-toba-pulp-to-invest-150-mln-in-capacityidUSJAK35424420091110>.

Reuters. 1993. "Factory gas leak sparks mob frenzy." Herald Sun. 9 November 1993.

Sateri Holdings Limited. 2014a. Annual Report 2013 [including Financial Statements for the Year Ended 31 December 2013 and Independent Auditor's Report]. Hong Kong. <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/0410/ltn20140410829.pdf>.

Sateri Holdings Limited. 2013. Annual Report 2012 [including Financial Statements for the Year Ended 31 December 2012 and Independent Auditor's Report]. Hong Kong. <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/0411/ltn20130411190.pdf>.

Sateri Holdings Limited. 2012. Annual Report 2011 [including Financial Statements for the Year Ended 31 December 2011 and Independent Auditor's Report]. Hong Kong. <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0423/ltn20120423008.pdf>.

Sateri Holdings Limited. 2011. Annual Report 2010 including Financial Statements for the Year Ended 31 December 2010 and Independent Auditor's Report]. Hong Kong.

Sateri Holdings Limited. 2010. "Sateri Holdings Limited Global Offering." Prospektus perusahaan. Hong Kong. 26 November 2010. <http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2010/1126/ltn20101126025.pdf>.

Setiajati, Hidayat. 2017. "Late rush to join Indonesia tax amnesty after \$360 billion declared." Reuters, 31 Maret 2017. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-economy-tax-idUSKBN1720VJ>.

Silka, Tyagita. 2000. "Indonesia's Toba Pulp to invest \$150 mln in capacity", Reuters, 10 November 2009, diakses 1 Mei 2020. <https://www.reuters.com/article/tobapulp-indonesia/indonesias-toba-pulp-to-invest-150-mln-in-capacity-idUSJAK35424420091110>.

Solomon, Jay and Puspa Madani. 2000. "Jakarta shuts down rayon plant because of environmental worries." Wall Street Journal, 11 Mei 2000.

Suara. 2020. "Dari Porsea ke China, dugaan patgulipat di balik ekspor bubur kayu." 3 Februari 2020. <https://www.suara.com/bisnis/2020/02/03/071000/patgulipat-di-balik-ekspor-bubur-kayu-porsea-kechina>.

Suroyo, Gayatri and Eveline Danubrata. 2015. "Indonesia to crack down on corporate tax avoidance." Reuters, 23 Februari 2015. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-tax-taxavoidanceidUSKBN0LS05320150224>.

Suroyo, Gayatri and Hidayat Setiajati. 2017. "Indonesia tax amnesty nets \$330 billion – now for reform." Reuters, 21 Maret 2017. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-economy-tax/indonesia-taxamnesty-nets-330-billion-now-for-reform-idUSKBN16S0AS>.

Suwiknyo, Edi. 2017. "Penghindaran pajak: Ruang transfer pricing dipersempit." Bisnis, 3 Mei 2017. <https://finansial.bisnis.com/read/20170503/9/650250/penghindaran-pajak-ruang-transfer-pricingdipersempit>.

Swan, Collin. 2010. "\$20,000 for a Refrigerator? Abusive Transfer Pricing Explained." Boston: Financial Transparency Coalition. 2 Agustus 2015. <https://financialtransparency.org/20000-for-a-refrigeratorabusive-transfer-pricing-explained/>.

Tax Justice Network (TJN). 2020. "Financial Secrecy Index." TJN website. Diakses pada 24 Februari 2020. <https://fsi.taxjustice.net/en/introduction/fsi-results>.

Tempo, "Jurus Sulap Ekspor Kayu", *Majalah Tempo*, 1 Februari 2020, diakses 29 April 2020. <https://majalah.tempo.co/read/hukum/159598/transaksifiktif-toba-pulp-lestari>.

Tempo, "Satu Pokok Dua Produk", *Majalah Tempo*, 1 Februari 2020, diakses 29 April 2020. <https://majalah.tempo.co/read/hukum/159589/perbedaanantara-dw-dan-bhkp-produksi-pt-toba-pulp-lestari>.

Tempo, "Saudara Tiri Dari Surga Pajak", *Majalah Tempo*, 1 Februari 2020, diakses 29 April 2020. <https://majalah.tempo.co/read/hukum/159599/hubungan-pt-toba-pulp-lestari-dengan-perusahaan-lain-milik-sukanto-tanoto>.

Tempo, "Selisih Keuntungan Hampir Sama", *Majalah Tempo*, 1 Februari 2020, diakses 29 April 2020. <https://majalah.tempo.co/read/hukum/159590/penjelasan-pt-toba-pulp-lestari-soal-tuduhan-manipulasi-dokumen-ekspor>.

Thoenes, Sander. 1998. "A nation is let loose to protest, but to what end? In Indonesia, a mill accused of ecocide is closed but reopened after protesters waver." *Christian Science Monitor*, 2 November 1998.

United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Berbagai tahun. New York: United Nations Statistics Division. Trade Statistics Branch. <https://comtrade.un.org>.

United Nations University. 2020. "Government Revenue Dataset." Diakses pada 24 Februari 2020. <https://www.wider.unu.edu/project/government-revenue-dataset>.

Vidal, John. 2014. "Vast hidden profits: from Asia palm oil giants to a tiny British tax haven." *Guardian*, 10 Mei 2014. <https://www.theguardian.com/world/2014/may/10/asian-logging-giant-tax-labyrinth-britishvirgin-islands>.

Wiedemann, Verena dan Katharina Finke. 2015. "Taxing investments in the Asia-Pacific region: The importance of cross-border taxation and tax incentives." ZEW Discussion Papers No. 15-014. Leibniz Centre for European Economic Research (ZEW). <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/107420/1/818760338.pdf>.

World Bank. 2019. "Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class". Washington, DC: World Bank and Australian Government. 30 Januari 2019. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class>.

World Customs Organization. 2019. "List of Members with Membership Date." 19 Agustus 2019. <http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-members/list-of-members-with-membership-date.pdf>.

WWF Indonesia, Greenpeace International, dan Rainforest Action Network. 2013. Surat kepada Forest Stewardship Council dengan keluhan terhadap APRIL Grup. 13 Mei 2013. <http://ic.fsc.org/download.aprilgroup-complaing.1163.htm>.

LAMPIRAN A: TANGGAPAN PT TOBA PULP LESTARI TBK TERHADAP ARTIKEL MAJALAH TEMPO 3–9 FEBRUARI 2020



PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

Office : Uniplaza, East Tower, 3th Floor
Jl. Letjend Haryono MT No. A-1 Medan 20231
Tel : +62 61 453 2088
Fax : +62 61 453 0967
Mill : Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian,
Kabupaten Toba Samosir
Tel : +62 632 734 6000, +62 632 734 6001
Fax : +62 632 734 6006
Sumatera Utara - Indonesia

TANGGAPAN PT TOBA PULP LESTARI TBK

Menanggapi pemberitaan Majalah Tempo edisi 3-9 Februari 2020, PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) mengklarifikasi tuduhan dugaan manipulasi pencatatan kode produk (*HS Code*) sebagaimana dilaporkan oleh majalah tersebut. Kegiatan ekspor produk yang dilakukan oleh Perseroan berikut pencatatan *HS Code* tersebut telah sesuai dengan klasifikasi produk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu kami jelaskan bahwa sesuai dengan permintaan pelanggan, sejak pertengahan 2010 hingga pertengahan 2017, Perseroan memproduksi *kraft pulp*. Dan sebelum periode tersebut, Perseroan memproduksi dua jenis Pulp. Keseluruhan produk tersebut menggunakan *HS Code* yang telah sesuai pada saat produk tersebut diekspor.

Sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990, Perseroan selalu menjunjung tinggi *Good Corporate Governance* dan tetap berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

3 Februari 2020

PT Toba Pulp Lestari Tbk.
Direksi

LAMPIRAN B: TANGGAPAN PT TOBA PULP LESTARI TBK TERHADAP TEMUAN UTAMA DALAM LAPORAN

Kepada Yth:

Ibu Mouna Wasef

Lead Researcher “Pulp and Paper Industry in Indonesia”

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Ibu No. 2010.16/Auriga-IV/PRO/2020 Perihal Surat Klarifikasi tanggal 20 Oktober 2020, maka melalui email ini, PT Toba Pulp Lestari Tbk (“Perseroan”) ingin menyampaikan tanggapan atas draft laporan riset sebagai berikut:

1. Mengenai tuduhan misklasifikasi produk melalui Berita Majalah Tempo, sudah dilakukan tanggapan melalui situs web Perseroan tanggal 3 Februari 2020.
2. Mengenai tuduhan pengalihan keuntungan, Perseroan telah memproduksi dan menjual produk sesuai dengan harga kewajaran dan setiap tahun dilakukan penilaian kewajaran atas harga produk oleh konsultan independen.
3. Perseroan tidak dapat memberikan penilaian atas dokumen perusahaan lain pada draft laporan riset tersebut.
4. Sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990, Perseroan selalu menjunjung tinggi *Good Corporate Governance* serta tetap berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Medan, 29 Oktober 2020

Hormat kami,

PT Toba Pulp Lestari Tbk.

Direktur

Catatan: Tanggapan ini diterima melalui email pada 29 Oktober 2020. Ringkasan temuan sebanyak 5 halaman telah dikirim ke Toba Pulp pada 21 Oktober 2020 dengan permintaan untuk memberikan tanggapan dalam waktu lima hari. Batas tanggal pemberian tanggapan diperpanjang hingga 29 Oktober 2020 atas permintaan Toba Pulp.

LAMPIRAN C: TANGGAPAN APRIL GRUP TERHADAP TEMUAN UTAMA DALAM LAPORAN

YTH Ibu Mouna Wasef
Lead Researcher Pulp and Paper Industry in Indonesia
Forum Pajak Berkeadilan

Dengan hormat,

Terima kasih atas surat yang dikirimkan kepada kami perihal riset tentang industry pulp and paper Indonesia. Bersama ini kami sampaikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami.

Sebagai latar belakang, kami jelaskan bahwa PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) memproduksi Kraft Pulp sejak tahun 1995 dan pada bulan Februari 2016, RAPP telah mendapatkan izin untuk memproduksi Dissolving Pulp dari BKPM. Setelah mendapatkan izin tersebut, RAPP melakukan serangkaian uji coba produksi jenis pulp baru yang kami namakan Acacia Eucalyptus (AE) Pulp yang merupakan modified kraft pulp. Jenis pulp ini menggunakan teknologi baru dengan campuran kayu Acacia Crasscarpa dan Eucalyptus.

Pada tahun 2016, RAPP telah melakukan kerjasama 2 tahun untuk percobaan (trial) pemanfaatan serta peningkatan mutu AE Pulp dengan Sateri di China dengan harapan agar AE Pulp bisa dipakai sebagai bahan baku industri viscose staple fiber. Selama masa percobaan ini, Sateri akan mencampurkan pulp AE dari RAPP dalam proses produksinya dengan komposisi pencampuran tertentu dengan Dissolving Pulp hingga mencapai kualitas yang mereka inginkan. Proses percobaan dan modifikasi komposisi campuran yang bersifat trial and error berlangsung secara intensif dalam periode dua tahun tersebut.

Berhubung produk AE Pulp masih dalam tahap uji coba pengembangan, maka RAPP masih menggunakan HSCode Kraft atau HSCode 4703.290000 hingga spesifikasi produk AE Pulp ini memenuhi standar ekspektasi pembeli. Dan setelah 2 tahun masa uji coba, Sateri memberikan konfirmasi bahwa AE Pulp RAPP bisa mencapai kualitas yang sama atau substitusi Dissolving Pulp bagi proses produksi mereka. Sebagai realisasi kerjasama, RAPP sudah mengekspor sesuai dengan kebutuhan Sateri dengan HS HSCode Dissolving Pulp atau HSCode 4702.000000.

Demikian penjelasan yang bisa kami berikan semoga membantu penulisan riset laporan tentang Industri Pulp and Papernya.

Salam hormat,

Catatan: Tanggapan ini diterima melalui email pada 27 Oktober 2020. Ringkasan temuan sebanyak 4 halaman telah dikirim ke APRIL Grup pada 21 Oktober 2020 dengan permintaan untuk memberikan tanggapan dalam waktu lima hari. Batas tanggal pemberian tanggapan diperpanjang hingga 27 Oktober 2020 atas permintaan APRIL Grup.

LAMPIRAN D: DOKUMENTASI PERAN SUKANTO TANOTO SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI UTAMA PT TOBA PULP LESTARI TBK, DP MACAO, DAN SATERI

Sukanto Tanoto disebut-sebut menguasai saham pengendali di PT Toba Pulp Lestari Tbk, DP Macao, dan Sateri (yang kemudian berganti nama menjadi Bracell), serta perusahaan-perusahaan lain yang disebut dalam laporan ini. Kendalanya terhadap perusahaan-perusahaan tersebut termanifestasi melalui struktur yang rumit perusahaan-perusahaan tersebut, yang tersebar lintas-yurisdiksi dan nama pun kepemilikannya berubah waktu demi waktu.

Prospektus Sateri Holdings Limited yang diterbitkan November 2010 menyebut Sukanto Tanoto sebagai pemilik saham pengendali PT Toba Pulp Lestari, DP Macao, SC International Macao, and

Sateri Holdings Limited (lihat Gambar 23).¹⁴⁹ Saat itu Sukanto Tanoto menguasai 90,6% saham PT Toba Pulp melalui Pinnacle Company Limited, satu perseroan terbatas terdaftar di Republik Seychelles.¹⁵⁰ Sejak Juni 2019, 92,4% saham PT Toba Pulp Lestari Tbk dikuasai oleh Pinnacle Company Pte Ltd yang terdaftar di Singapura.¹⁵¹ Pinnacle Company Pte Ltd ini dimiliki secara tunggal oleh Eden Hall Ltd yang terdaftar di Republik Seychelles.¹⁵²

Dalam satu pengumuman publik PT Toba Pulp Lestari pada November 2017, disebutkan bahwa DP Macao dimiliki sepenuhnya oleh Eden Hall Ltd (lihat Gambar 24).¹⁵³ Bracell Limited (sebelumnya bernama Sateri) pada Agustus 2016 juga menyatakan bahwa Sukanto Tanoto merupakan pemilik saham pengendali DP Macao (lihat Gambar 25).¹⁵⁴ Laporan Tahunan 2018 PT Toba Pulp Lestari menyebutkan DP Marketing International (MCO) Limited [yaitu DP Macao], PT Riau Andalan Pulp & Paper, RGE Pte Ltd, PT RGE Indonesia, dan Sateri (Fujian) Fibre Co. Ltd sebagai perusahaan yang berelasi dengan sifat hubungan “entitas sepengendali” (lihat Gambar 26).¹⁵⁵ Sebelumnya, surat edaran dari Sateri yang dikeluarkan pada 2014 menyatakan bahwa Sukanto Tanoto mengendalikan PT Toba Pulp Lestari dan DP Macao.

Mengenai kepemilikan Sukanto Tanoto terhadap PT Toba Pulp Lestari, menjawab pertanyaan Majalah Tempo pada November 2019 dan Januari 2020, juru bicara TPL, Norma Patty Handini Hutajulu menyatakan, “Saat ini di TPL tidak ada pemegang saham yang dimaksud tersebut [Sukanto Tanoto]. Mengenai pemegang saham di perusahaan lain, kami tidak mengetahui.”¹⁵⁶

149 Sateri, 2010, *Op. cit.*

150 Sateri, 2010, *Op. cit.*

151 Direktorat Jenderal AHU. 2020. “PT Toba Pulp Lestari Tbk.” Profil Perusahaan. 17 Februari 2020.

152 Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Singapura, “Pinnacle Company Pte. Ltd.” Profil Usaha, 17 Februari 2020.

153 PT Toba Pulp Lestari Tbk 2017. “Keterbukaan informasi kepada pemegang saham mengenai rencana transaksi material dan transaksi afiliasi PT Toba Pulp Lestari Tbk.” November 22. <https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2019/01/Keterbukaan-Information-Transaksi-Material-dan-Afiliasi-Perjanjian-Pinjam-Meminjam-22-November-2017.pdf>.

154 Bracell Limited. 2016. “(1) Proposed privatisation of Bracell Limited by BHL Limited by way of a scheme of arrangement under Section 99 of the Companies Act of Bermuda and (2) Proposed withdrawal of listing of Bracell Limited.” 30 Agustus 2016. <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2016/0829/lt20160829301.pdf>.

155 PT Toba Pulp Lestari. 2019. Laporan Tahunan 2018. <https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2019/05/LAPORAN-TAHUNAN-INRU-2018.pdf>, hlm. 175.

156 Tempo, “Selisih Keuntungan Hampir Sama”, Majalah Tempo, 1 Februari 2020, <https://majalah.tempo.co/read/hukum/159590/penjelasan-pt-toba-pulp-lestari-soal-tuduhan-manipulasi-dokumen-ekspor>, diakses 29 April 2020.

Gambar 23. Kutipan dari prospektus pencatatan Sateri Holdings Limited di Bursa Efek Hong Kong pada tahun 2010

Halaman Depan:



Halaman 33:

“Ultimate Controlling Shareholder”	Mr. Sukanto Tanoto, the ultimate controlling shareholder of our Company
------------------------------------	---

Halaman 31:

“TPL”	PT Toba Pulp Lestari, Tbk, a limited liability company incorporated in Indonesia and listed on the Indonesia Stock Exchange. As of the Latest Practicable Date, our Ultimate Controlling Shareholder controlled approximately 90.6% of TPL’s issued share capital
-------	---

Halaman 24:

“DP Macao”	DP Marketing International Limited — Macao Commercial Offshore, a limited liability company incorporated in Macau on February 15, 2007 and one of our subsidiaries until its disposal effective as of September 30, 2010
------------	--

Halaman 30:

“SC International Macao”	SC International Macao Commercial Offshore Limited (formerly known as Alloy Universal Trading (Macao Commercial Offshore) Limited), a limited liability company incorporated in Macau on November 22, 2007 and one of our subsidiaries
--------------------------	--

Halaman 28:

“Pinnacle”

Pinnacle Company Limited, a limited liability company incorporated in Republic of Seychelles and controlled by our Ultimate Controlling Shareholder

Halaman 29:

“RGE”

RGE Pte Ltd, a limited liability company incorporated in Singapore and a company controlled by our Ultimate Controlling Shareholder

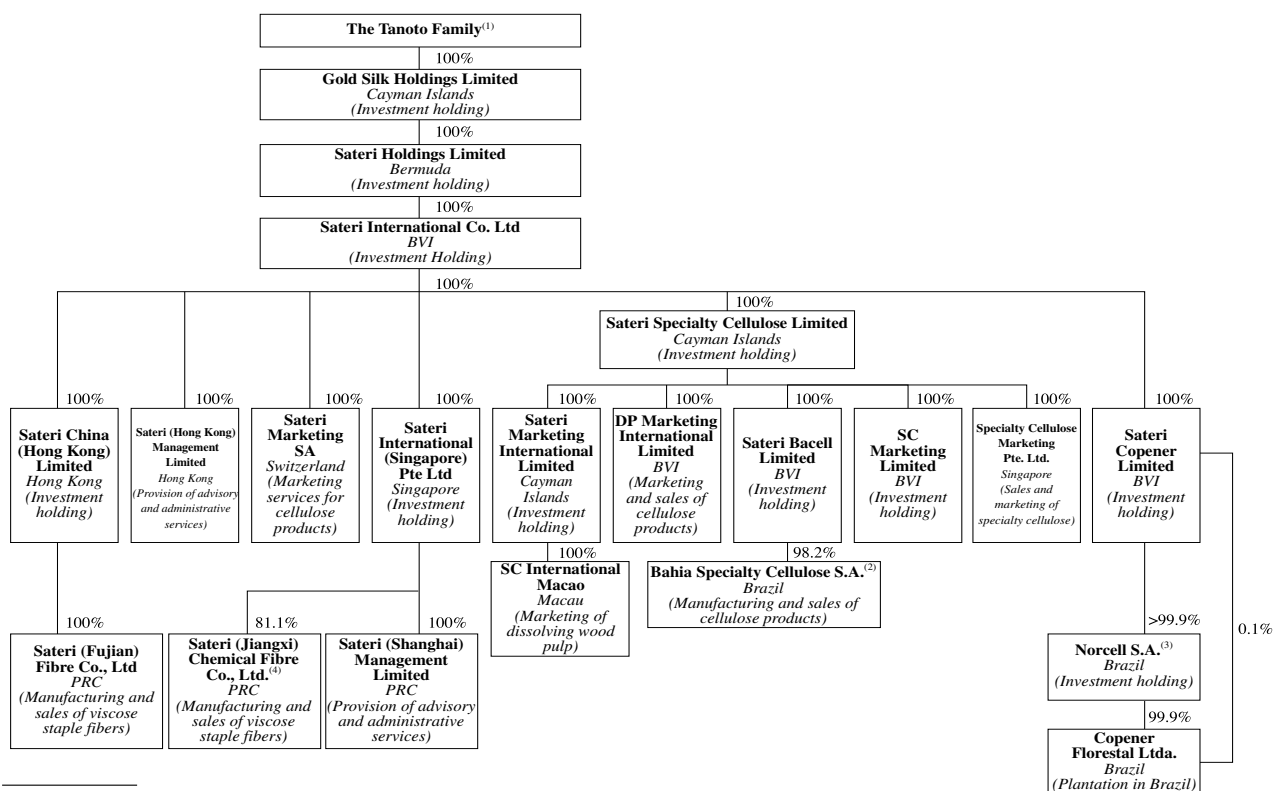
Halaman 85:

2. Disposal of DP Macao

On August 24, 2010, Sateri Specialty Cellulose entered into a share transfer agreement (which was supplemented by a supplemental agreement dated October 1, 2010) to dispose of its entire shareholding interest in DP Macao with effect from September 30, 2010 to Blue Dot, a company controlled by our Ultimate Controlling Shareholder, for a cash consideration of MOP13,229,521 (US\$1.6 million) which represents the net book value of DP Macao as of September 30, 2010.

Halaman 87:

Immediately following the Reorganization, our simplified corporate structure will be as follows:

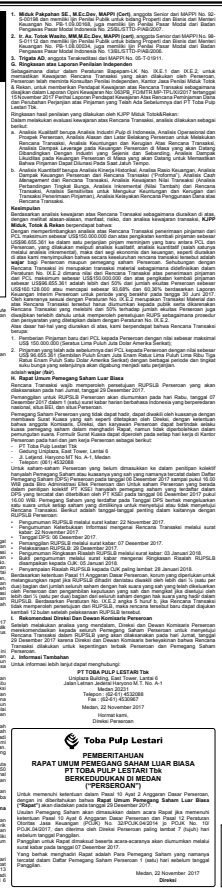


Notes:

- (1) The Tanoto Family beneficially own 100% of Gold Silk. The Trustee holds 100% of the issued share capital of Gold Silk on trust for beneficiaries including the Tanoto Family.

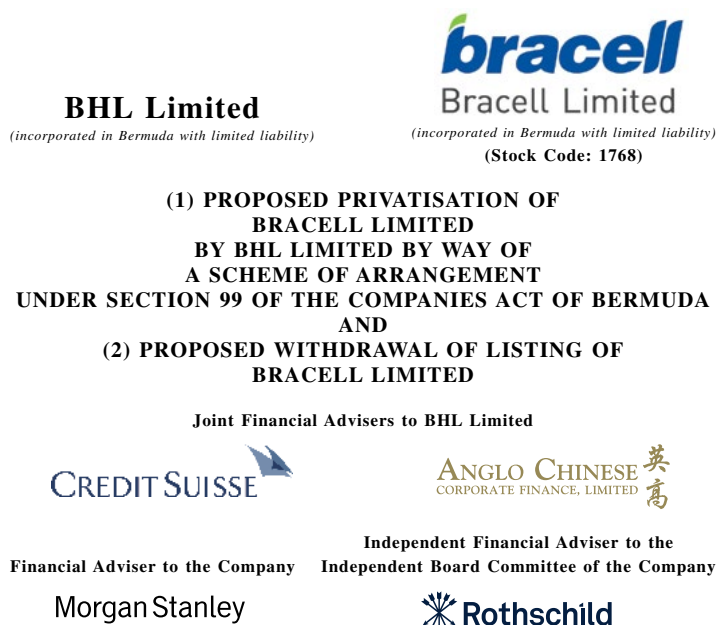
Sumber: PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2017b. "Keterbukaan informasi kepada pemegang saham mengenai rencana transaksi material dan transaksi afiliasi PT Toba Pulp Lestari Tbk." Pengumuman perusahaan. 22 November 2017.

ABSTRAK: DUGAAN PENGALIHAN KEUNTUNGAN DAN PAJAK PADA EKSPOR PULP INDONESIA

WAGSTRO 90 Adv.

Gambar 25. Kutipan dari pemberitahuan privatisasi Bracell Limited pada 30 Agustus 2016

Halaman Depan:



Halaman III-78:

19 Related party disclosures

The Group entered into the following significant transactions with related parties:

Name of related parties	Nature of transactions	Six months ended 30 June	
		2016	2015
		US\$'000	US\$'000
<i>Companies under the common control of the Major Shareholder</i>			
DP Marketing International Macao Commercial Offshore Limited	Sales of goods	148,174	146,492

Halaman V-3:

“Group” the Company and its subsidiaries from time to time

Halaman V-2:

“Company” Bracell Limited, a company incorporated in Bermuda with limited liability, whose shares are currently listed on the Main Board (stock code: 1768)

Halaman III-10:

1 GENERAL INFORMATION

Bracell Limited (the “Company”) was incorporated on 8 June 2010 and registered as an exempted company with limited liability in Bermuda under the Companies Act 1981 of Bermuda (as amended). The Company is controlled by Gold Silk Holdings Limited, a limited liability company incorporated in Cayman Islands and 100% owned and controlled by Mr. Sukanto Tanoto and certain members of his family (the “Major Shareholder”). The address of the principal place of business of the Company is 21/F, China Building, 29 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong.

Halaman V-3:

“Gold Silk”	Gold Silk Holdings Limited, a company incorporated in the Cayman Islands with limited liability, whose entire issued share capital is held by Fiduco
-------------	--

Halaman V-2:

“Fiduco”	Fiduco Trust Management AG, the trustee of a discretionary trust established by the Ultimate Controlling Shareholder as settlor and whose beneficiaries include the Ultimate Controlling Shareholder and certain members of his family
----------	--

Halaman V-6:

“Ultimate Controlling Shareholder”	Mr. Sukanto Tanoto
------------------------------------	--------------------

Sumber: Bracell Limited. 2016. “(1) Proposed privatisation of Bracell Limited by BHL Limited by way of a scheme of arrangement under Section 99 of the Companies Act of Bermuda and (2) Proposed withdrawal of listing of Bracell Limited.” Dokumen yng diterbitkan Bersama oleh Bracell Limited dan BHL Limited. 30 Agustus 2016. <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2016/0829/ltn20160829301.pdf>.

Gambar 26. Kutipan dari laporan tahunan 2018 PT Toba Pulp Lestari Tbk

Halaman Depan:

Laporan Tahunan
2018
Annual Report



Berinvestasi untuk Masa Depan: Peremajaan Operasional
Perseroan untuk Meningkatkan Kinerja Usaha Serta Kepedulian
terhadap Lingkungan dan Masyarakat

*Investing for the Future: Rejuvenating Operations to Improve
Business Performance and Care for the Environment and
Community*

Halaman 175:

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat pihak berelasi

Perusahaan yang berelasi/
Related parties Company

Pinnacle Company Pte. Ltd.

DP Marketing International (MCO) Limited
PT Pec Tech Services Indonesia
PT Riau Andalan Pulp and Paper

Forindo Private Limited

PT Gunung Melayu
PT Hari Sawit Jaya
PT Indo Sepadan Jaya
PT Asianagro Lestari
PT Saudara Sejati Luhur
PT Supra Matra Abadi
PT Nusa Pusaka Kencana
PT Esensindo Cipta Cemerlang
RGE Pte Ltd
PT RGE Indonesia
Sateri (Fujian) Fibre, Co., Ltd

Sifat hubungan/
Nature of relationship

Pemegang saham mayoritas /
Major Shareholder

Entitas sepengendali / *Under common control*
Entitas sepengendali / *Under common control*
Entitas sepengendali / *Under common control*

Entitas sepengendali / *Under common control*

Entitas sepengendali / *Under common control*
Entitas sepengendali / *Under common control*
Entitas sepengendali / *Under common control*
Entitas sepengendali / *Under common control*
Entitas sepengendali / *Under common control*
Entitas sepengendali / *Under common control*
Entitas sepengendali / *Under common control*
Entitas sepengendali / *Under common control*
Entitas sepengendali / *Under common control*
Entitas sepengendali / *Under common control*
Entitas sepengendali / *Under common control*
Entitas sepengendali / *Under common control*

30. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

a. Nature of relationships

Sifat transaksi/
Nature of Transactions

Pinjaman/*Loans*

Penjualan/*Sales*
Pemakaian jasa/*Services*
Pembelian material/jasa/
Purchases, services

Pembelian material/jasa/
Purchases, services

Pembelian material/*Purchases*
Pembelian material/*Purchases*
Pembelian material/*Purchases*
Pembelian material/*Purchases*
Pembelian material/*Purchases*
Pembelian material/*Purchases*
Pemakaian jasa/*Services*
Pembelian material/*Purchases*
Pemakaian jasa/*Services*
Pemakaian jasa/*Services*
Pembelian material/*Purchases*

Sumber: PT Toba Pulp Lestari Tbk, 2019, Laporan Tahunan 2018, <https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2019/05/LAPORANTAHUNAN-INRU-2018.pdf>.

Gambar 27. Kutipan dari surat edaran dari Sateri Holdings Limited pada 4 November 2014

Halaman Depan:



Sateri Holdings Limited
賽得利控股有限公司
(incorporated in Bermuda with limited liability)
(Stock Code: 1768)

- (1) MAJOR TRANSACTION AND CONNECTED TRANSACTION
IN RELATION TO
THE DISPOSAL OF THE VISCOSE STAPLE FIBER BUSINESS IN THE PRC
- (2) CONTINUING CONNECTED TRANSACTION IN RELATION TO
THE PULP SUPPLY AGREEMENT
- (3) CONNECTED TRANSACTION IN RELATION TO
THE PROVISION OF GUARANTEES
- (4) AMENDMENTS TO THE DEED OF NON-COMPETITION
- (5) CHANGE OF COMPANY NAME AND
AMENDMENT TO THE BYE-LAWS
- (6) DISTRIBUTION TO SHAREHOLDERS
- (7) NOTICE OF SPECIAL GENERAL MEETING

Financial Adviser
to the Company

 CREDIT SUISSE

Independent Financial Adviser
to the Independent Board Committee
and the Independent Shareholders

 ROTHSCCHILD

Halaman 5:

**“Ultimate Controlling
Shareholder”**

Mr. Sukanto Tanoto, the ultimate controlling shareholder of
the Company and Gold Silk

“TPL”

PT Toba Pulp Lestari Tbk, a limited liability company
incorporated in Indonesia and listed on the Indonesia Stock
Exchange, whose majority shareholder is Pinnacle

Halaman 3:

“Pinnacle”

Pinnacle Company Limited, a limited liability company
incorporated in the Republic of Seychelles and controlled by
the Ultimate Controlling Shareholder

Halaman 2:

“DP Macao”

DP Marketing International Macao Commercial Offshore
Limited (formerly known as DP Marketing International
Limited — Macao Commercial Offshore), a limited liability
company incorporated in Macau and controlled by the
Ultimate Controlling Shareholder

Halaman 1:

“Company”

Sateri Holdings Limited, a company incorporated in Bermuda as an exempted company with limited liability, the shares of which are listed on the Main Board of the Stock Exchange (stock code: 1768)

Halaman 2:

“Gold Silk”

Gold Silk Holdings Limited, a limited liability company incorporated in the Cayman Islands and the immediate controlling shareholder of the Company and which is controlled by the Ultimate Controlling Shareholder

Halaman 3:

“Purchaser”

Pacific Viscose Limited, a limited liability company incorporated in Hong Kong and controlled by the Ultimate Controlling Shareholder

“Sale and Purchase Agreement”

the Sale and Purchase Agreement dated 29 October 2014 entered into between Sateri International and the Purchaser in relation to the Transaction

Sumber: Sateri Holdings Limited. 2010. “Sateri Holdings Limited Global Offering”. Prospektus perusahaan. Hong Kong. 26 November 2010. <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2010/1126/ltn20101126025.pdf>.

Sumber: Sateri Holdings Limited, 2014, “1) Major Transaction and Related Transaction in Relation to the Disposal of the Viscose StapleFiber Business in the PRC. . .,” Surat Edaran, 19 November 2014, <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/1029/ltn20141029952.pdf>.

